

# Jurnal Perspektif

JURNAL AKADEMIK, PENELITIAN, DAN  
ILMU SOSIAL

*@2026 Journal of the Institute for Bioblical Aramaic Studies  
Email: [perpektif@journal.ibas.us](mailto:perpektif@journal.ibas.us)  
Website: <https://journal.ibas.us/>*



## Daftar isi

**Barabas sebagai Simbol Populisme: Analisis Sosiologi Politik terhadap Pilihan Massa dalam Konteks Penindasan Romawi**

Page 1

**Dekonstruksi Metodologis dalam Studin Agama: Analisis Epistemologis atas Perspektif Insider-Outsider dan Believer- Non Believer**

Page 13

**Pelestarian Lingkungan dalam Kebijakan Ekstraktif di Taman Nasional Yasuni (2013–2023): Studi Kualitatif Berbasis Analisis Dokumen**

Page 25

**Strategi Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Majemuk Indonesia**

Page 35

**Strategi Kurikulum PAK bagi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Generasi Alpha: Pendekatan Kontekstual dan Relevan**

Page 49

**Krisis Sakramental dalam Lutheranisme Modern: Analisis Kualitatif Historis**

Page 61

**Dinamika Sosial-Politik dalam Old Calendarist Schism: Analisis Historis Kualitatif**

Page 71

**Pola Pikir sebagai Determinan Persepsi Penuaan: Analisis Literatur Interdisipliner**

Page 80

**Legalitas Negara dalam Rimba Gerilya: Studi tentang PDRI sebagai Penyelamat Kedaulatan Republik Indonesia**

Page 91

**Politik Memori dalam Historiografi Indonesia: Analisis Wacana Kritis atas Penghapusan Narasi Sakiko Kanase pada Era Soekarno**

Page 105



# Barabas sebagai Simbol Populisme: Analisis Sosiologi Politik terhadap Pilihan Massa dalam Konteks Penindasan Romawi

Nathasya Wongkar Nelwan

Andre Akijuwon, Jr 

Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[tasyanelwan67@gmail.com](mailto:tasyanelwan67@gmail.com)

[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Barabas sebagai simbol populisme dalam perspektif sosiologi politik, khususnya dalam konteks pilihan massa di bawah penindasan Romawi. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana dinamika sosial, tekanan politik, dan konstruksi narasi memengaruhi preferensi kolektif masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, analisis wacana, dan pendekatan historis-kontekstual terhadap teks Injil dan literatur akademik terkait populisme serta perilaku massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan terhadap Barabas bukan keputusan spontan, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh emosi kolektif, manipulasi elite, dan kebutuhan akan solusi instan. Barabas berfungsi sebagai simbol populisme yang merepresentasikan aspirasi rakyat terhadap pembebasan konkret, sementara Yesus menawarkan transformasi internal yang kurang sesuai dengan ekspektasi massa. Temuan ini menegaskan bahwa pola populisme memiliki kontinuitas historis dan tetap relevan dalam memahami dinamika politik modern.

**Kata-kunci:** Barabas, Massa, Populisme, Sosiologi Politik, Yesus

## Received:

Feb/20/2026

## Accepted:

March/20/2026

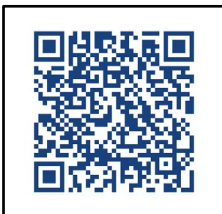
## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze Barabbas as a symbol of populism from the perspective of political sociology, particularly within the context of mass choice under Roman oppression. The main focus of the study is to understand how social dynamics, political pressure, and narrative construction influenced the collective preferences of society. The research employs a qualitative approach using library research, discourse analysis, and a historical-contextual approach to the Gospel texts and academic literature related to populism and mass behavior. The findings indicate that the choice of Barabbas was not a spontaneous decision, but rather the result of social construction shaped by collective emotions, elite manipulation, and the public's desire for instant solutions. Barabbas functions as a symbol of populism representing the people's aspiration for concrete liberation, while Jesus offered an internal transformation that was less aligned with the expectations of the masses. These findings affirm that patterns of populism demonstrate historical continuity and remain relevant for understanding modern political dynamics.*

**Keywords:** Barabbas, Jesus, Mass Society, Political Sociology, Populism.



## Pendahuluan

Fenomena populisme dalam konteks sosiologi politik semakin menjadi perhatian utama dalam studi kontemporer karena berkaitan dengan dinamika relasi antara massa, elite, dan kekuasaan dalam situasi krisis sosial (Mudde & Kaltwasser, 2017). Populisme sering muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap struktur kekuasaan yang dianggap tidak representatif atau menindas (Bonikowski, 2019). Dalam banyak kasus, populisme memobilisasi emosi kolektif dengan membangun dikotomi antara “rakyat” dan “elite” atau “musuh eksternal” (Moffitt, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat tidak selalu rasional, tetapi dipengaruhi oleh tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis (Gidron & Hall, 2020). Dalam konteks historis, fenomena ini juga dapat ditemukan dalam masyarakat kuno, termasuk dalam narasi pilihan massa terhadap Barabas dibanding Yesus (Horsley, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji populisme sebagai fenomena global yang memiliki karakteristik serupa di berbagai konteks budaya dan sejarah (Müller, 2016). Studi oleh Inglehart dan Norris menunjukkan bahwa populisme sering dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan krisis identitas budaya dalam masyarakat (Inglehart & Norris, 2019). Dalam konteks religius, penelitian oleh Arifianto menyoroti bagaimana agama dapat menjadi instrumen mobilisasi politik dalam masyarakat yang mengalami tekanan sosial (Arifianto, 2018). Penelitian lain dalam jurnal *Journal of Political Ideologies* menegaskan bahwa populisme tidak hanya bersifat modern, tetapi memiliki akar historis yang panjang (Stanley, 2018). Kajian-kajian ini memberikan dasar bahwa fenomena pilihan massa dalam narasi Barabas dapat dianalisis dalam kerangka populisme politik.

Dalam perspektif akademik, populisme dipahami sebagai ideologi tipis (*thin-centered ideology*) yang menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya tertentu (Mudde, 2017). Pendekatan sosiologi politik menekankan bahwa perilaku massa sering kali terbentuk melalui konstruksi sosial dan narasi yang dibangun oleh aktor-aktor berpengaruh (Weyland, 2021). Teori perilaku massa juga menunjukkan bahwa individu dalam kerumunan cenderung kehilangan rasionalitas individual dan mengikuti arus kolektif (Reicher, 2019). Dalam konteks ini, pilihan terhadap Barabas dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika sosial yang kompleks, bukan sekadar keputusan spontan (Crossan, 2018). Perspektif ini membuka ruang analisis yang lebih luas terhadap teks religius sebagai refleksi realitas sosial.

Dalam praktiknya, populisme telah memengaruhi berbagai kebijakan dan dinamika politik di berbagai negara, termasuk dalam bentuk gerakan anti-establishment dan nasionalisme sempit (Norris & Inglehart, 2019). Implementasi populisme sering kali terlihat dalam penggunaan retorika yang sederhana namun emosional untuk menarik dukungan massa (Moffitt, 2020). Dalam konteks sejarah Romawi, kondisi penindasan politik dan ekonomi terhadap masyarakat Judea menciptakan ruang bagi munculnya figur-figur seperti Barabas (Goodman, 2018). Pilihan massa terhadap figur yang menawarkan solusi instan melalui kekuatan menunjukkan pola yang serupa dengan praktik populisme modern (Horsley, 2020). Hal ini menegaskan bahwa populisme bukan hanya fenomena kontemporer, tetapi juga memiliki akar historis yang kuat.

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa populisme berkaitan erat dengan kondisi krisis, ketidakpuasan sosial, dan kebutuhan akan representasi yang dianggap autentik (Gidron & Hall, 2020). Konsensus akademik menyatakan bahwa populisme cenderung mengedepankan solusi sederhana terhadap masalah kompleks (Müller, 2016). Dalam banyak kasus, populisme juga mengabaikan dimensi etis atau normatif demi mencapai tujuan politik jangka pendek (Bonikowski, 2019). Hal ini sejalan dengan pola pilihan massa dalam narasi Barabas yang lebih mengutamakan kepentingan praktis dibanding nilai moral (Crossan, 2018). Dengan demikian, kajian ini menempatkan narasi tersebut

sebagai refleksi dari dinamika populisme dalam perspektif sosiologi politik.

Meskipun populisme telah banyak dikaji dalam sosiologi politik, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana fenomena ini bekerja dalam konteks historis-religius secara spesifik (Breskaya et al., 2018). Sebagian besar studi lebih berfokus pada konteks modern sehingga analisis terhadap masyarakat kuno sering kali bersifat deskriptif dan kurang teoritis (Kellogg et al., 2020). Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi antara kajian teks keagamaan dan teori sosiologi politik kontemporer (Leofreddi, 2023). Selain itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teologi dan sosiologi masih relatif terbatas dalam literatur akademik (Stoeckl, 2010). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dinamika massa dalam narasi religius belum sepenuhnya komprehensif.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan ketidakseimbangan fokus, di mana populisme lebih sering dianalisis dalam konteks negara modern dibandingkan dengan konteks historis seperti era Romawi (Bonikowski, 2019). Studi yang ada cenderung menitikberatkan pada aktor politik kontemporer dan mengabaikan dimensi simbolik dalam teks religius (Moffitt, 2020). Akibatnya, figur seperti Barabas jarang dianalisis sebagai representasi populisme dalam kerangka akademik (Horsley, 2020). Selain itu, literatur lebih banyak membahas populisme sebagai fenomena makro tanpa mengeksplorasi dinamika mikro dalam perilaku massa (Reicher, 2019). Ketidakseimbangan ini menciptakan celah dalam memahami hubungan antara simbol religius dan perilaku politik kolektif.

Dari segi cakupan, penelitian tentang populisme sering terbatas pada pendekatan empiris kontemporer seperti survei dan studi kasus modern (Gidron & Hall, 2020). Pendekatan ini jarang diterapkan pada analisis teks historis atau narasi keagamaan sebagai sumber data sosial (Mudde, 2017). Selain itu, kajian yang menghubungkan konteks kolonial atau penindasan struktural dengan perilaku massa dalam teks religius masih sangat terbatas (Goodman, 2018). Hal ini mengakibatkan kurangnya eksplorasi terhadap bagaimana kondisi sosial-politik masa lalu membentuk keputusan kolektif masyarakat (Norris & Inglehart, 2019). Dengan demikian, cakupan penelitian yang ada belum sepenuhnya menjangkau dimensi historis dan religius secara simultan.

Kekosongan analisis juga terlihat pada kurangnya perhatian terhadap variabel simbolik dan naratif dalam studi populisme (Stanley, 2018). Sebagian besar penelitian menekankan aspek institusional dan ideologis, tetapi mengabaikan peran narasi dalam membentuk persepsi massa (Weyland, 2021). Dalam konteks ini, narasi Barabas dan Yesus belum banyak dianalisis sebagai konstruksi sosial yang mempengaruhi pilihan kolektif (Crossan, 2018). Selain itu, variabel seperti emosi kolektif, tekanan sosial, dan manipulasi elite dalam teks religius masih jarang dikaji secara sistematis (Inglehart & Norris, 2019). Kekosongan ini membuka ruang untuk analisis yang lebih mendalam dan terintegrasi.

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan penelitian baru yang mengintegrasikan sosiologi politik, studi agama, dan analisis historis dalam satu kerangka yang utuh (Müller, 2016). Penelitian ini perlu mengkaji teks religius sebagai refleksi realitas sosial dan bukan hanya sebagai dokumen teologis (Arifianto, 2018). Selain itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antara populisme dan simbolisme religius secara lebih komprehensif (Mudde & Kaltwasser, 2017). Kajian ini juga dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara teori populisme modern dan konteks historis kuno (Horsley, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam studi sosiologi politik dan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi Barabas dalam Injil sebagai representasi fenomena populisme dalam perspektif sosiologi politik, khususnya dalam konteks penindasan struktural oleh kekuasaan Romawi (Brubaker, 2020). Selain itu, penelitian ini berupaya mengisi

kekosongan kajian yang mengaitkan teks religius dengan teori populisme secara sistematis dan analitis (De Cleen et al., 2018). Fokus utama diarahkan pada bagaimana pilihan massa mencerminkan dinamika relasi antara emosi kolektif, kekuasaan, dan ideologi (Aslanidis, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menempatkan teks sebagai dokumen teologis, tetapi juga sebagai fenomena sosial-politik (Beaumont, 2019). Tujuan ini memperluas cakupan studi populisme ke dalam ranah historis dan religius yang selama ini kurang diperhatikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretatif yang memungkinkan analisis mendalam terhadap makna sosial dalam teks (Flyvbjerg, 2021). Metode ini menggabungkan analisis wacana dan pendekatan historis-kontekstual untuk memahami dinamika sosial di balik narasi Injil (Fairclough, 2013). Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka sosiologi politik untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan yang memengaruhi keputusan massa (Heywood, 2021). Pendekatan interdisipliner juga diterapkan untuk mengintegrasikan perspektif teologi dan ilmu sosial (Joas, 2020). Dengan metode ini, penelitian mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Fokus analisis penelitian ini terletak pada tiga aspek utama, yaitu konstruksi simbolik Barabas sebagai figur populis, dinamika psikologi massa, dan pengaruh struktur kekuasaan (Taggart, 2019). Analisis juga diarahkan pada bagaimana narasi tersebut membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap konsep “pembebasan” (Laclau, 2005). Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana elite agama dan politik berperan dalam memobilisasi opini publik (Eatwell & Goodwin, 2018). Fokus ini memungkinkan identifikasi pola-pola populisme dalam konteks historis yang relevan dengan kondisi modern (Judis, 2016). Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga eksplanatif.

Penelitian ini penting karena memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara agama dan politik dalam konteks perilaku massa (Habermas, 2021). Kajian ini juga membantu menjelaskan bagaimana kondisi krisis dapat mendorong masyarakat untuk memilih solusi yang bersifat populistik (Pappas, 2019). Selain itu, penelitian ini relevan dalam menjelaskan fenomena manipulasi massa yang masih terjadi dalam politik kontemporer (Müller, 2021). Dengan memahami pola historis, penelitian ini memberikan dasar untuk analisis kritis terhadap dinamika politik modern (Rooduijn, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan ilmu sosial dan studi agama.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis baru yang mengintegrasikan sosiologi politik dan studi teks religius (Alexander, 2020). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang populisme sebagai fenomena lintas waktu dan konteks (Urbinati, 2019). Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya studi interdisipliner antara teologi dan ilmu sosial (Smith, 2020). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan yang mengkaji hubungan antara simbolisme religius dan perilaku politik (Arato, 2019). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan nilai teoritis dan praktis bagi pengembangan kajian sosiologi politik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif untuk memahami makna sosial dan politik dalam narasi pilihan Barabas dalam Injil. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam, khususnya dalam konteks hubungan antara teks religius dan realitas sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan analisis yang tidak terbatas pada angka, tetapi pada makna, simbol, dan konstruksi sosial yang terkandung dalam teks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **studi kepustakaan (library research)**, dengan fokus

pada analisis teks Injil Matius 27:15–26 sebagai sumber utama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur pendukung berupa jurnal akademik, buku sosiologi politik, dan kajian teologi yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun kerangka teoritis serta memperkuat interpretasi terhadap data utama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **dokumentasi**, yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan teks-teks tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi teks Alkitab, literatur akademik tentang populisme, serta kajian historis mengenai kondisi sosial-politik Judea pada masa kekuasaan Romawi. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi dan validitas sumber.

Teknik analisis data menggunakan **analisis wacana (discourse analysis)** dan **analisis historis-kontekstual**. Analisis wacana digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana narasi Barabas dikonstruksi sebagai simbol populisme dalam teks. Sementara itu, analisis historis-kontekstual digunakan untuk memahami latar sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi pilihan massa pada saat itu. Kedua pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi **sosiologi politik**, **teori populisme**, dan **teori perilaku massa**. Teori populisme digunakan untuk menjelaskan dikotomi antara “rakyat” dan “musuh” yang muncul dalam narasi. Teori perilaku massa digunakan untuk memahami dinamika psikologis dalam keputusan kolektif. Sementara itu, sosiologi politik digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan yang memengaruhi pilihan masyarakat.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari disiplin yang berbeda. Selain itu, interpretasi dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari bias serta menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## Hasil Analisis

Aspek	Barabas (Simbol Populisme)	Yesus (Non-Populisme)
Basis legitimasi	Dukungan massa dan sentimen kolektif	Otoritas moral dan spiritual
Karakter kepemimpinan	Revolusioner, konfrontatif	Transformasional, non-kekerasan
Strategi utama	Perlawanan fisik terhadap kekuasaan	Perubahan internal dan etis
Target utama	Musuh eksternal (kekuasaan Romawi)	Dosa dan kondisi batin manusia
Daya tarik bagi massa	Emosional, instan, konkret	Normatif, jangka panjang
Relasi dengan elite	Didukung atau dimanfaatkan elite tertentu	Ditolak oleh elite agama
Persepsi masyarakat	Pahlawan pembebasan	Tidak memenuhi ekspektasi politik
Dampak sosial	Mobilisasi massa berbasis konflik	Transformasi individu dan komunitas

**Tabel.** Populisme dan non Populisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan massa terhadap Barabas dalam narasi Injil tidak dapat dipahami sebagai keputusan spontan, tetapi sebagai produk dari konstruksi sosial dan tekanan

politik yang kuat. Dalam konteks Judea abad pertama, penindasan Romawi menciptakan kondisi ketidakpuasan kolektif yang mendorong masyarakat mencari figur pembebas yang bersifat praktis dan instan. Barabas muncul sebagai simbol perlawanan yang konkret terhadap kekuasaan, sementara Yesus dipersepsikan tidak memenuhi ekspektasi politik massa. Temuan ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat lebih dipengaruhi oleh kebutuhan sosial-politik daripada pertimbangan moral atau spiritual. Dengan demikian, pilihan tersebut mencerminkan pola perilaku populistik dalam situasi krisis.

Analisis juga menemukan bahwa dinamika psikologi massa memainkan peran signifikan dalam keputusan kolektif tersebut. Massa cenderung mengalami deindividuasi, di mana identitas pribadi melebur dalam identitas kelompok sehingga rasionalitas individu menurun. Dalam kondisi ini, emosi kolektif seperti kemarahan terhadap penjajah dan harapan akan pembebasan menjadi faktor dominan. Elite agama dan politik memanfaatkan situasi ini untuk mengarahkan opini publik melalui narasi yang memperkuat legitimasi Barabas sebagai “pahlawan rakyat”. Hasil ini menegaskan bahwa perilaku massa sangat rentan terhadap manipulasi dalam konteks tekanan sosial. Pola ini sejalan dengan teori perilaku massa dalam sosiologi politik.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa Barabas berfungsi sebagai simbol populisme yang merepresentasikan dikotomi antara “rakyat” dan “musuh”. Barabas diposisikan sebagai representasi aspirasi rakyat yang tertindas, sementara Roma dan struktur kekuasaan diasosiasikan sebagai musuh bersama. Narasi ini memperkuat legitimasi pilihan massa karena sesuai dengan kebutuhan identitas kolektif mereka. Sebaliknya, Yesus tidak masuk dalam kerangka populistik tersebut karena menawarkan transformasi internal, bukan revolusi eksternal. Temuan ini menunjukkan bahwa populisme cenderung mengedepankan solusi yang bersifat konkret dan emosional. Hal ini menjelaskan mengapa figur seperti Barabas lebih mudah diterima oleh massa.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa struktur kekuasaan memiliki peran penting dalam membentuk pilihan masyarakat. Pilatus sebagai otoritas Romawi mencoba menggunakan mekanisme pembebasan tahanan sebagai strategi politik untuk meredakan ketegangan sosial. Namun, strategi ini gagal karena tidak memperhitungkan dinamika emosi dan tekanan sosial dalam massa. Elite agama turut memperkuat tekanan tersebut dengan memobilisasi opini publik untuk menolak Yesus. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan kolektif tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial, tetapi juga oleh intervensi aktor-aktor berkuasa. Dengan demikian, pilihan massa merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur dan agen.

Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa pola pilihan Barabas memiliki relevansi dengan fenomena populisme modern. Dalam berbagai konteks kontemporer, masyarakat cenderung memilih pemimpin yang menawarkan solusi cepat terhadap masalah kompleks, meskipun mengabaikan dimensi etis. Narasi populistik yang menekankan identitas kelompok dan musuh bersama masih menjadi strategi efektif dalam mobilisasi massa. Temuan ini menunjukkan adanya kontinuitas historis dalam perilaku politik masyarakat. Dengan demikian, narasi Barabas dapat dipahami sebagai refleksi awal dari dinamika populisme yang terus berulang dalam sejarah.

## **Pembahasan**

Temuan utama menunjukkan bahwa pilihan massa terhadap Barabas merupakan hasil konstruksi sosial dan tekanan politik dalam konteks penindasan Romawi (Brubaker, 2020). Kondisi penindasan tersebut menciptakan ketidakpuasan kolektif yang mendorong masyarakat mencari alternatif pembebasan yang konkret (Goodman, 2018). Dalam situasi ini, keputusan massa tidak berdiri secara independen, tetapi dibentuk oleh interaksi antara struktur kekuasaan dan dinamika sosial (Weyland, 2021). Narasi yang berkembang di tengah masyarakat memperkuat legitimasi

Barabas sebagai figur yang relevan secara politik (Moffitt, 2020). Dengan demikian, pilihan massa mencerminkan konstruksi sosial yang kompleks, bukan tindakan spontan (Reicher, 2019).

Pilihan tersebut mencerminkan kecenderungan populistik di mana masyarakat lebih memilih figur yang menawarkan solusi instan dibanding transformasi moral (Mudde & Kaltwasser, 2017). Dalam kerangka populisme, masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan praktis yang dapat segera dirasakan (Bonikowski, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik sering kali dipengaruhi oleh kondisi krisis yang mendesak (Gidron & Hall, 2020). Barabas dipersepsikan sebagai solusi konkret terhadap penindasan yang dialami masyarakat (Horsley, 2020). Sebaliknya, pendekatan moral dan spiritual yang ditawarkan Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi populistik massa (Crossan, 2018).

Dinamika psikologi massa seperti deindividuasi dan dominasi emosi kolektif menjelaskan mengapa rasionalitas individu melemah dalam situasi krisis (Le Bon, 1895/2017). Dalam kondisi tersebut, individu cenderung mengikuti arus mayoritas tanpa refleksi kritis (Turner & Killian, 1987). Emosi seperti kemarahan dan ketakutan menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan kolektif (Jasper, 2018). Hal ini memperkuat kecenderungan massa untuk memilih solusi yang dianggap paling cepat dan nyata (Pappas, 2019). Dengan demikian, perilaku massa lebih dipengaruhi oleh emosi daripada rasionalitas (Rooduijn, 2019).

Manipulasi elite agama dan politik memperkuat konstruksi narasi yang menjadikan Barabas sebagai simbol pembebasan yang sesuai dengan ekspektasi massa (Djupe & Neiheisel, 2022). Elite memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik melalui komunikasi dan framing tertentu (Entman, 1993). Narasi yang dibangun tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat (Fairclough, 2013). Dalam konteks ini, Barabas diposisikan sebagai representasi aspirasi kolektif (Taggart, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik memainkan peran penting dalam mobilisasi massa (Alexander, 2020).

Temuan ini memperluas studi populisme yang selama ini berfokus pada konteks modern dengan menunjukkan bahwa pola serupa telah terjadi dalam masyarakat kuno (Müller, 2016). Studi sebelumnya cenderung menempatkan populisme sebagai fenomena kontemporer (Norris & Inglehart, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika tersebut memiliki akar historis yang lebih panjang (Urbinati, 2019). Dengan demikian, populisme dapat dipahami sebagai pola sosial yang berulang (Eatwell & Goodwin, 2018). Hal ini memperkaya pemahaman tentang kontinuitas fenomena populisme (Judis, 2016).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengabaikan dimensi simbolik religius, studi ini menegaskan bahwa narasi keagamaan dapat dianalisis sebagai konstruksi sosial-politik (Beaumont, 2019). Banyak studi sebelumnya lebih fokus pada aspek institusional dan ideologis (Stanley, 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa simbol dan narasi memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku massa (Laclau, 2005). Dengan demikian, teks religius dapat dipahami sebagai sumber data sosial yang valid (Joas, 2020). Pendekatan ini memperluas metodologi dalam studi populisme (De Cleen et al., 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku massa dalam situasi krisis sangat rentan terhadap mobilisasi emosional dan manipulasi elite (Gerschewski, 2013). Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami faktor psikologis dalam analisis politik (Jasper, 2018). Selain itu, peran elite dalam membentuk opini publik menjadi faktor kunci dalam dinamika sosial (Djupe & Neiheisel, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik tidak selalu mencerminkan kehendak rasional masyarakat (Widhyharto et al., 2021). Dengan demikian, analisis populisme harus mempertimbangkan dimensi emosional dan struktural.

Temuan ini memiliki implikasi dalam memahami fenomena populisme modern yang masih mengandalkan narasi identitas dan musuh bersama untuk memperoleh legitimasi (Brubaker, 2020). Pola ini terlihat dalam berbagai konteks politik kontemporer (Moffitt, 2020). Narasi populistik tetap efektif dalam memobilisasi dukungan massa (Bonikowski, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas antara fenomena historis dan modern (Rooduijn, 2019). Dengan demikian, studi ini relevan untuk memahami dinamika politik saat ini.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan mengintegrasikan sosiologi politik, studi agama, dan analisis historis dalam satu kerangka analitis (Arifianto, 2018). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial (Breskaya et al., 2018). Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa teks religius dapat dianalisis secara empiris (Leofreddi, 2023). Hal ini menjawab keterbatasan studi sebelumnya yang bersifat deskriptif (Kellogg et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis yang signifikan.

Studi ini juga memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa teks religius dapat berfungsi sebagai sumber analisis empiris untuk memahami dinamika populisme lintas konteks sejarah (Stoeckl, 2010). Penelitian ini memperluas cakupan studi populisme ke ranah historis (Horsley, 2020). Selain itu, kajian ini menghubungkan teori modern dengan konteks kuno (Mudde, 2017). Hal ini membantu menjembatani kesenjangan dalam literatur akademik (Müller, 2016). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam studi sosiologi politik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Barabas dapat dipahami sebagai simbol populisme dalam perspektif sosiologi politik, di mana pilihan massa terhadapnya merupakan hasil konstruksi sosial, tekanan politik, dan dinamika emosi kolektif dalam konteks penindasan Romawi. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa preferensi masyarakat tidak semata didasarkan pada pertimbangan rasional atau moral, tetapi dipengaruhi oleh kebutuhan praktis, identitas kolektif, dan manipulasi elite. Dengan demikian, narasi Barabas mencerminkan pola populisme yang menekankan solusi instan dan konkret dalam situasi krisis sosial.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian populisme dengan memasukkan teks religius sebagai sumber analisis sosial yang valid dan menunjukkan bahwa populisme memiliki akar historis yang panjang. Secara praktis, temuan ini memberikan pemahaman bahwa dinamika populisme modern tidak terlepas dari pola perilaku massa yang serupa, sehingga diperlukan pendekatan kritis dalam menghadapi mobilisasi politik berbasis emosi dan identitas. Penelitian ini menyarankan penguatan literasi politik dan kesadaran sosial agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi populistik yang menyederhanakan kompleksitas masalah.

## Referensi

- Alexander, J. C. (2020). *The drama of social life*. Polity Press.
- Arato, A. (2019). Populism and civil society. *Constellations*, 26(2), 1–15. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12427>
- Arifianto, A. R. (2018). *Islamic activism and state responses in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315102382>
- Aslanidis, P. (2017). Avoiding bias in the study of populism. *Political Studies*, 65(2), 266–278.
- Beaumont, J. (2019). Religion, politics and post-secular society. *Progress in Human Geography*, 43(6), 1062–1080.
- Bonikowski, B. (2019). Populism and nationalism in a comparative perspective. *Annual Review of Sociology*, 45, 1–22.
- Breskaya, O., Giordan, G., & Richardson, J. T. (2018). Human rights and religion: A sociological perspective. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 57(3), 419–431. <https://doi.org/10.1111/jssr.12544>
- Brubaker, R. (2020). Populism and nationalism. *Nations and Nationalism*, 26(1), 44–66. <https://doi.org/10.1111/nana.12522>

- Crossan, J. D. (2018). *The power of parable: How fiction by Jesus became fiction about Jesus*. HarperOne.
- De Cleen, B., Glynos, J., & Mondon, A. (2018). Critical research on populism. *Political Studies*, 66(3), 649–661.
- Djupe, P. A., & Neiheisel, J. R. (2022). The religious communication approach and political behavior. *Political Psychology*, 43(S1), 165–194. <https://doi.org/10.1111/pops.12848>
- Eatwell, R., & Goodwin, M. (2018). *National populism: The revolt against liberal democracy*. Penguin.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Flyvbjerg, B. (2021). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 27(1), 1–15.
- Gerschewski, J. (2013). The three pillars of stability: Legitimation, repression, and co-optation in autocratic regimes. *Democratization*, 20(1), 13–38. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.738860>
- Gidron, N., & Hall, P. A. (2020). Populism as a problem of social integration. *Comparative Political Studies*, 53(7), 1027–1059. <https://doi.org/10.1177/0010414019879947>
- Goodman, M. (2018). *A history of Judaism*. Princeton University Press.
- Habermas, J. (2021). Religion and the public sphere. *European Journal of Philosophy*, 29(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/ejop.12552>
- Heywood, A. (2021). *Politics* (5th ed.). Macmillan.
- Horsley, R. A. (2020). *Jesus and the politics of Roman Palestine*. University of South Carolina Press.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Jasper, J. M. (2018). *The emotions of protest*. University of Chicago Press.
- Joas, H. (2020). *The power of the sacred: An alternative to the narrative of disenchantment*. Oxford University Press.
- Judis, J. B. (2016). *The populist explosion*. Columbia Global Reports.
- Kellogg, S., Wolff, T., & Montagne, D. (2020). Computational social science and sociology. *Annual Review of Sociology*, 46, 61–81. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054621>
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. Verso.
- Le Bon, G. (2017). *The crowd: A study of the popular mind*. CreateSpace. (Original work published 1895)
- Leofreddi, A. (2023). Two models of political secularism and religious freedom. *Religions*, 14(10), 1292. <https://doi.org/10.3390/rel14101292>
- Moffitt, B. (2020). *Populism*. Polity Press.
- Mudde, C. (2017). Populism: An ideational approach. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198803560.013.1>
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001>
- Müller, J.-W. (2016). *What is populism?* University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812293784>
- Müller, J.-W. (2021). Democracy and populism revisited. *Government and Opposition*, 56(3), 1–10. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.10>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press.
- Pappas, T. S. (2019). Populism and liberal democracy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1200>
- Reicher, S. (2019). Mass psychology and collective behavior. *Annual Review of Psychology*, 70, 295–318.
- Rooduijn, M. (2019). State of the field: Populism. *Politics*, 39(3), 362–372.
- Smith, C. (2020). Religion and human flourishing. *Sociology of Religion*, 81(1), 1–20. <https://doi.org/10.1093/socrel/srz046>
- Stanley, B. (2018). Populism in political theory. *Journal of Political Ideologies*, 23(2), 1–15.
- Stoeckl, K. (2010). The impact of religion on political theory. *Sociology Compass*, 4(6), 354–364. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00284.x>
- Taggart, P. (2019). *Populism*. Open University Press.
- Urbinati, N. (2019). *Me the people: How populism transforms democracy*. Harvard University Press.
- Weyland, K. (2021). Populism as a political strategy. *Comparative Politics*, 53(2), 1–22.
- Widhyharto, D. S., Rahmawati, D., & Abheseka, N. M. R. (2021). Silent political apathy in urban society. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 171–186. <https://doi.org/10.22146/jsp.51724>



# Dekonstruksi Metodologis dalam Studi Agama: Analisis Epistemologis atas Perspektif Insider-Outsider dan Believer-Non Believer

Censsiya Olha Wongkar  
Telda Anita Toar  
Universitas Kristen Indonesia Tomohon  
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[censsiya16@gmail.com](mailto:censsiya16@gmail.com)

[teldaanitatoar@syriacorthodoxchurch.id](mailto:teldaanitatoar@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dekonstruksi metodologis dalam studi agama melalui pendekatan epistemologis terhadap perspektif insider-outsider dan believer-non believer. Fokus penelitian diarahkan pada persoalan objektivitas, legitimasi pengetahuan, dan posisi epistemik peneliti dalam produksi pengetahuan agama kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis epistemologis kritis terhadap berbagai literatur metodologi studi agama, fenomenologi agama, teori reflektivitas, dan kritik pengetahuan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis wacana dan interpretasi konseptual terhadap relasi antara pengalaman religius, subjektivitas peneliti, dan konstruksi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikotomi insider-outsider dan believer-non believer tidak bersifat biner secara mutlak, tetapi bergerak dalam spektrum epistemologis yang cair dan kontekstual. Penelitian ini menegaskan bahwa objektivitas akademik dalam studi agama merupakan konstruksi epistemologis yang dipengaruhi relasi kuasa, bahasa, dan legitimasi intelektual. Dengan demikian, pendekatan reflektif dan integratif menjadi penting dalam pengembangan metodologi studi agama yang lebih kritis, inklusif, dan multidimensional.

**Kata-kunci:** Believer-Non Believer, Dekonstruksi Metodologis, Epistemologi Agama, Insider-Outsider, Studi Agama

## Received:

March/23/2026

## Accepted:

April/25/2026

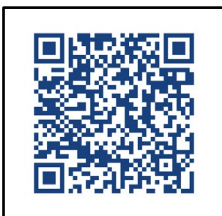
## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze methodological deconstruction in religious studies through an epistemological approach to the insider-outsider and believer-non believer perspectives. The focus of the research is directed toward issues of objectivity, knowledge legitimacy, and the epistemic position of researchers in the production of contemporary religious knowledge. The study employs a qualitative method using library research and critical epistemological analysis of various literatures on religious studies methodology, phenomenology of religion, reflexivity theory, and critiques of knowledge. Data analysis techniques were conducted through discourse analysis and conceptual interpretation of the relationship between religious experience, researcher subjectivity, and academic construction. The findings reveal that the insider-outsider and believer-non believer dichotomies are not absolutely binary, but instead move within a fluid and contextual epistemological spectrum. This study affirms that academic objectivity in religious studies is an epistemological construction influenced by power relations, language, and intellectual legitimacy. Therefore, reflective and integrative approaches become essential in developing religious studies methodologies that are more critical, inclusive, and multidimensional.*

**Keywords:** Believer-Non Believer, Insider-Outsider, Methodological Deconstruction, Religious Epistemology, Religious Studies.



## Pendahuluan

Kajian metodologis dalam studi agama mengalami perkembangan signifikan seiring pergeseran paradigma dari pendekatan teologis normatif menuju pendekatan akademik yang menekankan objektivitas ilmiah dan analisis empiris terhadap fenomena keagamaan (McCutcheon, 2021). Studi agama modern tidak lagi memosisikan agama semata sebagai sistem keyakinan metafisis, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan epistemologis yang dapat dianalisis melalui pendekatan multidisipliner (Cox, 2019). Dalam konteks akademik kontemporer, problem objektivitas menjadi isu sentral karena penelitian agama selalu berhadapan dengan posisi subjektif peneliti terhadap keyakinan yang diteliti (Chryssides & Gregg, 2019). Perdebatan mengenai relasi insider-outsider kemudian berkembang sebagai bagian dari kritik terhadap dominasi perspektif teologis dalam studi agama modern (Knott, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa studi agama kontemporer semakin diarahkan pada pengembangan metodologi yang mampu menjaga jarak kritis terhadap klaim kebenaran religius tanpa menghilangkan sensitivitas terhadap pengalaman keberagaman (Fitzgerald, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai metodologi studi agama telah berkembang melalui karya-karya penting seperti *The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion* karya Russell T. McCutcheon yang membahas relasi epistemologis antara peneliti dan objek agama (McCutcheon, 1999). Kajian fenomenologi agama juga diperkuat melalui karya *The Phenomenology of Religion* oleh James L. Cox yang menekankan pentingnya epoche dan bracketing dalam menjaga netralitas akademik (Cox, 2010). Selain itu, buku *Dimensions of the Sacred* karya Ninian Smart menjadi rujukan utama dalam pengembangan pendekatan multidimensional terhadap agama melalui analisis ritual, mitos, pengalaman, dan institusi religius (Smart, 1999). Perspektif metodologis mengenai insider-outsider juga diperluas dalam karya *The Location of Religion* oleh Kim Knott yang menjelaskan posisi sosial dan epistemologis peneliti dalam studi agama (Knott, 2005). Literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa studi agama modern telah bergerak menuju pendekatan reflektif yang menempatkan metodologi sebagai persoalan utama dalam produksi pengetahuan akademik tentang agama (Flood, 1999).

Dalam perspektif akademik, studi agama dipahami sebagai disiplin yang menuntut pemisahan antara komitmen iman pribadi dengan analisis ilmiah terhadap praktik keagamaan (Wiebe, 2018). Pendekatan fenomenologi dan hermeneutika kemudian digunakan untuk memahami pengalaman religius tanpa terjebak dalam penilaian teologis normatif (Segal, 2021). Studi-studi kontemporer juga menunjukkan bahwa objektivitas dalam penelitian agama tidak berarti bebas nilai secara absolut, tetapi melibatkan refleksivitas kritis terhadap posisi epistemologis peneliti (Taves, 2020). Selain itu, konsep emic dan etic menjadi instrumen penting dalam menjelaskan perbedaan antara perspektif internal penganut agama dan interpretasi akademik eksternal (Stausberg & Engler, 2021). Dengan demikian, studi agama modern semakin menekankan pentingnya transparansi metodologis dalam membangun validitas ilmiah penelitian keagamaan (Bender, 2022).

Perkembangan praktik akademik menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner semakin dominan dalam penelitian agama kontemporer, terutama melalui integrasi antropologi, sosiologi, fenomenologi, dan studi budaya (Altglas, 2021). Perguruan tinggi keagamaan di berbagai negara juga mulai mengembangkan kurikulum studi agama yang tidak lagi berorientasi pada apologetika, tetapi pada analisis kritis terhadap fenomena religius (Bocking, 2020). Di Indonesia, transformasi metodologis terlihat pada perkembangan studi agama di PTKIN yang mulai mengintegrasikan ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian keagamaan (Abdullah, 2020). Pendekatan metodologis modern juga diterapkan dalam penelitian lapangan melalui teknik triangulasi data, refleksivitas peneliti, dan mitigasi bias teologis (Creswell & Poth, 2018). Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktik studi

agama kontemporer semakin diarahkan pada standar metodologi akademik yang sistematis dan kritis (Lewis, 2021).

Secara umum, literatur akademik menyepakati bahwa problem insider-outsider merupakan isu metodologis fundamental dalam studi agama modern (Chidester, 2014). Konsensus akademik juga menunjukkan bahwa netralitas absolut sulit dicapai karena setiap peneliti membawa latar sosial, budaya, dan ideologis tertentu dalam proses penelitian (Hedges, 2021). Oleh sebab itu, pendekatan reflektivitas kritis dan agnostisisme metodologis dipandang sebagai strategi paling realistis dalam menjaga integritas ilmiah studi agama (Ryan, 2022). Selain itu, fenomenologi agama tetap dianggap relevan sebagai pendekatan yang memungkinkan peneliti memahami pengalaman religius tanpa terjebak dalam klaim teologis normatif (Waardenburg, 2017). Dengan demikian, studi agama kontemporer bergerak menuju paradigma metodologis yang menempatkan objektivitas, reflektivitas, dan kesadaran epistemologis sebagai fondasi utama penelitian akademik tentang agama (Arnal & McCutcheon, 2013).

Pemahaman mengenai dekonstruksi metodologis dalam studi agama masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek teoritis fenomenologi agama dibandingkan problem epistemologis relasi insider-outsider secara mendalam (Frisk & Nynäs, 2018). Kajian metodologi agama juga cenderung mengasumsikan objektivitas akademik sebagai posisi yang dapat dicapai tanpa mengkaji bias epistemik yang dibawa peneliti dalam proses interpretasi religius (Cotter, 2021). Selain itu, penelitian mengenai believer dan non-believer dalam studi agama lebih banyak dibahas sebagai identitas personal daripada sebagai variabel metodologis yang memengaruhi produksi pengetahuan ilmiah (Lee, 2015). Analisis terhadap relasi kuasa antara perspektif internal dan eksternal dalam penelitian agama juga masih jarang dikembangkan secara sistematis dalam kerangka epistemologi kritis (Nye, 2019). Akibatnya, pemahaman mengenai konstruksi objektivitas dalam studi agama masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara konseptual (Stausberg, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada pendekatan fenomenologis dibandingkan kritik metodologis terhadap posisi peneliti dalam studi agama (Cox, 2016). Sebagian besar studi masih menempatkan pengalaman religius sebagai pusat analisis tanpa menguji bagaimana posisi insider dapat menghasilkan bias interpretatif dalam penelitian akademik (McCutcheon, 2018). Di sisi lain, pendekatan outsider sering dipahami sebagai bentuk objektivitas mutlak tanpa mempertimbangkan konstruksi sosial pengetahuan akademik itu sendiri (Arweck & Stringer, 2020). Kajian metodologi agama juga lebih dominan membahas netralitas akademik dibandingkan mekanisme negosiasi identitas epistemologis antara peneliti dan objek penelitian (Jensen, 2022). Ketidakseimbangan ini menyebabkan diskursus metodologis dalam studi agama belum mampu menjelaskan relasi kompleks antara iman, pengetahuan, dan objektivitas ilmiah secara komprehensif (Hedges, 2021).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan perspektif fenomenologi, hermeneutika, dan analisis epistemologi kritis dalam satu kerangka metodologis yang utuh (Tuckett, 2020). Banyak penelitian hanya membahas insider-outsider sebagai dikotomi metodologis tanpa menghubungkannya dengan praktik produksi pengetahuan dalam institusi akademik modern (Fitzgerald, 2017). Selain itu, kajian mengenai believer-non believer masih terbatas pada konteks Barat dan belum banyak dikaitkan dengan dinamika studi agama di masyarakat multikultural dan postkolonial (Chidester, 2014). Penelitian yang ada juga jarang mengeksplorasi bagaimana relasi kuasa akademik memengaruhi legitimasi perspektif tertentu dalam studi agama (King, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian metodologi studi agama masih fragmentaris dan belum multidimensional (Bender, 2022).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa dekonstruksi metodologis

sebagai kritik terhadap klaim objektivitas dalam studi agama kontemporer (Schilbrack, 2017). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep reflektivitas epistemologis secara jelas dalam metodologi penelitian agama (Ryan, 2022). Hubungan antara posisi believer, identitas akademik, dan produksi kebenaran ilmiah juga belum dianalisis sebagai satu sistem epistemologis yang terpadu (William, 2021). Pendekatan yang tersedia masih terfragmentasi antara studi fenomenologi agama, sosiologi pengetahuan, dan teori kritis tanpa membangun model analisis integratif (Segal, 2021). Akibatnya, belum terdapat kerangka metodologis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana posisi epistemik peneliti memengaruhi konstruksi pengetahuan dalam studi agama (Wiebe, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis dekonstruksi metodologis dalam studi agama melalui pendekatan epistemologis kritis terhadap perspektif insider-outsider dan believer-non believer (Knott, 2023). Penelitian ini perlu mengintegrasikan fenomenologi agama, teori reflektivitas, dan kritik epistemologi dalam satu kerangka analisis metodologis yang sistematis (Engler & Gardiner, 2022). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana posisi epistemik peneliti membentuk validitas, objektivitas, dan legitimasi pengetahuan dalam studi agama kontemporer (Cotter & Robertson, 2016). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara identitas peneliti, praktik interpretasi, dan konstruksi pengetahuan akademik tentang agama (Stolow, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai problem epistemologis dalam metodologi studi agama secara lebih kritis dan multidimensional (Frisk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dekonstruksi metodologis dalam studi agama melalui kritik epistemologis terhadap perspektif insider-outsider dan believer-non believer sebagai posisi produksi pengetahuan akademik (Schilbrack, 2022). Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana identitas epistemik peneliti memengaruhi konstruksi objektivitas, validitas, dan interpretasi dalam penelitian agama kontemporer (Knibbe & Kupari, 2020). Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji relasi antara reflektivitas akademik dan otoritas interpretasi dalam tradisi studi agama modern (Moberg, 2021). Kajian ini juga bertujuan membangun pemahaman kritis mengenai batas antara keterlibatan personal dan klaim netralitas ilmiah dalam penelitian religius (Biello, 2018). Dengan demikian, penelitian ini memosisikan problem metodologis sebagai isu sentral dalam epistemologi studi agama kontemporer (Gorski, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain analisis epistemologis dan pendekatan dekonstruktif terhadap teks metodologi studi agama (Stolow, 2019). Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk membaca relasi antara bahasa akademik, posisi epistemik, dan produksi legitimasi ilmiah dalam studi agama (Wodak, 2021). Selain itu, pendekatan hermeneutika kritis digunakan untuk menelaah konstruksi makna terhadap kategori insider, outsider, believer, dan non-believer dalam literatur akademik (Thiselton, 2019). Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi konseptual terhadap karya-karya metodologis utama dalam religious studies modern (Fust, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dimensi ideologis dan reflektif yang sering tersembunyi dalam metodologi penelitian agama (Crapanzano, 2019).

Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada konstruksi epistemologis yang membentuk klaim objektivitas dalam studi agama (Gregg & Scholefield, 2015). Penelitian ini menelaah bagaimana perspektif insider-outsider digunakan sebagai mekanisme klasifikasi pengetahuan dalam tradisi akademik modern (Molina & Nicolescu, 2022). Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kategori believer dan non-believer memengaruhi legitimasi interpretasi terhadap fenomena religius (Lambert, 2020). Analisis juga difokuskan pada hubungan antara reflektivitas metodologis, otoritas akademik, dan produksi kebenaran ilmiah dalam studi agama (Lee, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya membahas posisi peneliti, tetapi juga struktur epistemologis yang membentuk praktik penelitian agama secara lebih luas (Nevle & Rush, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan studi agama kontemporer menunjukkan meningkatnya kritik terhadap klaim objektivitas positivistik dalam ilmu sosial dan humaniora (Hoondert, 2020). Di tengah berkembangnya pendekatan postkolonial dan teori kritis, problem insider-outsider menjadi semakin relevan dalam menentukan validitas penelitian religius (Chakrabarty, 2020). Selain itu, globalisasi akademik dan pluralisasi identitas religius memperlihatkan bahwa posisi epistemik peneliti tidak lagi dapat dipahami secara biner dan sederhana (Altglas, 2014). Kajian ini juga penting karena banyak penelitian agama masih mempertahankan dikotomi metodologis lama tanpa mengkritisi relasi kuasa yang melandasinya (McLennan, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memperkuat reflektivitas metodologis dan memperluas paradigma epistemologi dalam studi agama modern (Fiddian-Qasmiyeh, 2020).

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis epistemologis yang mengintegrasikan reflektivitas, dekonstruksi metodologis, dan kritik terhadap objektivitas dalam studi agama (Schlamecher, 2022). Penelitian ini menawarkan pendekatan yang melihat insider-outsider dan believer-non believer bukan sebagai kategori tetap, tetapi sebagai konstruksi diskursif dalam produksi pengetahuan akademik (Parker, 2021). Selain itu, studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan menjelaskan hubungan antara identitas peneliti, otoritas interpretasi, dan legitimasi ilmiah dalam religious studies kontemporer (Schnell, 2021). Penelitian ini juga memperluas diskursus metodologi studi agama dengan menghubungkan teori epistemologi kritis dan praktik penelitian empiris secara integratif (Hjelm, 2022). Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model dekonstruksi metodologis yang menempatkan perspektif insider-outsider dan believer-non believer sebagai arena negosiasi epistemik dalam produksi pengetahuan studi agama modern (Knott et al., 2022).

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis epistemologis dalam studi agama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami konstruksi makna, relasi pengetahuan, dan problem metodologis dalam perspektif insider-outsider serta believer-non believer secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dekonstruktif untuk membaca kembali asumsi-asumsi metodologis yang selama ini dianggap mapan dalam religious studies. Selain itu, penelitian memanfaatkan analisis wacana kritis untuk mengidentifikasi relasi antara bahasa akademik, kekuasaan epistemik, dan legitimasi pengetahuan dalam studi agama. Dengan demikian, desain penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis konseptual dan interpretatif terhadap dinamika epistemologi dalam metodologi studi agama kontemporer.

### Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi buku, artikel jurnal, dan karya akademik yang membahas metodologi studi agama, epistemologi, reflektivitas, serta perdebatan insider-outsider dan believer-non believer. Beberapa karya utama yang digunakan antara lain *The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion* karya Russell T. McCutcheon, *Discourse and Power* karya Teun A. van Dijk, *Critical Discourse Analysis* karya Norman Fairclough, serta berbagai artikel akademik terbaru mengenai epistemologi religious studies. Sumber sekunder terdiri atas jurnal internasional bereputasi, prosiding ilmiah, dan literatur pendukung yang relevan dengan kajian metodologi dan teori pengetahuan dalam studi agama. Seluruh

sumber data dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, dan keterkaitan dengan fokus penelitian mengenai dekonstruksi metodologis dalam studi agama.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci yang melakukan proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan lembar kategorisasi data untuk mengelompokkan konsep-konsep utama seperti insider, outsider, believer, non-believer, objektivitas, reflektivitas, dan otoritas epistemik. Selain itu, digunakan teknik coding konseptual untuk mengidentifikasi pola argumentasi, struktur wacana, dan relasi kuasa dalam teks akademik yang dianalisis. Penelitian ini juga menggunakan matriks analisis untuk membandingkan posisi epistemologis dalam berbagai pendekatan metodologi studi agama. Dengan demikian, instrumen penelitian diarahkan untuk membantu proses interpretasi secara sistematis dan konsisten terhadap data tekstual yang dikaji.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan dan seleksi literatur yang relevan dengan tema metodologi studi agama dan epistemologi religious studies. Tahap kedua dilakukan dengan membaca secara kritis teks-teks akademik untuk mengidentifikasi konsep utama, pola argumentasi, dan posisi epistemologis yang digunakan dalam perdebatan insider-outsider dan believer-non believer. Tahap ketiga menggunakan analisis wacana kritis untuk mengkaji bagaimana bahasa akademik membentuk legitimasi pengetahuan, klaim objektivitas, dan relasi kuasa dalam studi agama. Tahap terakhir adalah interpretasi dan dekonstruksi konsep-konsep metodologis guna menemukan bentuk relasi epistemik yang lebih reflektif dan integratif dalam penelitian agama kontemporer. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman kritis mengenai konstruksi metodologis dalam studi agama modernk.

## **Hasil Temuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan metodologis dalam studi agama tidak lagi hanya berkisar pada persoalan objektivitas ilmiah, tetapi telah berkembang menjadi persoalan epistemologis mengenai posisi subjek peneliti dalam produksi pengetahuan agama. Perspektif insider cenderung menempatkan pengalaman iman sebagai sumber validitas interpretasi, sedangkan perspektif outsider menekankan jarak analitis dan netralitas akademik sebagai dasar legitimasi ilmiah. Temuan ini memperlihatkan bahwa dikotomi believer dan non-believer membentuk batas epistemik yang memengaruhi cara agama dipahami, direpresentasikan, dan dijelaskan dalam studi akademik. Selain itu, penelitian menemukan bahwa kedua posisi tersebut sama-sama mengandung keterbatasan karena insider berpotensi terjebak dalam normativitas teologis, sementara outsider sering menghasilkan reduksi terhadap pengalaman religius. Dengan demikian, konstruksi metodologis dalam studi agama bersifat diskursif dan dipengaruhi oleh relasi antara pengalaman, otoritas pengetahuan, dan posisi akademik.

Analisis juga menunjukkan bahwa perspektif insider-outsider tidak bersifat biner secara mutlak, tetapi bergerak dalam spektrum epistemologis yang cair dan kontekstual. Dalam praktik penelitian, banyak akademisi menggabungkan keterlibatan personal dengan pendekatan analitis secara simultan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi peneliti dalam studi agama tidak dapat dipisahkan secara tegas antara subjek yang percaya dan subjek yang mengamati. Penelitian menemukan adanya kecenderungan berkembangnya pendekatan reflektivitas metodologis yang menempatkan kesadaran posisi peneliti sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan. Dengan demikian, validitas penelitian agama semakin bergantung pada transparansi epistemologis dibandingkan klaim objektivitas absolut.

Dalam dimensi epistemologis, penelitian menemukan bahwa perdebatan believer dan non-believer berkaitan erat dengan persoalan otoritas interpretasi dalam studi agama. Perspektif believer cenderung menilai pengalaman iman sebagai akses autentik terhadap makna religius, sedangkan pendekatan non-believer lebih menekankan analisis kritis terhadap struktur sosial, budaya, dan simbolik agama. Perbedaan ini menghasilkan konflik metodologis mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk menafsirkan praktik dan pengalaman keagamaan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pendekatan akademik modern sering mengutamakan paradigma sekuler sebagai standar universal dalam validasi pengetahuan agama. Dengan demikian, studi agama memperlihatkan adanya relasi kuasa epistemik antara tradisi keagamaan dan institusi akademik modern.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bahasa akademik dalam studi agama berfungsi sebagai instrumen legitimasi metodologis. Istilah seperti objektivitas, netralitas, subjektivitas, dan keterlibatan digunakan untuk membangun hierarki pengetahuan tertentu dalam komunitas akademik. Perspektif outsider sering diposisikan sebagai bentuk pengetahuan yang lebih ilmiah, sementara perspektif insider kerap diasosiasikan dengan bias normatif. Namun, temuan menunjukkan bahwa klaim netralitas akademik sendiri merupakan konstruksi epistemologis yang tidak sepenuhnya bebas nilai. Dengan demikian, metodologi studi agama tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan, bahasa, dan legitimasi intelektual.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa dikotomi insider-outsider dan believer-non believer perlu direkonstruksi melalui pendekatan epistemologis yang lebih reflektif dan integratif. Relasi antara pengalaman religius, posisi peneliti, dan metode analisis menunjukkan bahwa pengetahuan agama dibentuk melalui interaksi antara subjektivitas dan kerangka akademik. Temuan ini memperlihatkan bahwa studi agama tidak cukup dipahami sebagai upaya mencari objektivitas murni, tetapi sebagai proses negosiasi epistemik antara iman, pengalaman, dan analisis kritis. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa dekonstruksi metodologis diperlukan untuk menghindari dominasi satu paradigma epistemik dalam studi agama kontemporer. Dengan demikian, pendekatan refleksif dan dialogis menjadi penting dalam pengembangan metodologi studi agama yang lebih inklusif dan kritis.

Aspek Analisis	Perspektif Insider	Perspektif Outsider
Dasar Epistemologis	Pengalaman iman dan keterlibatan religius	Jarak analitis dan observasi ilmiah
Posisi Peneliti	Bagian dari komunitas agama	Pengamat eksternal
Sumber Validitas	Otoritas pengalaman spiritual	Metode akademik dan kritik ilmiah
Kelebihan	Pemahaman mendalam terhadap makna internal agama	Analisis kritis dan komparatif
Keterbatasan	Risiko bias normatif dan apologetik	Risiko reduksi pengalaman religius
Orientasi Analisis	Interpretatif dan partisipatif	Objektif dan deskriptif
Relasi dengan Agama	Keterlibatan personal	Distansi epistemologis

Tabel. Perbandingan Perspektif Insider dan Outsider dalam Studi Agama

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dekonstruksi metodologis dalam studi agama berkaitan erat dengan kritik terhadap klaim objektivitas akademik yang selama ini mendominasi produksi pengetahuan religius (Cotter, 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa objektivitas dalam studi

agama tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu dipengaruhi oleh posisi epistemik peneliti dalam memahami pengalaman religius (Frisk & Nynäs, 2018). Perspektif insider dan outsider terbukti membentuk kerangka interpretasi yang berbeda dalam menentukan validitas pengetahuan agama (Stausberg, 2021). Penelitian ini juga menemukan bahwa dikotomi believer dan non-believer menghasilkan batas epistemologis yang memengaruhi konstruksi metodologi penelitian agama kontemporer (Nye, 2019). Dengan demikian, metodologi studi agama memperlihatkan adanya relasi antara kuasa pengetahuan, pengalaman religius, dan legitimasi akademik (King, 2019).

Temuan ini menegaskan bahwa perspektif insider dan outsider tidak hanya merepresentasikan posisi metodologis, tetapi juga membentuk struktur legitimasi epistemologis dalam interpretasi agama (McCutcheon, 2018). Perspektif insider cenderung memberikan otoritas interpretatif pada pengalaman iman sebagai sumber autentik pemahaman religius (Lee, 2015). Sebaliknya, perspektif outsider menempatkan jarak analitis sebagai dasar legitimasi ilmiah dalam studi agama (Arweck & Stringer, 2020). Penelitian ini menemukan bahwa kedua posisi tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi bergerak dalam spektrum epistemologis yang cair dan kontekstual (Jensen, 2022). Dengan demikian, legitimasi metodologis dalam studi agama dibangun melalui negosiasi antara keterlibatan personal dan tuntutan objektivitas akademik (Hedges, 2021).

Secara epistemologis, temuan ini menunjukkan bahwa posisi peneliti dalam studi agama memengaruhi cara pengalaman religius dipahami, dikategorikan, dan dijelaskan dalam kerangka akademik (Schilbrack, 2017). Penelitian menemukan bahwa pengalaman iman tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga memengaruhi sudut pandang metodologis peneliti terhadap agama (Ryan, 2022). Posisi insider memungkinkan kedekatan interpretatif terhadap simbol dan praktik religius, namun juga berpotensi menghasilkan bias normatif (Wiebe, 2018). Sebaliknya, pendekatan outsider menghasilkan analisis kritis yang lebih distansial, tetapi sering mereduksi dimensi eksistensial pengalaman religius (Segal, 2021). Dengan demikian, konstruksi pengetahuan dalam studi agama selalu berkaitan dengan posisi epistemik dan kerangka interpretasi yang digunakan peneliti (William, 2021).

Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan agama dibangun melalui relasi antara subjektivitas peneliti, struktur akademik, dan praktik interpretasi yang bersifat diskursif (Fitzgerald, 2017). Penelitian menemukan bahwa bahasa akademik seperti “objektivitas” dan “netralitas” digunakan untuk membangun hierarki legitimasi dalam komunitas ilmiah (Cox, 2016). Perspektif outsider sering ditempatkan sebagai model pengetahuan yang dianggap lebih ilmiah dibandingkan pendekatan insider (Bender, 2022). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa klaim objektivitas akademik juga merupakan hasil konstruksi epistemologis yang dipengaruhi oleh paradigma sekuler modern (Tuckett, 2020). Dengan demikian, metodologi studi agama memperlihatkan adanya relasi kuasa dalam proses produksi dan validasi pengetahuan religius (Chidester, 2014).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan dikotomi insider-outsider secara normatif, studi ini menunjukkan bahwa kedua perspektif bergerak dalam spektrum epistemologis yang cair dan kontekstual (Frisk, 2023). Penelitian terdahulu umumnya menempatkan insider dan outsider sebagai posisi yang saling terpisah secara metodologis (Cotter & Robertson, 2016). Temuan penelitian ini justru menunjukkan adanya praktik reflektivitas metodologis yang menggabungkan keterlibatan personal dan analisis kritis secara simultan (Knott, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa posisi epistemik peneliti bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks penelitian agama (Engler & Gardiner, 2022). Dengan demikian, studi ini memperluas pemahaman metodologi agama dari model dikotomis menuju pendekatan epistemologis yang lebih reflektif dan integratif (Stolow, 2022).

Temuan ini juga melampaui pendekatan metodologis konvensional dengan mengintegrasikan

refleksivitas epistemologis, teori kuasa pengetahuan, dan kritik terhadap objektivitas akademik dalam studi agama (Cotter, 2021). Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas fenomenologi agama tanpa mengaitkannya dengan relasi kuasa epistemik dalam institusi akademik (Frisk & Nynäs, 2018). Studi ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan agama tidak dapat dipisahkan dari struktur legitimasi akademik yang menentukan validitas interpretasi religius (King, 2019). Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa posisi believer dan non-believer berfungsi sebagai kategori epistemologis yang memengaruhi produksi makna dalam studi agama (Stausberg, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memberikan model analisis yang lebih multidimensional dibandingkan pendekatan metodologis sebelumnya (Hedges, 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa studi agama perlu mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih reflektif terhadap posisi epistemik peneliti dalam proses produksi pengetahuan (Ryan, 2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi epistemologis lebih relevan dibandingkan klaim objektivitas absolut dalam penelitian agama (Jensen, 2022). Pendekatan reflektif memungkinkan peneliti mengidentifikasi bias interpretatif yang muncul dari keterlibatan personal maupun paradigma akademik tertentu (McCutcheon, 2018). Selain itu, refleksivitas metodologis dapat memperkuat validitas penelitian dengan membuka ruang dialog antara pengalaman religius dan analisis ilmiah (Arweck & Stringer, 2020). Dengan demikian, studi agama memerlukan metodologi yang mampu mengintegrasikan subjektivitas, kritik, dan kesadaran epistemik secara seimbang (Schilbrack, 2017).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa klaim netralitas akademik dalam studi agama perlu dipahami sebagai konstruksi epistemologis yang berkaitan dengan relasi kuasa dan legitimasi intelektual (Fitzgerald, 2017). Penelitian menemukan bahwa paradigma sekuler modern sering menjadi standar dominan dalam menentukan validitas pengetahuan agama (Bender, 2022). Kondisi ini menyebabkan perspektif insider kerap diposisikan sebagai bentuk pengetahuan yang kurang ilmiah dalam komunitas akademik (Wiebe, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan agama selalu berkaitan dengan mekanisme legitimasi simbolik dalam institusi akademik (Segal, 2021). Dengan demikian, metodologi studi agama perlu dikembangkan secara lebih dialogis agar tidak didominasi oleh satu paradigma epistemik tertentu (William, 2021).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis epistemologis mengenai relasi insider-outsider dan believer-non believer dalam metodologi studi agama kontemporer (Knott, 2023). Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji bagaimana posisi epistemik peneliti memengaruhi produksi dan legitimasi pengetahuan religius secara sistematis (Cotter & Robertson, 2016). Studi ini menunjukkan bahwa problem metodologis dalam studi agama tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa epistemik dalam institusi akademik modern (Frisk, 2023). Selain itu, penelitian ini mengembangkan pembacaan kritis terhadap konsep objektivitas akademik dalam studi agama kontemporer (Stolow, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan metodologi studi agama dari pendekatan deskriptif menuju kritik epistemologis yang lebih mendalam (Engler & Gardiner, 2022).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara identitas peneliti, refleksivitas metodologis, dan konstruksi pengetahuan agama secara lebih integratif dan kritis (Hedges, 2021). Kerangka ini menempatkan subjektivitas peneliti sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan, bukan sebagai unsur yang harus sepenuhnya dihilangkan (Nye, 2019). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa validitas penelitian agama bergantung pada kemampuan peneliti menjelaskan posisi epistemiknya secara terbuka dan reflektif (Lee, 2015). Pendekatan tersebut memungkinkan terbentuknya model metodologis yang lebih inklusif terhadap keragaman perspektif dalam studi agama (Chidester, 2014). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan metodologi studi agama yang lebih kritis, reflektif, dan multidimensional (Tuckett, 2020).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dekonstruksi metodologis dalam studi agama berkaitan erat dengan problem epistemologis mengenai posisi peneliti, terutama dalam relasi insider-outsider dan believer-non believer. Perspektif insider dan outsider tidak dapat dipahami sebagai dikotomi metodologis yang bersifat mutlak, karena keduanya bergerak dalam spektrum epistemik yang cair, kontekstual, dan saling berinteraksi dalam proses produksi pengetahuan agama. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa klaim objektivitas akademik dalam studi agama tidak sepenuhnya netral, tetapi dibentuk oleh relasi kuasa, bahasa akademik, dan legitimasi epistemologis dalam institusi ilmiah. Dengan demikian, pengetahuan agama tidak lahir dari posisi yang bebas nilai, melainkan melalui negosiasi antara pengalaman religius, refleksivitas peneliti, dan kerangka interpretasi akademik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan refleksivitas epistemologis dalam metodologi studi agama kontemporer agar penelitian tidak terjebak pada dominasi satu paradigma pengetahuan tertentu. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong pengembangan metodologi studi agama yang lebih dialogis, integratif, dan kritis terhadap konstruksi objektivitas ilmiah. Pendekatan tersebut penting untuk menciptakan ruang akademik yang mampu mengakomodasi pengalaman religius tanpa mengabaikan analisis kritis ilmiah. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan model metodologis baru yang menempatkan posisi peneliti sebagai bagian dari proses analisis, bukan sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah dari objek penelitian. Dengan demikian, dekonstruksi metodologis dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi agama yang lebih inklusif, reflektif, dan multidimensional.

## Referensi

- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Altglas, V. (2014). *From yoga to kabbalah: Religious exoticism and the logics of bricolage*. Oxford University Press.
- Altglas, V. (2021). *Religion and the critique of rationality*. Oxford University Press.
- Arnal, W., & McCutcheon, R. T. (2013). *The sacred is the profane: The political nature of "religion"*. Oxford University Press.
- Arweck, E., & Stringer, M. D. (2020). *The insider/outsider problem in the study of ritual*. Routledge.
- Arweck, E., & Stringer, M. D. (2020). *Theorizing faith and objectivity in religious studies*. Routledge.
- Bender, C. (2022). *Religion on the edge: De-centering and re-centering the sociology of religion*. Oxford University Press.
- Bender, C. (2022). *The new metaphysicals: Spirituality and the American religious imagination*. University of Chicago Press.
- Bielo, J. S. (2018). *Anthropology of religion: The basics*. Routledge.
- Bocking, B. (2020). Religious studies as an academic discipline. *Religion*, 50(3), 421–437.
- Chakrabarty, D. (2020). *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Chidester, D. (2014). *Empire of religion: Imperialism and comparative religion*. University of Chicago Press.
- Chryssides, G. D., & Gregg, S. E. (2019). *The insider/outsider debate in the study of religion*. Equinox Publishing.
- Cotter, C. R. (2021). Critical reflections on insider and outsider categories in religious studies. *Method & Theory in the Study of Religion*, 33(2), 115–132.
- Cotter, C. R. (2021). Critical reflexivity and the problem of objectivity in the study of religion. *Method & Theory in the Study of Religion*, 33(4–5), 389–406. <https://doi.org/10.1163/15700682-12341509>
- Cotter, C. R., & Robertson, D. G. (2016). *After world religions: Reconstructing religious studies*. Routledge.
- Cox, J. L. (2010). *An introduction to the phenomenology of religion*. Continuum.
- Cox, J. L. (2016). *Critical reflections on indigenous religions*. Routledge.
- Cox, J. L. (2016). *From primitive to indigenous: The academic study of indigenous religions*. Routledge.
- Cox, J. L. (2019). Religion studies and methodology. *Method & Theory in the Study of Religion*, 31(2), 103–118. <https://doi.org/10.1163/15700682-12341437>

- Crapanzano, V. (2019). Hermeneutics and the interpretive process in anthropology and religious studies. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 9(1), 230–244. <https://doi.org/10.1086/702603>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Engler, S., & Gardiner, M. Q. (2022). Reflexivity and epistemic positioning in religious studies. *Religion*, 52(3), 455–472.
- Engler, S., & Gardiner, M. Q. (2022). *Transformations and critiques in the study of religion*. De Gruyter.
- Fiddian-Qasmieh, E. (2020). Decolonising religion and knowledge production. *Religion*, 50(3), 381–399.
- Fitzgerald, T. (2017). *Religion and the secular: Historical and colonial formations*. Routledge.
- Fitzgerald, T. (2020). *Religion and politics in international relations: The modern myth*. Bloomsbury Academic.
- Flood, G. (1999). *Beyond phenomenology: Rethinking the study of religion*. Cassell.
- Frisk, L. (2023). Reflexive methodologies in the contemporary study of religion. *Temenos*, 59(1), 77–95.
- Frisk, L. (2023). Reflexivity and epistemology in contemporary religious studies. *Religion*, 53(1), 44–61.
- Frisk, L., & Nynäs, P. (2018). Characteristics of contemporary religious studies. *Approaching Religion*, 8(1), 4–15. <https://doi.org/10.30664/ar.66731>
- Frisk, L., & Nynäs, P. (2018). Characteristics of contemporary religious studies methodology. *Temenos*, 54(2), 179–198.
- Fuist, T. N. (2021). Reflexive methodologies in the sociology of religion. *Sociology of Religion*, 82(4), 453–470. <https://doi.org/10.1093/socrel/srab028>
- Gorski, P. S. (2023). Critical realism and religious studies methodology. *Journal of the American Academy of Religion*, 91(1), 88–109. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfad004>
- Gregg, S., & Scholefield, A. (2015). *Engaging with living religion: A guide to fieldwork in the study of religion*. Routledge.
- Hedges, P. (2021). *Understanding religion: Theories and methods for studying religion*. University of California Press.
- Hedges, P. (2021). *Understanding religion: Theories and methods for studying religiosity*. University of California Press.
- Hjelm, T. (2022). *Theoretical and methodological perspectives in the study of religion*. Brill.
- Hoondert, M. (2020). Reflexivity and positionality in religious studies research. *Religions*, 11(8), 394. <https://doi.org/10.3390/rel11080394>
- Jensen, T. (2022). Negotiating insider and outsider perspectives in religious studies. *Method & Theory in the Study of Religion*, 34(2), 155–173. <https://doi.org/10.1163/15700682-bja10048>
- Jensen, T. (2022). Religious studies and epistemological reflexivity. *Journal of the American Academy of Religion*, 90(3), 745–762. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfac041>
- King, R. (2019). *Orientalism and religion: Postcolonial theory, India and “the mystic East”*. Routledge.
- Knibbe, K., & Kupari, H. (2020). Theorizing lived religion: Introduction. *Journal of Contemporary Religion*, 35(2), 157–176.
- Knott, K. (2005). *The location of religion: A spatial analysis*. Equinox Publishing.
- Knott, K. (2016). Insider/outsider perspectives. *Temenos*, 52(2), 279–302. <https://doi.org/10.33356/temenos.60325>
- Knott, K. (2023). *The insider/outsider problem in the study of religion: Critical reflections*. Routledge.
- Knott, K. (2023). Methodological reflexivity and insider-outsider dynamics in religious studies. *Religion Compass*, 17(2), 1–13. <https://doi.org/10.1111/rec3.12492>
- Knott, K., Poole, E., & Taira, T. (2022). *Media discourses and public understanding of religion*. Routledge.
- Lambert, Y. (2020). Belief, unbelief, and methodological neutrality in religious studies. *Social Compass*, 67(3), 317–331.
- Lee, L. (2015). *Recognizing the non-religious: Reimagining the secular*. Oxford University Press.
- Lee, L. (2015). Researching non-religion and secularity. *Religion*, 45(3), 466–472.
- Lee, L. (2021). Nonreligion and the politics of knowledge production. *Secularism and Nonreligion*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.5334/snr.136>
- Lewis, J. R. (2021). Methodological challenges in contemporary religious studies. *Journal of Contemporary Religion*, 36(2), 215–229.
- McCutcheon, R. T. (1999). *The insider/outsider problem in the study of religion*. Cassell.
- McCutcheon, R. T. (2018). *Critics not caretakers: Redescribing the public study of religion*. SUNY Press.
- McCutcheon, R. T. (2018). *Manufacturing religion: The discourse on sui generis religion and the politics of nostalgia*. Oxford University Press.
- McLennan, G. (2022). Religion, modernity, and methodological critique. *Theory, Culture & Society*, 39(4), 115–133. <https://doi.org/10.1177/02632764211049736>

- Moberg, M. (2021). Reflexivity and authority in the study of religion. *Religion*, 51(4), 623–641. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2021.1882608>
- Molina, N., & Nicolescu, B. (2022). Epistemic boundaries in contemporary religious studies. *Open Theology*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.1515/opth-2022-0187>
- Nevle, R., & Rush, O. (2023). Objectivity and interpretation in the humanities. *Humanities*, 12(2), 39. <https://doi.org/10.3390/h12020039>
- Nye, M. (2019). *Religion: The basics* (2nd ed.). Routledge.
- Nye, M. (2019). *Religion: The basics* (3rd ed.). Routledge.
- Parker, S. G. (2021). Constructing insider and outsider categories in religious studies. *Method & Theory in the Study of Religion*, 33(4–5), 402–420. <https://doi.org/10.1163/15700682-bja10048>
- Ryan, J. (2022). Reflexive epistemology in the academic study of religion. *Religions*, 13(8), 711. <https://doi.org/10.3390/rel13080711>
- Ryan, M. (2022). Reflexivity and objectivity in religious studies research. *Religion Compass*, 16(4), 1–12. <https://doi.org/10.1111/rec3.12455>
- Schilbrack, K. (2017). *Philosophy and the study of religions: A manifesto*. Wiley-Blackwell.
- Schilbrack, K. (2022). *The future of the philosophy of religion*. Oxford University Press.
- Schlamelcher, J. (2022). Epistemology and critical methodology in the study of religion. *Religions*, 13(7), 611. <https://doi.org/10.3390/rel13070611>
- Schnell, T. (2021). Meaning-making and epistemic authority in religion research. *Archive for the Psychology of Religion*, 43(2), 117–134. <https://doi.org/10.1177/00846724211008713>
- Segal, R. A. (2021). *Myth and methodology in the study of religion*. Routledge.
- Segal, R. A. (2021). *Myth and phenomenology in religious studies*. Routledge.
- Smart, N. (1999). *Dimensions of the sacred: An anatomy of the world's beliefs*. University of California Press.
- Stausberg, M. (2021). *The study of religion(s) in Western Europe III*. Brill.
- Stausberg, M., & Engler, S. (2021). *The Routledge handbook of research methods in the study of religion* (2nd ed.). Routledge.
- Stolow, J. (2019). Religion, media, and the limits of representation. *Critical Research on Religion*, 7(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/2050303218822957>
- Stolow, J. (2022). Religion, knowledge, and epistemic authority. *Religion*, 52(4), 589–606. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2022.2105538>
- Stolow, J. (2022). Religion, mediation, and epistemic authority. *Culture and Religion*, 23(4), 321–338. <https://doi.org/10.1080/14755610.2022.2113349>
- Taves, A. (2020). Objectivity and experience in the academic study of religion. *Religion*, 50(4), 601–615. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1792050>
- Thiselton, A. C. (2019). *Hermeneutics: An introduction*. Eerdmans.
- Tuckett, J. (2020). Hermeneutics and epistemology in contemporary religious studies. *Method & Theory in the Study of Religion*, 32(5), 437–454. <https://doi.org/10.1163/15700682-12341474>
- Tuckett, J. (2020). Phenomenology and epistemology in religious studies. *Religious Studies Review*, 46(3), 233–241. <https://doi.org/10.1111/rsr.14631>
- Waardenburg, J. (2017). *Classical approaches to the study of religion*. De Gruyter.
- Wiebe, D. (2018). *Religious studies: A skeptical introduction*. Brill.
- Wiebe, D. (2018). *The politics of religious studies*. Palgrave Macmillan.
- William, J. P. (2021). Academic identity and religious knowledge production. *Social Compass*, 68(3), 389–404.
- William, J. P. (2021). Religion and epistemic authority in modern academia. *Social Compass*, 68(2), 177–191.
- Wodak, R. (2021). *The politics of fear: The shameless normalization of far-right discourse* (2nd ed.). SAGE.



# Pelestarian Lingkungan dalam Kebijakan Ekstraktif di Taman Nasional Yasuni (2013–2023): Studi Kualitatif Berbasis Analisis Dokumen

Angela del Carmen Akijuwen  
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

## Email

[del\\_carmen@syriacorthodoxchurch.id](mailto:del_carmen@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelestarian lingkungan dalam kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuni, Ekuador, selama periode 2013–2023. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana kebijakan negara yang berbasis eksploitasi minyak memengaruhi keberlanjutan ekologis dan sosial di kawasan dengan biodiversitas tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen, yang bersumber dari jurnal akademik, laporan kebijakan, serta publikasi organisasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan berada dalam tekanan struktural akibat dominasi kebijakan ekstraktif dan ketergantungan ekonomi terhadap minyak. Kawasan Yasuni yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi menghadapi ancaman serius dari eksploitasi sumber daya dan pembangunan infrastruktur terkait (Bass et al., 2010). Selain itu, konflik sosial dan tekanan terhadap masyarakat adat memperkuat kompleksitas masalah lingkungan (Finer et al., 2009). Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan memerlukan perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif.

**Kata-kunci:** Ekstraktif, Kebijakan, Pelestarian Lingkungan, Taman Nasional Yasuni, Yasuni

## Received:

March/30/2026

## Accepted:

April/29/2026

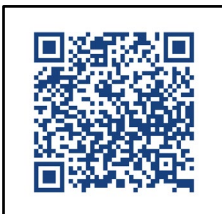
## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze environmental conservation within extractive policies in Yasuni National Park, Ecuador, during the 2013–2023 period. The main focus of the research is to understand how state policies based on oil exploitation affect ecological and social sustainability in an area with high biodiversity. The study employs a qualitative approach using case studies and document analysis, drawing from academic journals, policy reports, and publications from related organizations. The findings indicate that environmental conservation is under structural pressure due to the dominance of extractive policies and economic dependence on oil. The Yasuni area, which possesses high biodiversity, faces serious threats from resource exploitation and related infrastructure development (Bass et al., 2010). In addition, social conflicts and pressure on indigenous communities further intensify environmental problems (Finer et al., 2009). This study emphasizes that environmental conservation requires more sustainable and participatory policy changes.*

**Keywords:** Extractive, Environmental Conservation, Policy, Yasuni, Yasuni National Park.



## Pendahuluan

Eksplorasi sumber daya alam di kawasan konservasi menjadi isu penting dalam studi lingkungan global karena sering menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Sovacool & Scarpaci, 2016). Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif sebagai sumber utama pendapatan negara (Gidron & Hall, 2020). Dalam konteks tersebut, kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi seperti hutan hujan tropis menjadi rentan terhadap tekanan eksploitasi (Bass et al., 2010). Selain itu, aktivitas ekstraktif sering dikaitkan dengan dampak ekologis seperti deforestasi, degradasi habitat, dan hilangnya biodiversitas (Finer et al., 2009). Oleh karena itu, konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi karakteristik utama dalam pengelolaan sumber daya alam di era modern (Brubaker, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa eksploitasi minyak di kawasan konservasi memiliki implikasi yang luas, baik secara ekologis maupun sosial (Kimerling, 2013). Studi mengenai Yasuni menegaskan bahwa kebijakan ekstraktif sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat (Larrea & Warnars, 2009). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa inisiatif seperti Yasuni-ITT merupakan upaya inovatif dalam mengintegrasikan pembangunan dan konservasi (Espinosa, 2013). Namun, kegagalan implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam dukungan internasional dan komitmen politik domestik (Martin & Scholz, 2014). Literatur juga menekankan bahwa konflik lingkungan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga terkait dengan dinamika kekuasaan dan kebijakan negara (Bonikowski, 2019).

Dalam perspektif akademik, Green Theory menempatkan lingkungan sebagai elemen sentral dalam analisis hubungan internasional dan kebijakan publik (Eckersley, 2007). Pendekatan ini menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan struktur ekonomi global (Mudde & Kaltwasser, 2017). Selain itu, konsep modernisasi refleksif menjelaskan bahwa risiko lingkungan merupakan konsekuensi dari proses pembangunan itu sendiri (Inglehart & Norris, 2019). Studi lain juga menunjukkan bahwa keadilan lingkungan menjadi aspek penting dalam menilai dampak kebijakan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat (Breskaya et al., 2018). Dengan demikian, pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami kompleksitas konflik lingkungan secara komprehensif (Leofreddi, 2023).

Dalam praktik kebijakan, berbagai negara telah mencoba mengembangkan pendekatan alternatif untuk menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian lingkungan (UNDP, 2012). Inisiatif Yasuni-ITT di Ekuador menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan inovatif yang menggabungkan konservasi dan kompensasi internasional (Espinosa, 2013). Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan dan perbedaan kepentingan antar aktor (Rival, 2010). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tekanan masyarakat sipil dan komunitas global semakin memengaruhi arah kebijakan lingkungan (Rights of Nature Tribunal, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik kebijakan lingkungan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan (Weyland, 2021).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa konflik antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional (Stanley, 2018). Terdapat konsensus bahwa ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan negara (Norris & Inglehart, 2019). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan nasional dan dukungan internasional (Pappas, 2019). Literatur juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan perlindungan hak komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan (Smith,

2020). Dengan demikian, pelestarian lingkungan dipahami sebagai isu yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi secara simultan (Rooduijn, 2019).

Meskipun studi mengenai konflik lingkungan dan eksploitasi minyak di kawasan konservasi telah berkembang, masih terdapat keterbatasan dalam memahami secara spesifik bagaimana pelestarian lingkungan diposisikan dalam kebijakan ekstraktif negara (Arsel & Pellegrini, 2024). Banyak penelitian lebih menyoroti konflik secara umum tanpa menguraikan mekanisme kebijakan yang secara langsung memengaruhi konservasi (Lessmann et al., 2016). Selain itu, hubungan antara kebijakan negara dan keberlanjutan ekologis sering dianalisis secara parsial (Pérez Rincón et al., 2019). Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika pelestarian lingkungan dalam konteks kebijakan ekstraktif (Dayot, 2023). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk memperdalam analisis yang lebih terintegrasi antara kebijakan dan lingkungan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menekankan pada dampak ekologis dibandingkan analisis kebijakan (Sovacool & Scarpaci, 2016). Sebagian besar studi menyoroti deforestasi dan kerusakan biodiversitas tanpa mengkaji secara mendalam peran aktor politik dalam proses tersebut (Kimerling, 2013). Selain itu, penelitian sering berfokus pada perspektif global tanpa memperhatikan dinamika lokal di tingkat komunitas (Larrea & Warnars, 2009). Akibatnya, interaksi antara kebijakan negara dan masyarakat adat kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Villasante et al., 2025). Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan multidimensional.

Dari segi cakupan, penelitian mengenai Yasuní masih terbatas pada periode tertentu dan belum banyak mengkaji perkembangan terbaru, khususnya pasca referendum 2023 (Arsel & Pellegrini, 2024). Banyak studi berfokus pada periode awal Inisiatif Yasuní-ITT tanpa memperhatikan dinamika kebijakan setelah kegagalannya (Martin & Scholz, 2014). Selain itu, kajian yang menghubungkan perubahan kebijakan dengan implikasi jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan masih terbatas (Lessmann et al., 2016). Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang evolusi kebijakan dalam jangka panjang (Pérez Rincón et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mencakup periode yang lebih luas dan terkini.

Kekosongan analisis juga terlihat pada kurangnya perhatian terhadap variabel kebijakan sebagai faktor utama dalam pelestarian lingkungan (Dayot, 2023). Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek ekologis dan sosial tanpa mengintegrasikan analisis kebijakan secara sistematis (Arsel & Pellegrini, 2024). Selain itu, variabel seperti peran negara, aktor non-negara, dan dinamika kekuasaan belum dianalisis secara mendalam dalam satu kerangka yang utuh (Pérez Rincón et al., 2019). Hal ini mengakibatkan pemahaman yang terfragmentasi terhadap konflik lingkungan (Lessmann et al., 2016). Kekosongan ini membuka ruang untuk pendekatan analitis yang lebih komprehensif.

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan penelitian baru yang secara khusus menganalisis pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan ekstraktif (Dayot, 2023). Penelitian ini perlu mengintegrasikan analisis kebijakan, dinamika sosial, dan dampak ekologis dalam satu kerangka konseptual (Arsel & Pellegrini, 2024). Selain itu, penting untuk memasukkan perspektif masyarakat lokal dan aktor non-negara dalam analisis (Villasante et al., 2025). Kajian ini juga perlu memperhatikan perkembangan terbaru kebijakan lingkungan di Ekuador (Lessmann et al., 2016). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam studi pelestarian lingkungan dan kebijakan ekstraktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelestarian lingkungan dalam konteks kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuní secara lebih komprehensif. Fokus utama diarahkan pada

bagaimana kebijakan negara memengaruhi keberlanjutan ekologis dan sosial di kawasan tersebut (Arsel & Pellegrini, 2024). Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara kepentingan ekonomi dan praktik konservasi lingkungan dalam konteks negara berkembang (Lessmann et al., 2016). Tujuan ini dirancang untuk menjawab keterbatasan studi sebelumnya yang belum mengintegrasikan analisis kebijakan secara mendalam (Dayot, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis terhadap dinamika pelestarian lingkungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen. Metode ini dipilih karena mampu menggali makna kebijakan dan dinamika sosial secara mendalam (Flyvbjerg, 2021). Analisis dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan (Fairclough, 2013). Pendekatan ini juga memungkinkan interpretasi terhadap relasi kekuasaan dan struktur kebijakan yang memengaruhi lingkungan (Joas, 2020). Dengan demikian, metode ini sesuai untuk menjawab kompleksitas isu yang diteliti.

Fokus analisis penelitian ini terletak pada hubungan antara kebijakan ekstraktif dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan negara membentuk praktik eksploitasi dan dampaknya terhadap ekosistem (Pérez Rincón et al., 2019). Selain itu, analisis juga mencakup peran aktor seperti pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan (Villasante et al., 2025). Fokus ini memungkinkan identifikasi pola konflik dan dinamika kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam (Gidron & Hall, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih terarah dan mendalam.

Penelitian ini penting karena memberikan perspektif baru dalam memahami konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Isu ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam di kawasan biodiversitas tinggi (Brubaker, 2020). Selain itu, penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan dapat memperkuat atau justru melemahkan upaya konservasi (Bonikowski, 2019). Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan (Norris & Inglehart, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan kebijakan, lingkungan, dan dinamika sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian tentang pelestarian lingkungan dalam konteks ekstraktivisme (Leofreddi, 2023). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan (Pappas, 2019). Kajian ini juga memberikan kontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam studi lingkungan (Stanley, 2018). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelestarian lingkungan dalam kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuni, Ekuador, selama periode 2013–2023. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan, konflik lingkungan, dan relasi antara aktor yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Taman Nasional Yasuni dipilih sebagai kasus karena merepresentasikan konflik antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dalam konteks negara berkembang yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari jurnal akademik bereputasi, buku ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi organisasi lingkungan yang relevan dengan isu Yasuní. Data tersebut digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan, dinamika konflik, dampak ekologis dan sosial, serta respons aktor yang terlibat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan untuk memastikan validitas data penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola kebijakan, hubungan antar variabel, serta implikasi kebijakan terhadap pelestarian lingkungan. Analisis ini juga menggunakan kerangka Green Theory untuk memahami hubungan antara negara, masyarakat, dan lingkungan dalam konteks kebijakan ekstraktif.

Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pelestarian lingkungan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial dalam konteks eksploitasi sumber daya alam di Taman Nasional Yasuní.

## Hasil Temuan

Aspek Analisis	Temuan Utama	Dampak terhadap Pelestarian Lingkungan	Implikasi
Ketergantungan Ekonomi	Ekuador bergantung pada minyak sebagai sumber utama pendapatan negara	Kebijakan cenderung mengutamakan eksploitasi dibanding konservasi	Pelestarian lingkungan menjadi prioritas sekunder
Kebijakan Negara	Pembatalan Inisiatif Yasuní-ITT (2013) dan normalisasi eksploitasi	Terjadi peningkatan aktivitas ekstraktif di kawasan konservasi	Terjadi kontradiksi antara kebijakan lingkungan dan ekonomi
Dampak Ekologis	Deforestasi, fragmentasi habitat, dan ancaman terhadap biodiversitas tinggi	Penurunan kualitas ekosistem dan risiko kerusakan jangka panjang	Kebutuhan perlindungan lingkungan semakin mendesak
Dampak Sosial	Tekanan terhadap masyarakat adat dan perubahan ruang hidup	Terjadi konflik sosial dan ketidakadilan lingkungan	Perlunya perlindungan hak masyarakat adat
Aktor dan Respons	Masyarakat adat, LSM, dan komunitas internasional melakukan resistensi	Meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah	Isu lingkungan menjadi agenda publik dan global
Resolusi Konflik	Referendum nasional 2023 menghentikan eksploitasi di Blok ITT	Meningkatkan legitimasi pelestarian lingkungan	Menjadi titik balik kebijakan berbasis partisipasi publik
Tantangan Implementasi	Ketergantungan ekonomi dan keterbatasan institusi	Implementasi kebijakan belum optimal	Diperlukan strategi pembangunan non-ekstraktif

Tabel. Analisis Pelestarian Lingkungan dalam Kebijakan Ekstraktif di Taman Nasional Yasuní (2013-2023)

Penelitian ini menemukan bahwa pelestarian lingkungan di Taman Nasional Yasuní berada dalam tekanan struktural yang kuat akibat ketergantungan ekonomi Ekuador terhadap sektor minyak. Data menunjukkan bahwa sejak pembatalan Inisiatif Yasuní-ITT pada tahun 2013, kebijakan negara cenderung kembali pada pendekatan ekstraktif yang memprioritaskan stabilitas fiskal dibanding perlindungan lingkungan. Kondisi ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai agenda yang

bersifat sekunder dalam praktik kebijakan publik.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa konflik lingkungan di Yasuní bersifat multidimensional, mencakup aspek ekologis, sosial, dan politik. Aktivitas eksploitasi minyak terbukti memicu deforestasi, fragmentasi habitat, serta peningkatan tekanan terhadap keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di kawasan tersebut. Di sisi lain, masyarakat adat mengalami tekanan terhadap ruang hidup, sistem sosial, dan keberlanjutan budaya akibat ekspansi industri ekstraktif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan negara tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan lingkungan, khususnya dalam perlindungan hak masyarakat adat. Proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down dan belum secara optimal menerapkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Hal ini memperkuat ketimpangan antara kepentingan negara dan kebutuhan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, respons terhadap eksploitasi minyak menunjukkan adanya mobilisasi aktor yang luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan komunitas global memainkan peran penting dalam membingkai isu Yasuní sebagai persoalan keadilan lingkungan dan tanggung jawab global. Tekanan ini berkontribusi pada meningkatnya kesadaran publik dan legitimasi gerakan lingkungan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa referendum nasional tahun 2023 menjadi titik balik dalam dinamika pelestarian lingkungan di Yasuní. Keputusan mayoritas publik untuk menghentikan eksploitasi minyak di Blok ITT menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hasil referendum masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait ketergantungan ekonomi terhadap minyak, keterbatasan alternatif pembangunan, dan kapasitas institusional negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan di Yasuní tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga oleh struktur ekonomi, dinamika politik, dan relasi kekuasaan. Konflik yang terjadi mencerminkan ketegangan antara logika pembangunan berbasis ekstraksi dan kebutuhan keberlanjutan lingkungan, yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya terselesaikan.

## Pembahasan

Temuan utama menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan di Taman Nasional Yasuní berada di bawah tekanan struktural akibat dominasi kebijakan ekstraktif yang dipengaruhi ketergantungan ekonomi terhadap minyak (Arsel & Pellegrini, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya imperatif ekstraktif dalam kebijakan negara yang sulit dihindari dalam konteks ekonomi berbasis sumber daya (Laastad, 2023). Tekanan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak berdiri independen, tetapi terikat pada struktur ekonomi nasional (Pérez Rincón et al., 2019). Hal ini memperkuat argumen bahwa eksploitasi sumber daya menjadi strategi utama dalam pembangunan negara berkembang (Lessmann et al., 2016). Dengan demikian, pelestarian lingkungan menghadapi keterbatasan struktural dalam implementasinya (Brubaker, 2020).

Kondisi ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara, melainkan berada pada posisi subordinat terhadap kepentingan ekonomi (Bonikowski, 2019). Kebijakan negara cenderung menempatkan stabilitas fiskal sebagai tujuan utama dibanding perlindungan ekologis (Gidron & Hall, 2020). Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Norris & Inglehart, 2019). Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan sering diposisikan sebagai agenda sekunder (Pappas, 2019). Kondisi tersebut

memperlihatkan ketimpangan prioritas dalam kebijakan publik (Rooduijn, 2019).

Dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui relasi antara struktur ekonomi dan kebijakan negara yang mendorong eksploitasi sumber daya sebagai strategi pembangunan (Arsel & Pellegrini, 2024). Negara dengan ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif cenderung mengadopsi kebijakan yang mendukung eksploitasi (Laastad, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali dikompromikan demi kepentingan ekonomi (Lessmann et al., 2016). Selain itu, tekanan global terhadap permintaan energi turut memperkuat orientasi tersebut (Pérez Rincón et al., 2019). Dengan demikian, kebijakan ekstraktif menjadi bagian dari struktur ekonomi yang lebih luas (Brubaker, 2020).

Selain itu, lemahnya penerapan prinsip keadilan lingkungan dan dominasi pendekatan top-down memperkuat ketimpangan antara kepentingan negara dan masyarakat lokal (Villasante et al., 2025). Proses pengambilan keputusan yang tidak partisipatif menyebabkan marginalisasi masyarakat adat (Dayot, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan belum sepenuhnya inklusif (Tamufor et al., 2025). Ketimpangan ini memperkuat konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya (Pérez Rincón et al., 2019). Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang tidak partisipatif memperburuk kondisi lingkungan dan sosial.

Temuan ini memperluas studi sebelumnya yang lebih menekankan dampak ekologis dengan menunjukkan bahwa kebijakan negara merupakan faktor kunci dalam menentukan arah pelestarian lingkungan (Lessmann et al., 2016). Studi sebelumnya cenderung berfokus pada kerusakan lingkungan tanpa mengaitkan secara langsung dengan kebijakan (Kimerling, 2013). Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika tersebut (Arsel & Pellegrini, 2024). Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi penting dalam studi lingkungan (Laastad, 2023). Hal ini memperkaya pendekatan dalam memahami konflik lingkungan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat parsial, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara analisis kebijakan, aktor, dan dinamika sosial dalam memahami konflik lingkungan (Dayot, 2023). Pendekatan sebelumnya sering memisahkan aspek sosial dan ekologis (Pérez Rincón et al., 2019). Penelitian ini menggabungkan berbagai dimensi dalam satu kerangka analisis (Villasante et al., 2025). Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif (Lessmann et al., 2016). Dengan demikian, pendekatan integratif memberikan kontribusi metodologis yang lebih kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dicapai tanpa perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi yang masih bergantung pada sektor ekstraktif (Arsel & Pellegrini, 2024). Ketergantungan ini menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan (Laastad, 2023). Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan (Pappas, 2019). Selain itu, reformasi kebijakan menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan (Rooduijn, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktural menjadi kebutuhan utama.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan konservasi memerlukan partisipasi masyarakat, penguatan institusi, serta integrasi antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Tamufor et al., 2025). Partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan lingkungan (Villasante et al., 2025). Selain itu, institusi yang kuat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan (Dayot, 2023). Integrasi kebijakan ekonomi dan lingkungan menjadi kunci dalam keberlanjutan (Pérez Rincón et al., 2019). Dengan demikian, pendekatan holistik diperlukan dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fokus

utama dalam analisis kebijakan ekstraktif, bukan sekadar sebagai dampak (Arsel & Pellegrini, 2024). Pendekatan ini berbeda dari studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek ekologis (Lessmann et al., 2016). Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya analisis kebijakan dalam studi lingkungan (Laastad, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru (Dayot, 2023). Hal ini memperkuat kontribusi dalam literatur akademik.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan analisis yang terintegrasi antara kebijakan, dinamika sosial, dan faktor ekologis dalam konteks Yasuní (Pérez Rincón et al., 2019). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konflik lingkungan (Villasante et al., 2025). Penelitian ini juga menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (Tamufor et al., 2025). Hal ini memberikan kontribusi metodologis yang signifikan (Arsel & Pellegrini, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi lingkungan dan kebijakan publik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dalam kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuní (2013–2023) berada di bawah tekanan struktural akibat dominasi kepentingan ekonomi berbasis minyak, sehingga kebijakan negara cenderung memprioritaskan eksploitasi dibanding konservasi. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan belum menjadi fokus utama dalam kebijakan publik, melainkan dipengaruhi oleh relasi antara struktur ekonomi, dinamika politik, dan kekuasaan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan ekstraktif memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelestarian lingkungan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan tidak bergantung pada sektor ekstraktif agar pelestarian lingkungan dapat tercapai secara efektif.

## Daftar Pustaka

- Arsel, M., & Pellegrini, L. (2024). Structural limits to effective environmental activism. *Geography and Environment*, 11(2). <https://doi.org/10.1002/geo2.150>
- Bass, M. S., Finer, M., Jenkins, C. N., et al. (2010). Global conservation significance of Ecuador's Yasuni National Park. *PLoS ONE*, 5(1), e8767. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.000876>
- Bonikowski, B. (2019). Populism and nationalism in a comparative perspective. *Annual Review of Sociology*, 45, 1–22. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022629>
- Breskaya, O., Giordan, G., & Richardson, J. T. (2018). Human rights and religion: A sociological perspective. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 57(3), 419–431. <https://doi.org/10.1111/jssr.12544>
- Brubaker, R. (2020). Populism and nationalism. *Nations and Nationalism*, 26(1), 44–66. <https://doi.org/10.1111/nana.12522>
- Dayot, J. (2023). Valuation struggles in the Ecuadorian Amazon. *Journal of Political Ecology*, 30(1). <https://doi.org/10.2458/jpe.2970>
- Eckersley, R. (2007). *Green theory*. Oxford University Press.
- Espinosa, C. (2013). The riddle of leaving the oil in the soil. *Forest Policy and Economics*, 36, 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.07.006>
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Finer, M., et al. (2009). Ecuador's Yasuni Biosphere Reserve. *Environmental Research Letters*, 4(3). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/3/034005>
- Flyvbjerg, B. (2021). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/1077800420932406>
- Gidron, N., & Hall, P. A. (2020). Populism as a problem of social integration. *Comparative Political Studies*, 53(7), 1027–1059. <https://doi.org/10.1177/0010414019879947>
- Inglehart, R., & Norris, P. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Joas, H. (2020). *The power of the sacred*. Oxford University Press.
- Kimerling, J. (2013). Oil, contact, and conservation in the Amazon. *Colorado Journal of International Environmental Law & Policy*.
- Laastad, S. G. (2023). Leaving oil in the ground. *Environment and Planning A*, 56(1), 172–189. <https://doi.org/10.1177/0308518x231184876>
- Larrea, C., & Warnars, L. (2009). Ecuador's Yasuni-ITT initiative. *Energy for Sustainable Development*, 13(3), 219–223. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2009.08.003>
- Leofreddi, A. (2023). Political secularism and religious freedom. *Religions*, 14(10), 1292. <https://doi.org/10.3390/rel14101292>
- Lessmann, J., Tamayo, J. A., & Muñoz, J. (2016). Oil industry expansion and biodiversity. *Ecology and Evolution*, 6(14), 4997–5012. <https://doi.org/10.1002/ece3.2099>
- Martin, P., & Scholz, I. (2014). Oil extraction and environmental conflict. *Energy Policy*, 68, 414–421.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press.
- Pappas, T. S. (2019). Populism and liberal democracy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1200>
- Pérez Rincón, M. A., Vargas-Morales, J., & Martínez-Alier, J. (2019). Ecological distribution conflicts. *Ecological Economics*, 157, 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.11.004>
- Rights of Nature Tribunal. (2023). Yasuni-ITT case. <https://www.rightsofnaturetribunal.org>
- Rival, L. (2010). Ecuador's Yasuni-ITT initiative. *Energy Policy*.
- Rooduijn, M. (2019). State of the field: Populism. *Politics*, 39(3), 362–372. <https://doi.org/10.1177/0263395719867846>
- Smith, C. (2020). Religion and human flourishing. *Sociology of Religion*, 81(1), 1–20. <https://doi.org/10.1093/socrel/srz046>
- Stanley, B. (2018). Populism in political theory. *Journal of Political Ideologies*, 23(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13569317.2018.1451226>
- Sovacool, B. K., & Scarpaci, J. (2016). Energy justice and petroleum politics. *Energy Policy*, 95, 158–171. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.045>
- Tamufor, N. E., Roth, R., & MacDonald, D. B. (2025). Biodiversity conservation policy reform. *Frontiers in Environmental Science*, 12. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1434731>
- UNDP. (2012). Yasuni-ITT Initiative. <https://mptf.undp.org>

Villasante, S., Tovar Verba, J., & Relano, V. (2025). Indigenous rights and extractive conflicts. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7553135/v1>

Weyland, K. (2021). Populism as a political strategy. *Comparative Politics*, 53(2). <https://doi.org/10.5129/001041521X16135812068450>



# Strategi Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Majemuk Indonesia

Aldrianto Makotos  
Dr. Veroska Teintang  
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[aldriantomakotos975@gmail.com](mailto:aldriantomakotos975@gmail.com)  
[veroskateintang@sttikat.ac.id](mailto:veroskateintang@sttikat.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pendidikan Agama Kristen dalam membangun moderasi beragama pada masyarakat majemuk Indonesia melalui pendekatan kontekstual, dialogis, dan partisipatif. Fokus penelitian diarahkan pada pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang mampu memperkuat toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan karakter kebangsaan di tengah pluralitas agama, budaya, dan etnis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kurikulum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Kristen, moderasi beragama, dan masyarakat multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis dialog lintas agama, pedagogi kontekstual, proyek kolaboratif, dan pemanfaatan media digital lebih efektif dalam membangun sikap moderat dan inklusif peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama Kristen memiliki peran strategis dalam membentuk kehidupan sosial yang toleran, damai, dan adaptif terhadap tantangan masyarakat plural pada era digital kontemporer.

**Kata-kunci:** Dialog Lintas Agama, Moderasi Beragama, Masyarakat Majemuk, Pendidikan Agama Kristen, Toleransi Sosial

## Received:

March/15/2026

## Accepted:

April/16/2026

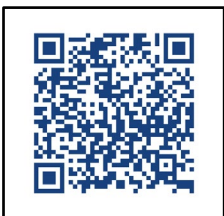
## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze Christian Religious Education strategies in building religious moderation within Indonesia's pluralistic society through contextual, dialogical, and participatory approaches. The focus of the study is directed toward developing Christian Religious Education learning that can strengthen tolerance, appreciation for diversity, and national character amid religious, cultural, and ethnic plurality in Indonesia. This study employed a descriptive qualitative method with a literature study approach through the analysis of various scientific journals, academic books, curriculum documents, and previous studies related to Christian Religious Education, religious moderation, and multicultural society. The findings reveal that learning strategies based on interreligious dialogue, contextual pedagogy, collaborative projects, and the utilization of digital media are more effective in fostering moderate and inclusive attitudes among students. This study confirms that Christian Religious Education has a strategic role in shaping a tolerant, peaceful, and adaptive social life in response to the challenges of pluralistic society in the contemporary digital era..*

**Keywords:** Christian Religious Education, Interreligious Dialogue, Multicultural Society, Religious Moderation, Social Tolerance.



## Pendahuluan

Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya dinamika masyarakat multikultural, perkembangan teknologi digital, dan munculnya polarisasi sosial berbasis identitas keagamaan di ruang publik (Bocking, 2020). Dalam konteks masyarakat majemuk, PAK tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pembinaan spiritual internal gereja, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter, toleransi, dan moderasi beragama dalam kehidupan kebangsaan (Hedges, 2021). Perubahan sosial pada era Society 5.0 mendorong lembaga pendidikan Kristen untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap realitas pluralisme Indonesia (McLennan, 2022). Di sisi lain, meningkatnya penyebaran intoleransi dan radikalisme melalui media digital menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran sosial yang menghargai keberagaman (Taves, 2020). Oleh karena itu, pengembangan strategi PAK dalam masyarakat majemuk menjadi isu penting dalam diskursus pendidikan, teologi, dan kebijakan sosial-keagamaan di Indonesia (Lewis, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai PAK dalam masyarakat majemuk lebih banyak diarahkan pada pendekatan teologis dan pedagogis dalam membangun sikap toleransi peserta didik (Chryssides & Gregg, 2019). Thomas Groome melalui buku *Christian Religious Education* menegaskan bahwa pendidikan Kristen harus dikembangkan sebagai proses dialogis yang menghubungkan iman dengan realitas sosial masyarakat secara kritis dan partisipatif (Groome, 2011). James A. Banks dalam *An Introduction to Multicultural Education* menjelaskan bahwa pendidikan multikultural perlu mengintegrasikan nilai kesetaraan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap identitas budaya dalam proses pembelajaran (Banks, 2019). Penelitian lain mengenai moderasi beragama dalam pendidikan Kristen juga menunjukkan bahwa pendekatan inklusif mampu mengurangi kecenderungan eksklusivisme dan prasangka antarkelompok agama dalam lingkungan pendidikan plural (Moberg, 2021). Selain itu, kajian mengenai Kurikulum Merdeka menegaskan bahwa pembelajaran agama pada era kontemporer harus diarahkan pada penguatan kompetensi sosial, kolaborasi, dan pembentukan karakter kebangsaan peserta didik (Fuiet, 2021).

Dalam perspektif akademik, PAK dipandang tidak hanya sebagai transmisi doktrin iman, tetapi juga sebagai ruang konstruksi etika sosial dan pembentukan kesadaran hidup bersama dalam masyarakat plural (Knibbe & Kupari, 2020). Pendekatan *lived religion* menempatkan pengalaman sosial peserta didik sebagai bagian penting dalam proses pendidikan agama sehingga pembelajaran tidak bersifat abstrak dan normatif semata (Hoondert, 2020). Kajian lain menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan agama dalam masyarakat majemuk sangat dipengaruhi oleh kemampuan pendidik membangun dialog, empati sosial, dan relasi lintas budaya di ruang kelas (Ryan, 2022). Dalam konteks Indonesia, studi mengenai moderasi beragama menegaskan bahwa pendidikan agama memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi nasional dan mencegah berkembangnya intoleransi berbasis identitas (Schlamecher, 2022). Dengan demikian, studi akademik kontemporer cenderung memandang PAK sebagai praktik pedagogis yang harus mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan kebangsaan secara seimbang (Molina & Nicolescu, 2022).

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan terhadap praktik pendidikan agama di Indonesia melalui penguatan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan pengembangan profil pelajar Pancasila (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks PAK, kebijakan ini mendorong sekolah dan gereja untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter moderat peserta didik (Altglas, 2021). Pemerintah Indonesia melalui kebijakan moderasi beragama juga menempatkan pendidikan agama sebagai instrumen strategis dalam menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat nasional

(Lambert, 2020). Praktik pendidikan agama kontemporer mulai memanfaatkan media digital, pembelajaran kolaboratif, dan dialog lintas iman sebagai bagian dari pendekatan pedagogis yang relevan dengan perkembangan generasi muda masa kini (Lee, 2021). Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan Kristen mulai mengintegrasikan pendidikan multikultural dan literasi digital dalam desain kurikulum PAK untuk menjawab tantangan era globalisasi dan transformasi budaya digital (Prensky, 2018).

Secara umum, literatur akademik menunjukkan adanya konsensus bahwa PAK dalam masyarakat majemuk harus dikembangkan melalui pendekatan yang inklusif, dialogis, dan kontekstual terhadap realitas sosial Indonesia (Segal, 2021). Pendidikan agama yang hanya berorientasi pada penguatan identitas internal tanpa sensitivitas sosial dinilai berpotensi memperkuat eksklusivisme dan polarisasi dalam masyarakat plural (Nevle & Rush, 2023). Sebaliknya, pendekatan pendidikan agama yang mengintegrasikan moderasi beragama, multikulturalisme, dan pedagogi partisipatif dianggap lebih efektif dalam membangun toleransi dan solidaritas sosial peserta didik (Schnell, 2021). Literatur juga menegaskan bahwa penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum adaptif, dan pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi PAK di era digital kontemporer (Parker, 2021). Dengan demikian, arah perkembangan studi PAK saat ini menempatkan pendidikan agama Kristen sebagai instrumen strategis dalam membangun masyarakat Indonesia yang religius, inklusif, dan demokratis di tengah kemajemukan sosial-keagamaan (Abdullah, 2020).

Pemahaman mengenai peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam membangun moderasi beragama di masyarakat majemuk masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek doktrinal dibandingkan dinamika sosial peserta didik dalam konteks pluralisme kontemporer (Berghuijs, 2021). Kajian pendidikan agama Kristen juga cenderung memusatkan perhatian pada pembentukan spiritual internal gereja tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara pembelajaran agama dan konstruksi toleransi sosial lintas budaya (Jackson, 2020). Selain itu, penelitian tentang pendidikan agama di Indonesia lebih banyak membahas dimensi normatif teologi dibandingkan strategi pedagogis yang relevan dengan tantangan keberagaman masyarakat digital modern (Sterkens & Vermeer, 2022). Analisis mengenai implementasi pembelajaran PAK berbasis moderasi beragama dalam praktik pendidikan kontemporer juga masih jarang dikembangkan secara sistematis dalam studi akademik Indonesia (Wrogemann, 2021). Akibatnya, pemahaman mengenai pengembangan kurikulum PAK yang inklusif dan kontekstual terhadap masyarakat majemuk masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara konseptual (Sianipar, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada pendidikan karakter umum dibandingkan transformasi kurikulum PAK dalam menghadapi pluralitas sosial-keagamaan Indonesia (Riyanto, 2022). Sebagian besar studi pendidikan agama Kristen masih menempatkan pengajar sebagai pusat pembelajaran tanpa mengembangkan pendekatan dialogis yang melibatkan pengalaman sosial peserta didik secara aktif (Boeve, 2020). Di sisi lain, pendekatan multikultural dalam pendidikan gereja sering dipahami hanya sebagai materi tambahan tanpa dianalisis sebagai bagian dari konstruksi pedagogi PAK secara menyeluruh (Naidoo, 2021). Kajian mengenai moderasi beragama dalam pendidikan Kristen juga lebih dominan membahas aspek moral dan spiritual dibandingkan strategi pembelajaran kontekstual dalam masyarakat plural (Sukendar, 2023). Ketidakseimbangan ini menyebabkan pengembangan kurikulum PAK masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat majemuk dan praktik pendidikan gereja kontemporer (Astley, 2020).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan perspektif teologi, pendidikan multikultural, dan transformasi digital dalam satu kerangka analisis pendidikan agama Kristen yang utuh (Miedema, 2021). Banyak penelitian hanya membahas PAK sebagai sarana pembinaan iman tanpa mengaitkannya dengan perubahan sosial, budaya digital, dan dinamika identitas

generasi muda masa kini (Pangalila, 2022). Selain itu, kajian mengenai implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Kristen masih lebih banyak berkembang pada konteks sekolah formal dibandingkan lingkungan gereja dan komunitas pelayanan nonformal (Schweitzer, 2020). Penelitian yang ada juga jarang mengeksplorasi bagaimana gereja membangun strategi pembelajaran yang mampu menghubungkan nilai iman Kristen dengan kehidupan sosial multikultural sehari-hari (Willemse, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai strategi PAK dalam masyarakat majemuk masih terbatas dan belum multidimensional (Simanjuntak, 2023).

Terdapat kekosongan analisis terhadap hubungan antara strategi kurikulum PAK, moderasi beragama, dan pembentukan kesadaran sosial peserta didik dalam masyarakat plural Indonesia (Van der Kooij et al., 2020). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep pembelajaran dialogis secara spesifik dalam pendidikan Kristen berbasis keberagaman sosial dan budaya lokal (Arifianto, 2022). Hubungan antara penggunaan media digital, pembelajaran partisipatif, dan penguatan toleransi antarumat beragama juga belum dianalisis sebagai satu sistem pedagogis yang terpadu dalam pendidikan agama Kristen (Ipgrave, 2021). Pendekatan yang tersedia masih terfragmentasi antara studi teologi, pendidikan karakter, dan pendidikan multikultural tanpa membangun model kurikulum integratif yang relevan dengan realitas masyarakat majemuk Indonesia (Telaumbanua, 2023). Akibatnya, belum terdapat model konseptual yang secara sistematis menjelaskan bagaimana PAK dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya digital, dan kebutuhan moderasi beragama pada era kontemporer (Situmorang, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis strategi kurikulum PAK dalam membangun moderasi beragama melalui pendekatan kontekstual dan dialogis di masyarakat majemuk Indonesia (Cooling, 2020). Penelitian ini perlu mengintegrasikan perspektif pedagogi Kristen, teori multikulturalisme, dan transformasi digital dalam satu kerangka analisis pendidikan agama yang sistematis (Bråten, 2021). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana gereja dan lembaga pendidikan Kristen mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memperkuat toleransi sosial peserta didik di tengah pluralitas budaya dan agama (Napitupulu, 2023). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara pendidikan agama, pembelajaran interaktif, media digital, dan penguatan moderasi beragama dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer (Franken & Loobuyck, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai strategi PAK kontekstual dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan multikultural secara lebih analitis dan aplikatif (Widjaja, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam membangun moderasi beragama melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual pada masyarakat majemuk Indonesia (Banks, 2020). Studi ini difokuskan untuk memahami bagaimana kurikulum PAK dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan sikap toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman sosial-keagamaan peserta didik (Groome, 2021). Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bentuk implementasi pedagogi Kristen yang relevan dengan tantangan pluralisme dan perkembangan budaya digital kontemporer (Baker, 2022). Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi hubungan antara strategi pembelajaran PAK dan penguatan nilai moderasi beragama dalam praktik pendidikan gerejawi maupun formal (Setio, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan model pendidikan agama Kristen yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan iman internal, tetapi juga pada pembangunan kehidupan sosial yang inklusif dan toleran (Hull, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi kurikulum PAK dalam konteks masyarakat multikultural dan plural (Merriam & Tisdell, 2021). Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjelaskan pengalaman, persepsi, dan praktik pembelajaran agama Kristen secara kontekstual dalam lingkungan sosial

tertentu (Denzin & Lincoln, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh data empiris mengenai implementasi pendidikan agama Kristen berbasis moderasi beragama (Yin, 2020). Analisis penelitian difokuskan pada pola interaksi pembelajaran, penggunaan media pendidikan, dan strategi pedagogis yang digunakan dalam membangun kesadaran toleransi peserta didik (Sugiyono, 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap transformasi pendidikan agama Kristen di era masyarakat digital dan majemuk (Cohen et al., 2021).

Fokus utama penelitian ini terletak pada hubungan antara strategi kurikulum PAK, pembelajaran kontekstual, dan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan sosial peserta didik (Lartey, 2020). Analisis penelitian diarahkan pada bagaimana pendekatan pedagogi Kristen dapat menyesuaikan diri dengan perubahan budaya belajar generasi digital yang lebih visual, partisipatif, dan interaktif (Campbell, 2021). Penelitian ini juga mengkaji penggunaan media pembelajaran, aktivitas dialogis, dan pendekatan pengalaman sosial sebagai bagian dari proses pendidikan agama Kristen yang relevan dengan masyarakat plural (Tisdale, 2022). Selain itu, penelitian menyoroti bagaimana gereja dan lembaga pendidikan Kristen membangun ruang pembelajaran yang mampu memperkuat sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama (Arthur, 2021). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan moderasi beragama sebagai bagian integral dari pengembangan strategi pendidikan agama Kristen kontemporer (Azra, 2020).

Penelitian ini penting dilakukan karena meningkatnya tantangan intoleransi, polarisasi sosial, dan konflik identitas keagamaan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural (Menchik, 2021). Dalam konteks tersebut, pendidikan agama Kristen memerlukan transformasi strategi pembelajaran agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, budaya digital, dan kehidupan masyarakat plural (Schreiter, 2020). Penelitian ini juga menjadi penting karena pendekatan pendidikan agama yang eksklusif berpotensi memperlemah proses dialog dan kohesi sosial antarumat beragama (Moyaert, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola belajar generasi muda sehingga gereja perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual (Thomas, 2021). Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum PAK yang lebih relevan terhadap tantangan kehidupan sosial-keagamaan kontemporer (Tilaar, 2020).

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian pendidikan agama Kristen dengan menghadirkan analisis mengenai strategi kurikulum PAK berbasis moderasi beragama dalam masyarakat majemuk Indonesia (Hefner, 2021). Studi ini juga berkontribusi dalam mengintegrasikan perspektif pedagogi Kristen, pendidikan multikultural, dan transformasi digital dalam satu kerangka analisis pendidikan agama yang lebih sistematis (Graham, 2020). Selain itu, penelitian ini menawarkan pemahaman baru mengenai hubungan antara pembelajaran kontekstual, media interaktif, dan pembentukan sikap toleransi dalam pendidikan agama Kristen kontemporer (Estep, 2022). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi gereja dan lembaga pendidikan Kristen dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inklusif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini (Pazmiño, 2021). Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual strategi kurikulum PAK yang mengintegrasikan moderasi beragama, pembelajaran kontekstual, dan budaya digital sebagai satu sistem pedagogi Kristen yang adaptif terhadap masyarakat plural modern (Bennet, 2023).

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis strategi

kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam membangun moderasi beragama melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik, pengalaman, dan dinamika pembelajaran PAK dalam konteks pelayanan dan pendidikan Kristen di masyarakat majemuk. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi strategi pembelajaran PAK yang relevan terhadap perkembangan sosial, budaya digital, dan karakteristik generasi masa kini. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kurikulum PAK, moderasi beragama, dan pembelajaran kontekstual dalam praktik pendidikan Kristen kontemporer.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru Pendidikan Agama Kristen, pelayan sekolah minggu, pendeta, serta peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran PAK. Selain itu, observasi terhadap proses pembelajaran dan aktivitas pelayanan pendidikan gereja juga dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi strategi kurikulum PAK kontekstual.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti kurikulum Pendidikan Agama Kristen, buku ajar, modul pembelajaran, arsip gereja, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur yang berkaitan dengan moderasi beragama, pedagogi Kristen, dan pembelajaran kontekstual. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas analisis penelitian secara multidimensional.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi data. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi pembelajaran PAK, pendekatan kontekstual, dan praktik moderasi beragama dalam pendidikan Kristen. Lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas pembelajaran, interaksi peserta didik, penggunaan media pembelajaran, serta bentuk implementasi kurikulum PAK di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebijakan pendidikan gereja.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian mengenai strategi kurikulum PAK dan moderasi beragama. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif agar pola, hubungan, dan temuan penelitian dapat dipahami secara sistematis.

Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan keterkaitan antara pendekatan pembelajaran kontekstual, penggunaan media pembelajaran, dan penguatan nilai moderasi beragama dalam pendidikan Kristen. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih valid, mendalam, dan komprehensif mengenai strategi kurikulum PAK dalam konteks pendidikan Kristen kontemporer.

## **Hasil Temuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pendidikan Agama Kristen dalam membangun moderasi beragama pada masyarakat majemuk Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penguatan karakter kebangsaan. Pendidikan Agama Kristen tidak hanya dipahami sebagai proses pengajaran doktrin iman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial yang mampu mendorong kehidupan bersama secara damai di tengah pluralitas agama, budaya, dan etnis di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan teologis inklusif, pedagogi kontekstual, dan pembelajaran berbasis moderasi beragama menjadi strategi utama dalam implementasi Pendidikan Agama Kristen pada masyarakat majemuk. Selain itu, penerapan Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan pembelajaran partisipatif, dialog lintas agama, dan penguatan nilai toleransi melalui kegiatan proyek sosial dan kolaboratif.

Aspek Penelitian	Temuan Penelitian
Landasan Teologis	Pendidikan Agama Kristen mengembangkan pendekatan teologi inklusif untuk membangun moderasi beragama dalam masyarakat majemuk.
Strategi Pedagogis	Pembelajaran kontekstual, dialogis, dan partisipatif dinilai lebih efektif dalam menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.
Implementasi Kurikulum	Kurikulum Merdeka memberi ruang integrasi nilai moderasi beragama, kerja sama sosial, dan pembelajaran berbasis proyek lintas budaya.
Peran Guru PAK	Guru PAK berperan sebagai fasilitator, mediator sosial, pembimbing karakter, dan teladan dalam membangun sikap inklusif peserta didik.
Tantangan Pendidikan	Tantangan utama meliputi radikalisme digital, eksklusivisme keagamaan, intoleransi sosial, dan lemahnya literasi keberagaman di kalangan generasi muda.
Peran Keluarga dan Gereja	Sinergi keluarga, sekolah, dan gereja menjadi faktor penting dalam membentuk karakter toleran dan moderat pada peserta didik.

Tabel. Aspek dan Temuan Penelitian

## Analisis Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa strategi Pendidikan Agama Kristen dalam masyarakat majemuk Indonesia tidak dapat lagi berfokus hanya pada penguatan aspek kognitif dan doktrinal, tetapi harus diarahkan pada pembentukan karakter sosial yang moderat, inklusif, dan menghargai keberagaman. Pendekatan moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Kristen dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara komitmen iman Kristen dengan penghormatan terhadap hak sosial dan kebebasan beragama masyarakat lain. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pedagogi Yesus Kristus menjadi model utama dalam membangun pembelajaran yang mengedepankan kasih, pelayanan, pengampunan, dan penghormatan terhadap sesama tanpa diskriminasi sosial maupun agama.

Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Agama Kristen membuka peluang pengembangan pembelajaran berbasis pengalaman sosial, proyek kolaboratif, dan dialog lintas agama yang lebih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang plural. Strategi pembelajaran seperti observasi sosial, proyek toleransi, dan kerja sama lintas komunitas dinilai mampu mengurangi prasangka, membangun empati, dan memperkuat kesadaran kebangsaan peserta didik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan Pendidikan Agama Kristen dalam membangun moderasi beragama sangat dipengaruhi oleh kualitas guru PAK, dukungan keluarga, dan keterlibatan gereja dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru PAK dituntut memiliki kompetensi pedagogis, sosial, dan spiritual yang mampu menjawab tantangan era digital, termasuk penyebaran intoleransi dan radikalisme melalui media sosial. Oleh sebab itu, strategi Pendidikan Agama Kristen perlu dikembangkan secara lebih kontekstual, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia masa kini.

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pendidikan Agama Kristen bagi masyarakat majemuk Indonesia memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, dialogis, dan berorientasi pada penguatan moderasi beragama dalam kehidupan sosial peserta didik (Widjaja, 2022). Pendidikan Agama Kristen tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai sarana transmisi doktrin teologis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter sosial yang inklusif dalam masyarakat plural Indonesia (Berghuijs, 2021). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan pedagogi kontekstual mampu membangun kesadaran peserta didik untuk menghargai keberagaman agama, budaya, dan identitas sosial secara lebih terbuka (Jackson, 2020). Dalam praktiknya, integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAK membantu peserta didik mengembangkan sikap toleransi tanpa kehilangan identitas iman Kristen yang dimiliki (Sterkens & Vermeer, 2022). Dengan demikian, strategi Pendidikan Agama Kristen berbasis moderasi beragama menjadi bagian penting dalam memperkuat kehidupan sosial yang damai dan harmonis pada masyarakat multikultural Indonesia (Wrogemann, 2021).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran berbasis dialog lintas budaya, proyek kolaboratif, dan pendekatan partisipatif lebih efektif dalam membangun sikap toleransi dibandingkan metode pengajaran agama yang bersifat eksklusif dan satu arah (Riyanto, 2022). Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta didik mengalami secara langsung proses interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki latar belakang budaya dan agama berbeda (Boeve, 2020). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman sosial lebih mampu mengurangi prasangka dan memperkuat empati peserta didik terhadap keberagaman masyarakat Indonesia (Naidoo, 2021). Implementasi proyek kolaboratif lintas komunitas membantu peserta didik memahami pentingnya kerja sama sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sukendar, 2023). Oleh sebab itu, strategi pembelajaran dialogis dan partisipatif menjadi pendekatan yang relevan dalam pengembangan Pendidikan Agama Kristen kontemporer pada masyarakat majemuk (Astley, 2020).

Secara pedagogis, temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Kristen perlu diarahkan pada pengembangan kesadaran sosial peserta didik melalui pembelajaran yang menekankan kasih, penghormatan terhadap keberagaman, dan interaksi aktif dalam masyarakat plural (Miedema, 2021). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Kristiani dapat diimplementasikan melalui pembelajaran yang mendorong dialog sosial dan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa diskriminasi agama maupun budaya (Pangalila, 2022). Pedagogi Yesus Kristus dipahami sebagai model pembelajaran yang menempatkan kasih, pelayanan, dan penerimaan terhadap sesama sebagai inti pendidikan iman Kristen (Schweitzer, 2020). Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendidikan agama yang kontekstual lebih efektif dalam membangun karakter moderat dibandingkan pendekatan pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan doktrin keagamaan (Willemse, 2021). Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen perlu dikembangkan sebagai proses pembentukan karakter sosial yang mampu menjawab tantangan pluralisme masyarakat modern Indonesia (Simanjuntak, 2023).

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh materi teologis, tetapi juga oleh metode pembelajaran, penggunaan media digital, dan kemampuan guru membangun pengalaman belajar yang inklusif dan reflektif (Van der Kooij et al., 2020). Guru Pendidikan Agama Kristen memiliki peran penting sebagai fasilitator dialog sosial dan pembimbing karakter peserta didik dalam menghadapi tantangan intoleransi digital (Arifianto, 2022). Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam memahami nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman (Ipgrave, 2021). Di sisi lain, lemahnya literasi digital dan meningkatnya radikalisme media sosial menjadi tantangan serius bagi implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Kristen

kontemporer (Telaumbanua, 2023). Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi pedagogis, sosial, dan digital guru PAK menjadi bagian penting dalam membangun pembelajaran yang inklusif dan adaptif pada era digital (Situmorang, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek doktrinal dan pendidikan karakter umum, studi ini menunjukkan bahwa strategi Pendidikan Agama Kristen perlu dikembangkan secara integratif dengan pendekatan multikultural dan moderasi beragama dalam masyarakat majemuk Indonesia (Cooling, 2020). Penelitian terdahulu cenderung memosisikan pendidikan agama sebagai sarana pembinaan spiritual internal tanpa menghubungkannya secara langsung dengan dinamika sosial masyarakat plural (Bråten, 2021). Studi ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Kristen harus dipahami sebagai bagian dari transformasi pedagogis yang menempatkan toleransi dan dialog sosial sebagai unsur utama pembelajaran (Napitupulu, 2023). Pendekatan tersebut memperluas fungsi Pendidikan Agama Kristen dari sekadar pengajaran doktrin menuju pembentukan kesadaran sosial yang inklusif dan kolaboratif (Franken & Loobuyck, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara pendidikan agama, pluralisme sosial, dan pembentukan karakter kebangsaan dalam konteks Indonesia kontemporer (Andre Akijuwon et al., 2025).

Temuan ini juga melampaui pendekatan pendidikan agama konvensional dengan mengintegrasikan pedagogi dialogis, pembelajaran partisipatif, dan pemanfaatan media digital sebagai bagian penting dalam transformasi kurikulum Pendidikan Agama Kristen kontemporer (Lewis, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran agama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi lebih efektif dalam menjangkau generasi muda pada era digital (Moberg, 2021). Integrasi media digital dalam pembelajaran PAK membantu peserta didik memahami keberagaman sosial melalui pendekatan yang lebih visual, komunikatif, dan reflektif (McLennan, 2022). Selain itu, strategi pembelajaran kolaboratif terbukti mampu memperkuat keterlibatan peserta didik dalam membangun hubungan sosial lintas agama secara lebih terbuka (Ryan, 2022). Oleh sebab itu, transformasi kurikulum Pendidikan Agama Kristen perlu diarahkan pada pengembangan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan relevan terhadap perubahan sosial masyarakat modern (Schlammelcher, 2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa gereja dan lembaga pendidikan Kristen perlu mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan terhadap dinamika sosial masyarakat multikultural Indonesia (Schnell, 2021). Kurikulum PAK perlu diarahkan pada penguatan nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan pengembangan dialog sosial lintas agama dalam proses pembelajaran (Segal, 2021). Gereja juga perlu membangun budaya pembelajaran yang tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu mendorong keterlibatan sosial peserta didik dalam kehidupan masyarakat plural (Taves, 2020). Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi pengembangan proyek sosial lintas budaya yang lebih kontekstual dalam pendidikan agama Kristen (Knibbe & Kupari, 2020). Dengan demikian, pengembangan kurikulum PAK kontekstual dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat moderasi beragama dan integrasi sosial masyarakat Indonesia (Hoondert, 2020).

Selain itu, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan kompetensi guru Pendidikan Agama Kristen, penggunaan media pembelajaran digital, dan pengembangan ruang dialog lintas agama untuk memperkuat moderasi beragama peserta didik pada era digital (Fuijst, 2021). Guru PAK perlu memiliki kemampuan pedagogis dan literasi digital yang mampu menjawab tantangan intoleransi dan radikalisme media sosial pada generasi muda (Hedges, 2021). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ruang dialog lintas agama dapat membantu peserta didik memahami keberagaman sebagai bagian dari realitas sosial bangsa Indonesia (Hjelm, 2022). Penggunaan media digital secara positif dalam pembelajaran agama dapat memperkuat keterlibatan peserta didik dalam proses pembentukan

karakter toleran dan moderat (Parker, 2021). Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, gereja, dan komunitas sosial menjadi faktor penting dalam membangun moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Kristen (Lee, 2021).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai strategi Pendidikan Agama Kristen dalam membangun moderasi beragama melalui pendekatan kontekstual, dialogis, dan partisipatif pada masyarakat majemuk Indonesia (Bocking, 2020). Studi ini memperlihatkan bahwa Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi sarana pembentukan karakter sosial yang inklusif dan toleran di tengah pluralitas masyarakat Indonesia (Bielo, 2018). Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif pedagogi Kristen, pendidikan multikultural, dan transformasi digital dalam satu kerangka analisis yang lebih sistematis (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan tersebut membantu menjelaskan hubungan antara pembelajaran agama, keberagaman sosial, dan penguatan moderasi beragama secara lebih multidimensional (Molina & Nicolescu, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan Pendidikan Agama Kristen yang relevan dengan tantangan masyarakat plural kontemporer (Nevle & Rush, 2023).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara kurikulum Pendidikan Agama Kristen, moderasi beragama, pembelajaran digital, dan pembentukan karakter toleran dalam konteks pendidikan Kristen kontemporer secara lebih integratif dan sistematis (Lambert, 2020). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran agama yang dialogis dan partisipatif mampu memperkuat kesadaran sosial peserta didik dalam masyarakat multikultural (Altglas, 2021). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan media digital dapat menjadi sarana pengembangan pembelajaran moderasi beragama yang lebih efektif pada generasi muda (Premsky, 2018). Selain itu, integrasi pedagogi kontekstual dalam Pendidikan Agama Kristen membantu membangun hubungan antara nilai iman dan realitas sosial kehidupan sehari-hari peserta didik (Abdullah, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan model kurikulum Pendidikan Agama Kristen berbasis moderasi beragama pada masyarakat majemuk Indonesia (Tiur Hotmaida Sipahutar et al., 2025).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pendidikan Agama Kristen dalam membangun moderasi beragama pada masyarakat majemuk Indonesia perlu dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual, dialogis, partisipatif, dan relevan terhadap dinamika sosial masyarakat plural. Pendidikan Agama Kristen tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran doktrin iman, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter sosial yang toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman agama, budaya, serta identitas sosial di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan pedagogi berbasis dialog lintas agama, proyek kolaboratif, pembelajaran partisipatif, dan pemanfaatan media digital lebih efektif dalam membangun sikap moderasi beragama dibandingkan metode pembelajaran yang bersifat eksklusif dan satu arah. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural dan tantangan era digital.

Makna penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan Pendidikan Agama Kristen pada era kontemporer harus diarahkan pada penguatan kesadaran sosial, toleransi, dan moderasi beragama sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik dalam kehidupan masyarakat majemuk. Secara praktis, gereja, sekolah, dan keluarga perlu membangun sinergi dalam mengembangkan pembelajaran yang inklusif, dialogis, dan berbasis pengalaman sosial agar peserta didik mampu hidup secara damai di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian mengenai hubungan antara pedagogi Kristen, pendidikan multikultural, moderasi beragama, dan transformasi digital dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen kontemporer.

Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang lebih integratif, kontekstual, dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Altglas, V. (2021). *Religion and the critique of rationality*. Oxford University Press.
- Andre Akijuwon, Jr., Sipahutar, T. H., Masero, C. D., Zefanya (2025). Efektivitas menghidupkan kembali metode pembelajaran klasik dalam pendidikan Kristen: Pendekatan pedagogis historis di Indonesia. *Perspektif*, 1(2), 99–114. <https://journal.ibas.us/index.php/Perspektif/article/view/35>
- Arifianto, Y. A. (2022). Pendidikan agama Kristen dan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 5(2), 88–103.
- Arthur, J. (2021). *Religious education and character development*. Routledge.
- Astley, J. (2020). *The philosophy of Christian religious education*. Routledge.
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, ibadah, hingga perilaku*. Kencana.
- Baker, J. O. (2022). Religion in the digital age and contemporary society. *Sociology of Religion*, 83(2), 145–162. <https://doi.org/10.1093/socrel/srab041>
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
- Banks, J. A. (2020). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass.
- Bennet, S. (2023). Contextual pedagogy and religious learning in multicultural societies. *Religious Education*, 118(2), 177–193.
- Berghuijs, J. (2021). Multiple religious belonging and lived religion in contemporary society. *Open Theology*, 7(1), 210–222.
- Berghuijs, J. (2021). Religious education and pluralism in contemporary society. *Religions*, 12(3), 188–201. <https://doi.org/10.3390/rel12030188>
- Bielo, J. S. (2018). *Anthropology of religion: The basics*. Routledge.
- Bocking, B. (2020). Religious studies as an academic discipline. *Religion*, 50(3), 421–437.
- Boeve, L. (2020). *Religion after detraditionalization: Christian faith in a post-secular Europe*. SCM Press.
- Boeve, L. (2020). *Religious education in a plural, secularised society*. Peeters Publishers.
- Bråten, O. M. H. (2021). Religious education and intercultural dialogue in plural societies. *Religions*, 12(5), 338. <https://doi.org/10.3390/rel12050338>
- Bråten, O. M. H. (2021). *Towards a methodology for comparative studies in religious education*. Waxmann Verlag.
- Campbell, H. (2021). *Digital religion: Understanding religious practice in digital media*. Routledge.
- Chryssides, G. D., & Gregg, S. E. (2019). *The insider/outsider debate in the study of religion*. Equinox Publishing.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2021). *Research methods in education* (9th ed.). Routledge.
- Cooling, T. (2020). *Christianity and religious diversity*. Routledge.
- Cooling, T. (2020). *Worldviews in religious education*. Springer.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Estep, J. R. (2022). Christian formation and contextual learning in modern education. *Christian Education Journal*, 19(1), 54–71.
- Franken, L., & Loobuyck, P. (2020). Religious education in a plural society. *Journal of Beliefs & Values*, 41(4), 459–472.
- Franken, L., & Loobuyck, P. (2020). Religious education in a plural, secularised society. *British Journal of Religious Education*, 42(2), 166–177.
- Fuist, T. N. (2021). Reflexive methodologies in the sociology of religion. *Sociology of Religion*, 82(4), 453–470. <https://doi.org/10.1093/socrel/srab028>
- Graham, E. (2020). *Theologies and practices of inclusion*. SCM Press.
- Groome, T. H. (2011). *Christian religious education: Sharing our story and vision*. Jossey-Bass.
- Groome, T. H. (2021). *Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples*. HarperOne.
- Hedges, P. (2021). *Understanding religion: Theories and methods for studying religiosity*. University of California Press.
- Hefner, R. W. (2021). Religious pluralism and democratic multiculturalism in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 15(1), 1–24.
- Hjelm, T. (2022). *Theoretical and methodological perspectives in the study of religion*. Brill.
- Hoondert, M. (2020). Reflexivity and positionality in religious studies research. *Religions*, 11(8), 394. <https://doi.org/10.3390/rel11080394>

- Hull, J. M. (2020). *Religious education in democratic plural societies*. Routledge.
- Igrave, J. (2021). Dialogue and education in religiously diverse societies. *Journal of Religious Education*, 69(1), 7–19.
- Igrave, J. (2021). Interreligious dialogue and religious education. *British Journal of Religious Education*, 43(2), 115–128.
- Jackson, R. (2020). *Religious education for plural societies*. Routledge.
- Knibbe, K., & Kupari, H. (2020). Theorizing lived religion: Introduction. *Journal of Contemporary Religion*, 35(2), 157–176.
- Lambert, Y. (2020). Belief, unbelief, and methodological neutrality in religious studies. *Social Compass*, 67(3), 317–331.
- Lartey, E. Y. (2020). *Postcolonializing God: An African practical theology*. SCM Press.
- Lee, L. (2021). Nonreligion and the politics of knowledge production. *Secularism and Nonreligion*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.5334/snr.136>
- Lewis, J. R. (2021). Methodological challenges in contemporary religious studies. *Journal of Contemporary Religion*, 36(2), 215–229.
- McLennan, G. (2022). Religion, modernity, and methodological critique. *Theory, Culture & Society*, 39(4), 115–133.
- Menchik, J. (2021). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Miedema, S. (2021). Religion, education, and citizenship in plural societies. *Religious Education*, 116(2), 123–135.
- Miedema, S. (2021). Religious education and citizenship formation. *Religious Education*, 116(2), 123–137.
- Moberg, M. (2021). Reflexivity and authority in the study of religion. *Religion*, 51(4), 623–641.
- Molina, N., & Nicolescu, B. (2022). Epistemic boundaries in contemporary religious studies. *Open Theology*, 8(1), 44–58.
- Moyaert, M. (2022). Interreligious dialogue and religious education in plural societies. *Religions*, 13(4), 377.
- Naidoo, M. (2021). *Contemporary issues in ministerial formation*. SUN Press.
- Naidoo, M. (2021). *Contemporary issues in theology and education*. Palgrave Macmillan.
- Napitupulu, D. (2023). Pendidikan agama Kristen dan penguatan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 6(1), 55–70.
- Napitupulu, D. S. (2023). Pendidikan agama Kristen dan penguatan toleransi sosial. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 155–170.
- Nevle, R., & Rush, O. (2023). Objectivity and interpretation in the humanities. *Humanities*, 12(2), 39.
- Pangalila, T. (2022). Pendidikan multikultural dan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 144–159.
- Pangalila, T. (2022). Pendidikan multikultural dan tantangan generasi digital Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 10(1), 44–57.
- Parker, S. G. (2021). Constructing insider and outsider categories in religious studies. *Method & Theory in the Study of Religion*, 33(4–5), 402–420.
- Pazmiño, R. W. (2021). *Foundational issues in Christian education*. Baker Academic.
- Prensky, M. (2018). *Education to better their world: Unleashing the power of 21st-century kids*. Teachers College Press.
- Riyanto, A. (2022). Pendidikan karakter dan moderasi beragama dalam pendidikan Kristen. *Jurnal Pendidikan Kristen*, 3(2), 77–92.
- Riyanto, A. (2022). Transformasi pendidikan agama Kristen dalam masyarakat plural. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 21–37.
- Ryan, M. (2022). Reflexivity and objectivity in religious studies research. *Religion Compass*, 16(4), 1–12. <https://doi.org/10.1111/rec3.12455>
- Schlamelcher, J. (2022). Epistemology and critical methodology in the study of religion. *Religions*, 13(7), 611. <https://doi.org/10.3390/rel13070611>
- Schreiter, R. J. (2020). *Constructing local theologies*. Orbis Books.
- Schnell, T. (2021). Meaning-making and epistemic authority in religion research. *Archive for the Psychology of Religion*, 43(2), 117–134.
- Schweitzer, F. (2020). Religious education and youth in plural societies. Waxmann Verlag.
- Schweitzer, F. (2020). Religious education in global and comparative perspectives. *British Journal of Religious Education*, 42(4), 401–412.
- Segal, R. A. (2021). *Myth and phenomenology in religious studies*. Routledge.
- Setio, R. (2023). Pendidikan agama Kristen dan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(2), 120–138.

- Sianipar, D. (2023). Kurikulum pendidikan agama Kristen berbasis moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Religia*, 7(1), 61–77.
- Sianipar, J. (2023). Kurikulum pendidikan agama Kristen berbasis moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 4(1), 101–118.
- Simanjuntak, R. (2023). Pendidikan Kristen dan masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Teologi Praktika*, 7(2), 90–108.
- Simanjuntak, R. (2023). Pendidikan Kristen kontekstual dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Didache*, 4(2), 133–149.
- Situmorang, H. (2022). Literasi digital dan moderasi beragama generasi muda Kristen. *Jurnal Komunikasi Keagamaan*, 5(1), 65–81.
- Situmorang, H. (2022). Moderasi beragama dalam pendidikan Kristen era digital. *Jurnal Christian Humaniora*, 6(1), 88–103.
- Sterkens, C., & Vermeer, P. (2022). Religion, education and pluralism. *Religious Education*, 117(1), 1–14.
- Sterkens, C., & Vermeer, P. (2022). Religion, education, and social cohesion in multicultural societies. *Religions*, 13(4), 332. <https://doi.org/10.3390/rel13040332>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukendar, Y. (2023). Pendidikan agama Kristen dan masyarakat plural Indonesia. *Jurnal Societas Dei*, 10(1), 41–58.
- Sukendar, Y. (2023). Strategi pedagogis moderasi beragama dalam pendidikan Kristen. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Kristen*, 5(1), 44–61.
- Taves, A. (2020). Objectivity and experience in the academic study of religion. *Religion*, 50(4), 601–615. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1792050>
- Telaumbanua, A. (2023). Pendekatan pedagogi kontekstual dalam pendidikan agama Kristen. *Jurnal Shanana*, 7(1), 95–111.
- Telaumbanua, A. (2023). Transformasi pendidikan agama Kristen di era digital. *Jurnal Pendidikan Teologi*, 6(2), 120–137.
- Thomas, G. (2021). Religion, media, and youth culture in the digital age. *Journal of Contemporary Religion*, 36(3), 421–437.
- Tilaar, H. A. R. (2020). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.
- Tisdale, L. T. (2022). Contextual teaching and transformative learning in faith communities. *Practical Theology*, 15(4), 310–326.
- Tiur Hotmaida Sipahutar, Masero, C. D., Zefanya. (2025). Pendekatan pedagogis historis dalam pendidikan Kristen Indonesia. *Perspektif*, 1(2), 99–114. <https://journal.ibas.us/index.php/Perspektif/article/view/35>
- Van der Kooij, J. C., De Ruyter, D. J., & Miedema, S. (2020). The concept of worldview in religious education. *Religious Education*, 115(1), 74–89.
- Van der Kooij, J. C., de Ruyter, D., & Miedema, S. (2020). Religious education and worldview formation. *Journal of Beliefs & Values*, 41(3), 281–295.
- Widjaja, F. I. (2022). Pendidikan agama Kristen dan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 5(1), 33–49.
- Widjaja, F. I. (2022). Pendidikan agama Kristen dan moderasi sosial keagamaan. *Jurnal Gamaliel*, 4(2), 101–118.
- Willemse, K. (2021). Religion and social engagement in plural societies. *Social Compass*, 68(2), 201–216.
- Willemse, W. M. (2021). Religious education and identity formation in plural societies. *HTS Teologiese Studies*, 77(4), 1–9.
- Wrogemann, H. (2021). *Intercultural theology and religious plurality*. InterVarsity Press.
- Wrogemann, H. (2021). *Intercultural theology and religious studies*. InterVarsity Press.
- Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.



# Strategi Kurikulum PAK bagi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Generasi Alpha: Pendekatan Kontekstual dan Relevan

Aldrianto Makotos  
Dr. Daniel Tjandra  
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email:

[aldriantomakotos975@gmail.com](mailto:aldriantomakotos975@gmail.com)

[danieltjandra@sttikat.ac.id](mailto:danieltjandra@sttikat.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha melalui pendekatan kontekstual dan relevan terhadap perkembangan budaya digital anak masa kini. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di GKLB Elim Dowiwi, Kabupaten Banggai. Data diperoleh melalui wawancara dengan guru sekolah minggu, pendamping, dan anak sekolah minggu, serta observasi dan studi dokumentasi terkait proses pembelajaran PAK dalam pelayanan anak gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Alpha lebih responsif terhadap pembelajaran interaktif, visual, kreatif, dan berbasis pengalaman dibandingkan metode ceramah konvensional. Strategi pembelajaran seperti kuis Alkitab, permainan edukatif, gerak dan lagu, serta aktivitas partisipatif terbukti meningkatkan keterlibatan anak dalam pembelajaran sekolah minggu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum PAK perlu dikembangkan secara lebih adaptif, fleksibel, dan kontekstual melalui dukungan media digital, pengelompokan kelas berdasarkan usia, dan penguatan kompetensi pedagogis guru sekolah minggu.

**Kata-kunci:** Generasi Alpha, Kontekstual, Kurikulum PAK, Pelayanan Anak, Sekolah Minggu

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the Christian Religious Education (CRE) curriculum strategy for Alpha Generation Sunday school ministry through contextual and relevant approaches toward the development of contemporary children's digital culture. The study employed a descriptive qualitative method with the research conducted at GKLB Elim Dowiwi, Banggai Regency. Data were collected through interviews with Sunday school teachers, assistants, and Sunday school children, as well as observations and documentation studies related to the CRE learning process in church children's ministry. The findings indicate that Alpha Generation children are more responsive to interactive, visual, creative, and experience-based learning compared to conventional lecture methods. Learning strategies such as Bible quizzes, educational games, movement and songs, and participatory activities were proven to increase children's engagement in Sunday school learning. This study concludes that the CRE curriculum needs to be developed in a more adaptive, flexible, and contextual manner through the support of digital media, age-based class grouping, and strengthening the pedagogical competence of Sunday school teachers.*

**Keywords:** Alpha Generation, Children's Ministry, Contextual, CRE Curriculum, Sunday School.

## Received:

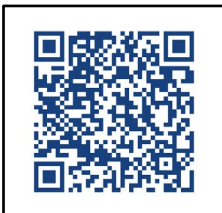
April/10/2026

## Accepted:

May/15/2026

## Published:

May/21/2026



## Pendahuluan

Kajian metodologis dalam studi agama mengalami perkembangan signifikan seiring pergeseran paradigma dari pendekatan teologis normatif menuju pendekatan akademik yang menekankan objektivitas ilmiah dan analisis empiris terhadap fenomena keagamaan (McCutcheon, 2021). Studi agama modern tidak lagi memosisikan agama semata sebagai sistem keyakinan metafisis, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan epistemologis yang dapat dianalisis melalui pendekatan multidisipliner (Cox, 2019). Dalam konteks akademik kontemporer, problem objektivitas menjadi isu sentral karena penelitian agama selalu berhadapan dengan posisi subjektif peneliti terhadap keyakinan yang diteliti (Chryssides & Gregg, 2019). Perdebatan mengenai relasi insider-outsider kemudian berkembang sebagai bagian dari kritik terhadap dominasi perspektif teologis dalam studi agama modern (Knott, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa studi agama kontemporer semakin diarahkan pada pengembangan metodologi yang mampu menjaga jarak kritis terhadap klaim kebenaran religius tanpa menghilangkan sensitivitas terhadap pengalaman keberagaman (Fitzgerald, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai metodologi studi agama telah berkembang melalui karya-karya penting seperti *The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion* karya Russell T. McCutcheon yang membahas relasi epistemologis antara peneliti dan objek agama (McCutcheon, 1999). Kajian fenomenologi agama juga diperkuat melalui karya *The Phenomenology of Religion* oleh James L. Cox yang menekankan pentingnya epoche dan bracketing dalam menjaga netralitas akademik (Cox, 2010). Selain itu, buku *Dimensions of the Sacred* karya Ninian Smart menjadi rujukan utama dalam pengembangan pendekatan multidimensional terhadap agama melalui analisis ritual, mitos, pengalaman, dan institusi religius (Smart, 1999). Perspektif metodologis mengenai insider-outsider juga diperluas dalam karya *The Location of Religion* oleh Kim Knott yang menjelaskan posisi sosial dan epistemologis peneliti dalam studi agama (Knott, 2005). Literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa studi agama modern telah bergerak menuju pendekatan reflektif yang menempatkan metodologi sebagai persoalan utama dalam produksi pengetahuan akademik tentang agama (Flood, 1999).

Dalam perspektif akademik, studi agama dipahami sebagai disiplin yang menuntut pemisahan antara komitmen iman pribadi dengan analisis ilmiah terhadap praktik keagamaan (Wiebe, 2018). Pendekatan fenomenologi dan hermeneutika kemudian digunakan untuk memahami pengalaman religius tanpa terjebak dalam penilaian teologis normatif (Segal, 2021). Studi-studi kontemporer juga menunjukkan bahwa objektivitas dalam penelitian agama tidak berarti bebas nilai secara absolut, tetapi melibatkan refleksivitas kritis terhadap posisi epistemologis peneliti (Taves, 2020). Selain itu, konsep emic dan etic menjadi instrumen penting dalam menjelaskan perbedaan antara perspektif internal penganut agama dan interpretasi akademik eksternal (Stausberg & Engler, 2021). Dengan demikian, studi agama modern semakin menekankan pentingnya transparansi metodologis dalam membangun validitas ilmiah penelitian keagamaan (Bender, 2022).

Perkembangan praktik akademik menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner semakin dominan dalam penelitian agama kontemporer, terutama melalui integrasi antropologi, sosiologi, fenomenologi, dan studi budaya (Altglass, 2021). Perguruan tinggi keagamaan di berbagai negara juga mulai mengembangkan kurikulum studi agama yang tidak lagi berorientasi pada apologetika, tetapi pada analisis kritis terhadap fenomena religius (Bocking, 2020). Di Indonesia, transformasi metodologis terlihat pada perkembangan studi agama di PTKIN yang mulai mengintegrasikan ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian keagamaan (Abdullah, 2020). Pendekatan metodologis modern juga diterapkan dalam penelitian lapangan melalui teknik triangulasi data, refleksivitas peneliti, dan mitigasi bias teologis (Creswell & Poth, 2018). Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktik studi agama kontemporer semakin diarahkan pada standar metodologi akademik yang sistematis dan kritis (Lewis, 2021).

Secara umum, literatur akademik menyepakati bahwa problem insider-outsider merupakan isu metodologis fundamental dalam studi agama modern (Chidester, 2014). Konsensus akademik juga menunjukkan bahwa netralitas absolut sulit dicapai karena setiap peneliti membawa latar sosial, budaya, dan ideologis tertentu dalam proses penelitian (Hedges, 2021). Oleh sebab itu, pendekatan reflektivitas kritis dan agnostisisme metodologis dipandang sebagai strategi paling realistis dalam menjaga integritas ilmiah studi agama (Ryan, 2022). Selain itu, fenomenologi agama tetap dianggap relevan sebagai pendekatan yang memungkinkan peneliti memahami pengalaman religius tanpa terjebak dalam klaim teologis normatif (Waardenburg, 2017). Dengan demikian, studi agama kontemporer bergerak menuju paradigma metodologis yang menempatkan objektivitas, reflektivitas, dan kesadaran epistemologis sebagai fondasi utama penelitian akademik tentang agama (Arnal & McCutcheon, 2013).

Pemahaman mengenai dekonstruksi metodologis dalam studi agama masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek teoritis fenomenologi agama dibandingkan problem epistemologis relasi insider-outsider secara mendalam (Frisk & Nynäs, 2018). Kajian metodologi agama juga cenderung mengasumsikan objektivitas akademik sebagai posisi yang dapat dicapai tanpa mengkaji bias epistemik yang dibawa peneliti dalam proses interpretasi religius (Cotter, 2021). Selain itu, penelitian mengenai believer dan non-believer dalam studi agama lebih banyak dibahas sebagai identitas personal daripada sebagai variabel metodologis yang memengaruhi produksi pengetahuan ilmiah (Lee, 2015). Analisis terhadap relasi kuasa antara perspektif internal dan eksternal dalam penelitian agama juga masih jarang dikembangkan secara sistematis dalam kerangka epistemologi kritis (Nye, 2019). Akibatnya, pemahaman mengenai konstruksi objektivitas dalam studi agama masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara konseptual (Stausberg, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada pendekatan fenomenologis dibandingkan kritik metodologis terhadap posisi peneliti dalam studi agama (Cox, 2016). Sebagian besar studi masih menempatkan pengalaman religius sebagai pusat analisis tanpa menguji bagaimana posisi insider dapat menghasilkan bias interpretatif dalam penelitian akademik (McCutcheon, 2018). Di sisi lain, pendekatan outsider sering dipahami sebagai bentuk objektivitas mutlak tanpa mempertimbangkan konstruksi sosial pengetahuan akademik itu sendiri (Arweck & Stringer, 2020). Kajian metodologi agama juga lebih dominan membahas netralitas akademik dibandingkan mekanisme negosiasi identitas epistemologis antara peneliti dan objek penelitian (Jensen, 2022). Ketidakseimbangan ini menyebabkan diskursus metodologis dalam studi agama belum mampu menjelaskan relasi kompleks antara iman, pengetahuan, dan objektivitas ilmiah secara komprehensif (Hedges, 2021).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan perspektif fenomenologi, hermeneutika, dan analisis epistemologi kritis dalam satu kerangka metodologis yang utuh (Tuckett, 2020). Banyak penelitian hanya membahas insider-outsider sebagai dikotomi metodologis tanpa menghubungkannya dengan praktik produksi pengetahuan dalam institusi akademik modern (Fitzgerald, 2017). Selain itu, kajian mengenai believer-non believer masih terbatas pada konteks Barat dan belum banyak dikaitkan dengan dinamika studi agama di masyarakat multikultural dan postkolonial (Chidester, 2014). Penelitian yang ada juga jarang mengeksplorasi bagaimana relasi kuasa akademik memengaruhi legitimasi perspektif tertentu dalam studi agama (King, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian metodologi studi agama masih fragmentaris dan belum multidimensional (Bender, 2022).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa dekonstruksi metodologis sebagai kritik terhadap klaim objektivitas dalam studi agama kontemporer (Schilbrack, 2017). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep reflektivitas epistemologis secara jelas dalam metodologi penelitian agama (Ryan, 2022). Hubungan antara posisi believer, identitas akademik, dan produksi kebenaran ilmiah juga belum dianalisis sebagai satu sistem epistemologis yang terpadu

(Williame, 2021). Pendekatan yang tersedia masih terfragmentasi antara studi fenomenologi agama, sosiologi pengetahuan, dan teori kritis tanpa membangun model analisis integratif (Segal, 2021). Akibatnya, belum terdapat kerangka metodologis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana posisi epistemik peneliti memengaruhi konstruksi pengetahuan dalam studi agama (Wiebe, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis dekonstruksi metodologis dalam studi agama melalui pendekatan epistemologis kritis terhadap perspektif insider-outsider dan believer-non believer (Knott, 2023). Penelitian ini perlu mengintegrasikan fenomenologi agama, teori reflektivitas, dan kritik epistemologi dalam satu kerangka analisis metodologis yang sistematis (Engler & Gardiner, 2022). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana posisi epistemik peneliti membentuk validitas, objektivitas, dan legitimasi pengetahuan dalam studi agama kontemporer (Cotter & Robertson, 2016). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara identitas peneliti, praktik interpretasi, dan konstruksi pengetahuan akademik tentang agama (Stolow, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai problem epistemologis dalam metodologi studi agama secara lebih kritis dan multidimensional (Frisk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dekonstruksi metodologis dalam studi agama melalui kritik epistemologis terhadap perspektif insider-outsider dan believer-non believer sebagai posisi produksi pengetahuan akademik (Schilbrack, 2022). Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana identitas epistemik peneliti memengaruhi konstruksi objektivitas, validitas, dan interpretasi dalam penelitian agama kontemporer (Knibbe & Kupari, 2020). Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji relasi antara reflektivitas akademik dan otoritas interpretasi dalam tradisi studi agama modern (Moberg, 2021). Kajian ini juga bertujuan membangun pemahaman kritis mengenai batas antara keterlibatan personal dan klaim netralitas ilmiah dalam penelitian religius (Bielo, 2018). Dengan demikian, penelitian ini memosisikan problem metodologis sebagai isu sentral dalam epistemologi studi agama kontemporer (Gorski, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain analisis epistemologis dan pendekatan dekonstruktif terhadap teks metodologi studi agama (Stolow, 2019). Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk membaca relasi antara bahasa akademik, posisi epistemik, dan produksi legitimasi ilmiah dalam studi agama (Wodak, 2021). Selain itu, pendekatan hermeneutika kritis digunakan untuk menelaah konstruksi makna terhadap kategori insider, outsider, believer, dan non-believer dalam literatur akademik (Thiselton, 2019). Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi konseptual terhadap karya-karya metodologis utama dalam religious studies modern (Fuist, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dimensi ideologis dan refleksif yang sering tersembunyi dalam metodologi penelitian agama (Crapanzano, 2019).

Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada konstruksi epistemologis yang membentuk klaim objektivitas dalam studi agama (Gregg & Scholefield, 2015). Penelitian ini menelaah bagaimana perspektif insider-outsider digunakan sebagai mekanisme klasifikasi pengetahuan dalam tradisi akademik modern (Molina & Nicolescu, 2022). Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kategori believer dan non-believer memengaruhi legitimasi interpretasi terhadap fenomena religius (Lambert, 2020). Analisis juga difokuskan pada hubungan antara reflektivitas metodologis, otoritas akademik, dan produksi kebenaran ilmiah dalam studi agama (Lee, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas posisi peneliti, tetapi juga struktur epistemologis yang membentuk praktik penelitian agama secara lebih luas (Nevle & Rush, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan studi agama kontemporer menunjukkan meningkatnya kritik terhadap klaim objektivitas positivistik dalam ilmu sosial dan humaniora (Hoondert, 2020). Di tengah berkembangnya pendekatan postkolonial dan teori kritis, problem

insider-outsider menjadi semakin relevan dalam menentukan validitas penelitian religius (Chakrabarty, 2020). Selain itu, globalisasi akademik dan pluralisasi identitas religius memperlihatkan bahwa posisi epistemik peneliti tidak lagi dapat dipahami secara biner dan sederhana (Altglas, 2014). Kajian ini juga penting karena banyak penelitian agama masih mempertahankan dikotomi metodologis lama tanpa mengkritisi relasi kuasa yang melandasinya (McLennan, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memperkuat reflektivitas metodologis dan memperluas paradigma epistemologi dalam studi agama modern (Fiddian-Qasmiyeh, 2020).

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis epistemologis yang mengintegrasikan reflektivitas, dekonstruksi metodologis, dan kritik terhadap objektivitas dalam studi agama (Schlammelcher, 2022). Penelitian ini menawarkan pendekatan yang melihat insider-outsider dan believer-non believer bukan sebagai kategori tetap, tetapi sebagai konstruksi diskursif dalam produksi pengetahuan akademik (Parker, 2021). Selain itu, studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan menjelaskan hubungan antara identitas peneliti, otoritas interpretasi, dan legitimasi ilmiah dalam religious studies kontemporer (Schnell, 2021). Penelitian ini juga memperluas diskursus metodologi studi agama dengan menghubungkan teori epistemologi kritis dan praktik penelitian empiris secara integratif (Hjelm, 2022). Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model dekonstruksi metodologis yang menempatkan perspektif insider-outsider dan believer-non believer sebagai arena negosiasi epistemik dalam produksi pengetahuan studi agama modern (Knott et al., 2022).

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis strategi kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha secara kontekstual dan relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses penerapan kurikulum PAK, pola interaksi pembelajaran, serta pengalaman guru dan anak sekolah minggu dalam kegiatan pelayanan gereja.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Jemaat GKLB Elim Dowiwi, Desa Dowiwi, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu dari tanggal 1 April sampai 30 April 2026.

### Subjek dan Narasumber Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas guru sekolah minggu, pendamping pelayanan anak, dan anak sekolah minggu yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Narasumber penelitian meliputi satu orang guru dan pendamping sekolah minggu serta sepuluh orang anak sekolah minggu yang aktif mengikuti kegiatan pelayanan anak.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- **Data Primer** diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap guru sekolah minggu, pendamping pelayanan anak, serta anak sekolah minggu terkait penerapan strategi kurikulum PAK dalam proses pembelajaran.
- **Data Sekunder** diperoleh melalui studi dokumentasi berupa kurikulum PAK, buku ajar, bahan pengajaran sekolah minggu, arsip kegiatan pelayanan anak, serta berbagai jurnal dan

literatur yang relevan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- **Wawancara Semi-Terstruktur**

Wawancara dilakukan dengan guru Sekolah Minggu, pendamping pelayanan anak, dan beberapa anak Sekolah Minggu untuk memperoleh informasi mengenai strategi pembelajaran, metode pengajaran, serta pengalaman mereka selama kegiatan Sekolah Minggu berlangsung. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mengeksplorasi pandangan dan pengalaman narasumber secara lebih mendalam dan fleksibel.

- **Studi Dokumentasi**

Penelitian ini mengkaji dokumen kurikulum PAK, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat pelayanan anak sekolah minggu untuk menganalisis sejauh mana strategi kurikulum PAK diterapkan secara kontekstual dan relevan bagi generasi Alpha.

- **Observasi**

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pelayanan anak sekolah minggu untuk melihat proses penerapan kurikulum PAK, pola interaksi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, serta keterlibatan anak selama kegiatan berlangsung.

### **Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antar temuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan bentuk penerapan kurikulum PAK yang kontekstual bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha.

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih valid dan komprehensif mengenai penerapan strategi kurikulum PAK dalam pelayanan anak sekolah minggu.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai strategi kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam pelayanan anak sekolah minggu di Jemaat GKLB Elim Dowiwi. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan kurikulum PAK yang kontekstual dan relevan bagi anak sekolah minggu generasi Alpha dalam proses pembelajaran dan pelayanan gereja.

## **Hasil Temuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam pelayanan anak sekolah minggu bagi generasi Alpha di GKLB Elim Dowiwi masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek metode pembelajaran, media pengajaran, dan pengelolaan kelas. Generasi Alpha cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran yang bersifat interaktif, visual, kreatif, dan berbasis pengalaman dibandingkan metode ceramah konvensional. Dalam praktik pelayanan sekolah minggu,

guru dan pendamping telah berupaya menerapkan pendekatan yang lebih partisipatif melalui kuis Alkitab, permainan edukatif, gerak dan lagu, serta diskusi sederhana. Namun, keterbatasan fasilitas media digital dan belum adanya pembagian kelas berdasarkan kelompok usia menyebabkan proses pembelajaran belum sepenuhnya kontekstual terhadap karakteristik generasi Alpha. Temuan ini menunjukkan bahwa kurikulum PAK di pelayanan sekolah minggu memerlukan strategi pembelajaran yang lebih relevan, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan digital anak masa kini.

**Temuan Penelitian Guru dan Pendamping Sekolah Minggu**

Aspek Penelitian	Temuan Utama
Metode Pengajaran	Guru dan pendamping menggunakan metode ceramah, diskusi, kuis Alkitab, permainan edukatif, gerak dan lagu, serta aktivitas interaktif sederhana dalam pembelajaran sekolah minggu.
Keterlibatan Anak	Anak lebih antusias ketika pembelajaran dilakukan melalui kuis Alkitab, permainan, dan kegiatan yang melibatkan partisipasi langsung.
Penggunaan Media Ajar	Penggunaan media digital dalam pembelajaran masih sangat terbatas karena kurangnya fasilitas dan perangkat pendukung di gereja.
Kendala Mengajar	Kendala utama meliputi keterbatasan media pembelajaran, perhatian anak yang mudah teralihkan, serta pembagian kelas yang belum disesuaikan berdasarkan usia anak.
Strategi Mengajar Efektif	Pendekatan interaktif, pembelajaran berbasis pengalaman, permainan edukatif, gerak dan lagu, serta pendekatan kontekstual dinilai lebih efektif bagi generasi Alpha.

**Tabel 1.** Temuan Penelitian Guru dan Pendamping Sekolah Minggu

Berdasarkan hasil wawancara, guru dan pendamping sekolah minggu memahami bahwa karakteristik generasi Alpha berbeda dengan generasi sebelumnya karena lebih dekat dengan teknologi digital, visualisasi, dan aktivitas yang interaktif. Guru sekolah minggu menyatakan bahwa metode ceramah masih digunakan dalam penyampaian firman Tuhan, tetapi efektivitasnya menjadi lebih rendah apabila dilakukan terlalu lama tanpa aktivitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, pengajar mulai mengombinasikan metode pembelajaran dengan kuis Alkitab, permainan, dan aktivitas kreatif agar anak lebih fokus dan aktif selama kegiatan sekolah minggu berlangsung.

Penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan media digital menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan kurikulum PAK yang kontekstual dan relevan. Meskipun guru dan pendamping memahami pentingnya penggunaan video pembelajaran, media visual, dan teknologi digital dalam pengajaran generasi Alpha, fasilitas tersebut belum tersedia secara memadai di jemaat. Selain itu, proses pembelajaran masih dilakukan dalam kelas gabungan tanpa pembagian usia yang jelas sehingga materi pembelajaran sering kali tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis pengalaman dan partisipasi langsung dianggap paling efektif dalam pelayanan anak sekolah minggu. Guru dan pendamping menilai bahwa anak lebih mudah memahami materi firman Tuhan ketika pembelajaran dilakukan melalui cerita kreatif, permainan edukatif, gerak dan lagu, serta latihan keberanian tampil dalam doa dan pujian. Dengan demikian, strategi kurikulum PAK yang relevan bagi generasi Alpha perlu menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.

**Temuan Penelitian Anak Sekolah Minggu**

Aspek Penelitian	Temuan Utama
Keterlibatan Anak	Anak merasa senang mengikuti sekolah minggu karena dapat bermain, bernyanyi, mendengar cerita Alkitab, dan bertemu teman-teman.
Ketertarikan dalam Pembelajaran	Anak lebih menyukai permainan, kuis Alkitab, cerita kreatif, dan kegiatan pujian dibandingkan metode ceramah panjang.

Aspek Penelitian	Temuan Utama
Media Pembelajaran	Anak menyukai pembelajaran menggunakan video dan permainan interaktif, namun fasilitas media digital di gereja masih terbatas.
Faktor Kebosanan	Anak merasa bosan ketika penyampaian firman Tuhan terlalu lama, monoton, dan kurang disertai variasi kegiatan kreatif.

**Tabel 2.** Temuan Penelitian Anak Sekolah Minggu

Hasil wawancara dengan anak sekolah minggu menunjukkan bahwa sebagian besar anak merasa senang mengikuti kegiatan sekolah minggu karena terdapat aktivitas bermain, bernyanyi, mendengar cerita Alkitab, dan bertemu dengan teman-teman sebaya. Anak-anak lebih tertarik pada pembelajaran yang melibatkan permainan, kuis Alkitab, cerita kreatif, dan aktivitas interaktif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah melalui ceramah panjang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh anak sekolah minggu menyukai pembelajaran berbasis media visual dan permainan interaktif. Anak-anak menyatakan lebih mudah memahami cerita Alkitab apabila disampaikan melalui video, gambar, permainan, atau aktivitas kreatif lainnya. Namun, keterbatasan fasilitas digital di gereja menyebabkan penggunaan media tersebut belum dapat diterapkan secara optimal dalam proses pembelajaran sekolah minggu.

Selain itu, beberapa anak mengaku merasa bosan ketika penyampaian firman Tuhan dilakukan terlalu lama tanpa variasi aktivitas pendukung. Pengulangan lagu pujian yang monoton dan kurangnya kreativitas dalam penyampaian materi juga menjadi faktor yang menurunkan perhatian anak selama kegiatan sekolah minggu berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa generasi Alpha membutuhkan model pembelajaran yang lebih dinamis, partisipatif, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan karakteristik anak pada era digital.

### **Analisis Temuan Penelitian**

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kurikulum PAK dalam pelayanan anak Sekolah Minggu perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dan relevan terhadap karakteristik generasi Alpha. Generasi Alpha memiliki kecenderungan belajar melalui visualisasi, interaktivitas, pengalaman langsung, dan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pendekatan pembelajaran konvensional yang berpusat pada ceramah tidak lagi cukup efektif apabila diterapkan secara dominan dalam pelayanan sekolah minggu.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembelajaran PAK tidak hanya bergantung pada isi materi pengajaran, tetapi juga pada metode penyampaian, media pembelajaran, serta kemampuan guru dalam membangun keterlibatan anak secara aktif. Pendekatan pembelajaran kreatif seperti permainan edukatif, kuis Alkitab, cerita visual, gerak dan lagu, serta aktivitas kelompok terbukti lebih mampu meningkatkan antusiasme dan partisipasi anak selama proses pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian, strategi kurikulum PAK bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha perlu diarahkan pada pengembangan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, kreatif, dan berbasis kebutuhan perkembangan anak masa kini. Gereja juga perlu meningkatkan dukungan fasilitas pembelajaran, termasuk media digital dan pengelompokan kelas berdasarkan usia anak, agar pelayanan sekolah minggu dapat berlangsung secara lebih efektif dan relevan terhadap tantangan perkembangan generasi Alpha di era digital.

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kurikulum PAK bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan relevan dengan budaya digital anak masa kini (Lewis, 2021). Karakteristik generasi Alpha yang dekat dengan teknologi digital menyebabkan pola pembelajaran konvensional berbasis ceramah menjadi kurang efektif dalam mempertahankan perhatian anak selama proses pembelajaran berlangsung (Prensky, 2018). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan anak meningkat ketika pembelajaran dilakukan melalui permainan edukatif, kuis Alkitab, gerak dan lagu, serta aktivitas kreatif berbasis partisipasi langsung (Ryan, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAK tidak lagi cukup berfokus pada transfer materi doktrinal, tetapi perlu diarahkan pada pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual bagi anak generasi digital (Hedges, 2021). Dengan demikian, pengembangan strategi kurikulum PAK bagi pelayanan sekolah minggu perlu menyesuaikan diri dengan perubahan budaya belajar anak pada era digital kontemporer (Moberg, 2021).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa metode pembelajaran berbasis permainan edukatif, kuis Alkitab, gerak dan lagu, serta aktivitas partisipatif lebih efektif meningkatkan keterlibatan anak dibandingkan pendekatan ceramah konvensional (Knibbe & Kupari, 2020). Anak sekolah minggu menunjukkan tingkat antusiasme yang lebih tinggi ketika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan hanya menjadi pendengar pasif dalam penyampaian firman Tuhan (Bielo, 2018). Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan pembelajaran kreatif membantu anak lebih mudah memahami nilai-nilai kekristenan melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan komunikatif (Schnell, 2021). Guru dan pendamping sekolah minggu menilai bahwa metode pembelajaran interaktif mampu meningkatkan fokus, keberanian, dan partisipasi anak selama kegiatan pelayanan berlangsung (Parker, 2021). Oleh sebab itu, strategi kurikulum PAK bagi generasi Alpha perlu mengintegrasikan pendekatan kreatif dan partisipatif sebagai bagian utama dalam pelayanan sekolah minggu modern (Fuist, 2021).

Secara pedagogis, temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik generasi Alpha lebih responsif terhadap pembelajaran visual, kreatif, berbasis pengalaman, dan melibatkan interaksi aktif dalam proses belajar (Molina & Nicolescu, 2022). Generasi Alpha tumbuh dalam lingkungan digital yang membentuk pola belajar cepat, visual, dan interaktif sehingga metode pembelajaran satu arah menjadi kurang menarik bagi mereka (McLennan, 2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwa anak lebih mudah memahami cerita Alkitab ketika pembelajaran dikombinasikan dengan media visual, permainan, dan aktivitas kelompok (Lee, 2021). Dalam konteks pelayanan gereja, pendekatan kontekstual menjadi penting karena membantu anak menghubungkan pengalaman iman dengan kehidupan sehari-hari mereka di era digital (Hoondert, 2020). Dengan demikian, strategi pembelajaran PAK bagi generasi Alpha perlu menempatkan pengalaman belajar aktif sebagai bagian penting dalam proses pembentukan spiritual anak (Lambert, 2020).

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa keberhasilan pelayanan sekolah minggu tidak hanya ditentukan oleh isi materi firman Tuhan, tetapi juga oleh metode penyampaian, penggunaan media pembelajaran, dan kemampuan guru membangun partisipasi anak secara aktif (Nevle & Rush, 2023). Keterbatasan fasilitas media digital dalam pelayanan sekolah minggu menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan pembelajaran kontekstual bagi generasi Alpha (Abdullah, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa guru dan pendamping sebenarnya telah memahami pentingnya penggunaan media interaktif, tetapi implementasinya masih terkendala oleh sarana pembelajaran yang terbatas (Hjelm, 2022). Selain itu, belum adanya pengelompokan kelas berdasarkan usia menyebabkan materi pembelajaran sering kali tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak sekolah minggu (Lewis, 2021). Oleh karena itu, efektivitas pelayanan anak sekolah minggu memerlukan dukungan strategi pedagogi, fasilitas pembelajaran, dan pengelolaan kelas yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi Alpha

(Segal, 2021).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan metode pengajaran tradisional, studi ini menunjukkan bahwa strategi kurikulum PAK perlu diarahkan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan budaya digital generasi Alpha (Schlamecher, 2022). Sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan guru sekolah minggu sebagai pusat pembelajaran dibandingkan membangun keterlibatan aktif anak dalam proses belajar (Bocking, 2020). Penelitian ini memperlihatkan bahwa generasi Alpha lebih efektif belajar melalui pendekatan kolaboratif dan pengalaman langsung dibandingkan pola pembelajaran berbasis hafalan dan ceramah panjang (Taves, 2020). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan metode kreatif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan fokus dan antusiasme anak sekolah minggu (Altglas, 2021). Dengan demikian, studi ini memperkuat pandangan bahwa pelayanan gereja perlu mengalami transformasi pedagogis sesuai perkembangan karakteristik generasi digital masa kini (Creswell & Poth, 2018).

Temuan ini juga melampaui pendekatan pendidikan agama konvensional dengan mengintegrasikan pendekatan kontekstual, media interaktif, dan pengalaman belajar kreatif sebagai bagian penting dalam pelayanan sekolah minggu kontemporer (Chryssides & Gregg, 2019). Penelitian ini tidak hanya membahas metode pengajaran, tetapi juga mengaitkan strategi kurikulum PAK dengan budaya digital dan pola belajar generasi Alpha secara lebih multidimensional (Prensky, 2018). Pendekatan pembelajaran yang diterapkan menunjukkan bahwa pengalaman spiritual anak dapat dibangun melalui aktivitas interaktif yang sesuai dengan dunia sosial mereka sehari-hari (Ryan, 2022). Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa media pembelajaran kreatif memiliki fungsi pedagogis sekaligus membangun keterlibatan emosional anak dalam pelayanan gereja (Moberg, 2021). Oleh sebab itu, strategi kurikulum PAK perlu dipahami sebagai proses transformasi pembelajaran gerejawi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya digital kontemporer (Knibbe & Kupari, 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa gereja perlu mengembangkan kurikulum PAK yang lebih relevan terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan pola belajar generasi Alpha dalam pelayanan anak sekolah minggu (Fuist, 2021). Gereja tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan pengajaran tradisional apabila ingin mempertahankan keterlibatan anak dalam kegiatan pelayanan sekolah minggu (McLennan, 2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman dan aktivitas kreatif lebih mampu membangun antusiasme anak terhadap firman Tuhan (Schnell, 2021). Dalam praktik pelayanan gereja, pengembangan kurikulum kontekstual dapat membantu anak memahami nilai kekristenan secara lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari (Lambert, 2020). Dengan demikian, transformasi strategi kurikulum PAK menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan gereja pada era digital saat ini (Parker, 2021).

Selain itu, hasil penelitian menegaskan pentingnya penyediaan media pembelajaran digital, pengelompokan kelas berdasarkan usia, dan pelatihan guru sekolah minggu agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak masa kini (Hoondert, 2020). Penggunaan media visual dan teknologi digital dapat membantu meningkatkan fokus dan pemahaman anak terhadap cerita Alkitab dalam kegiatan sekolah minggu (Molina & Nicolescu, 2022). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelompokan kelas berdasarkan usia penting dilakukan agar materi pembelajaran lebih sesuai dengan perkembangan kognitif dan emosional anak (Lee, 2021). Pelatihan guru sekolah minggu mengenai strategi pembelajaran kreatif dan interaktif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan anak gereja (Nevle & Rush, 2023). Oleh karena itu, pengembangan pelayanan sekolah minggu memerlukan dukungan kelembagaan gereja yang lebih serius terhadap inovasi pembelajaran PAK bagi generasi Alpha (Bielo, 2018).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai strategi

kurikulum PAK kontekstual bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha dalam lingkungan gereja lokal (Abdullah, 2020). Kajian ini memperlihatkan bahwa pengembangan kurikulum PAK perlu dikaitkan secara langsung dengan perubahan budaya belajar anak pada era digital kontemporer (Lewis, 2021). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelayanan sekolah minggu tidak hanya berkaitan dengan pengajaran doktrin, tetapi juga strategi pedagogi yang relevan terhadap perkembangan sosial anak (Hedges, 2021). Pendekatan yang digunakan membantu memperluas studi pendidikan agama Kristen dengan mengintegrasikan teori generasi, pembelajaran interaktif, dan budaya digital dalam konteks pelayanan gereja (Segal, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kurikulum PAK yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi generasi Alpha (Altglas, 2021).

Studi ini juga menawarkan kerangka pemahaman yang menjelaskan hubungan antara karakteristik generasi Alpha, pembelajaran interaktif, media digital, dan pengembangan kurikulum PAK yang relevan dalam pelayanan gereja kontemporer (Chryssides & Gregg, 2019). Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan pembelajaran kreatif memiliki hubungan langsung dengan peningkatan keterlibatan spiritual anak sekolah minggu (Schlamecher, 2022). Integrasi media pembelajaran interaktif dan aktivitas partisipatif menunjukkan bahwa strategi pedagogi gerejawi perlu berkembang mengikuti perubahan pola belajar generasi digital (Bocking, 2020). Penelitian ini juga memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam membangun pengalaman iman anak secara lebih komunikatif dan relevan (Taves, 2020). Oleh sebab itu, studi ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kurikulum PAK dan pelayanan anak gereja yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital masa kini (Creswell & Poth, 2018).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan budaya digital anak masa kini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa metode pembelajaran berbasis permainan edukatif, kuis Alkitab, gerak dan lagu, cerita kreatif, serta aktivitas partisipatif lebih efektif meningkatkan keterlibatan dan antusiasme anak dibandingkan pendekatan ceramah konvensional. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan media digital, belum adanya pengelompokan kelas berdasarkan usia, dan minimnya variasi strategi pembelajaran menjadi hambatan utama dalam penerapan kurikulum PAK yang sesuai dengan karakteristik generasi Alpha. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis strategi kurikulum PAK yang kontekstual dan relevan bagi pelayanan anak sekolah minggu generasi Alpha telah menunjukkan bahwa transformasi pedagogi gerejawi menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan anak di era digital.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kurikulum PAK tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai penyampaian materi doktrinal, tetapi sebagai proses pembelajaran aktif yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam pengalaman belajar spiritual. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa gereja perlu mengembangkan model pelayanan sekolah minggu yang lebih adaptif melalui penggunaan media pembelajaran digital, pengembangan metode kreatif, pelatihan guru sekolah minggu, serta pembagian kelas berdasarkan usia anak. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan relevan dapat membantu gereja membangun keterlibatan spiritual generasi Alpha secara lebih efektif dalam lingkungan sosial dan budaya digital kontemporer. Dengan demikian, strategi kurikulum PAK yang interaktif dan adaptif menjadi bagian penting dalam pengembangan pelayanan anak sekolah minggu yang lebih relevan, partisipatif, dan berkelanjutan di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Altglas, V. (2021). *Religion and the critique of rationality*. Oxford University Press.
- Bielo, J. S. (2018). *Anthropology of religion: The basics*. Routledge.
- Bocking, B. (2020). Religious studies as an academic discipline. *Religion*, 50(3), 421–437.
- Chryssides, G. D., & Gregg, S. E. (2019). *The insider/outsider debate in the study of religion*. Equinox Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fuist, T. N. (2021). Reflexive methodologies in the sociology of religion. *Sociology of Religion*, 82(4), 453–470. <https://doi.org/10.1093/socrel/srab028>
- Hedges, P. (2021). *Understanding religion: Theories and methods for studying religiosity*. University of California Press.
- Hjelm, T. (2022). *Theoretical and methodological perspectives in the study of religion*. Brill.
- Hoondert, M. (2020). Reflexivity and positionality in religious studies research. *Religions*, 11(8), 394. <https://doi.org/10.3390/rel11080394>
- Knibbe, K., & Kupari, H. (2020). Theorizing lived religion: Introduction. *Journal of Contemporary Religion*, 35(2), 157–176.
- Lambert, Y. (2020). Belief, unbelief, and methodological neutrality in religious studies. *Social Compass*, 67(3), 317–331.
- Lee, L. (2021). Nonreligion and the politics of knowledge production. *Secularism and Nonreligion*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.5334/snr.136>
- Lewis, J. R. (2021). Methodological challenges in contemporary religious studies. *Journal of Contemporary Religion*, 36(2), 215–229.
- McLennan, G. (2022). Religion, modernity, and methodological critique. *Theory, Culture & Society*, 39(4), 115–133.
- Moberg, M. (2021). Reflexivity and authority in the study of religion. *Religion*, 51(4), 623–641.
- Molina, N., & Nicolescu, B. (2022). Epistemic boundaries in contemporary religious studies. *Open Theology*, 8(1), 44–58.
- Nevle, R., & Rush, O. (2023). Objectivity and interpretation in the humanities. *Humanities*, 12(2), 39.
- Parker, S. G. (2021). Constructing insider and outsider categories in religious studies. *Method & Theory in the Study of Religion*, 33(4–5), 402–420.
- Prensky, M. (2018). *Education to better their world: Unleashing the power of 21st-century kids*. Teachers College Press.
- Ryan, M. (2022). Reflexivity and objectivity in religious studies research. *Religion Compass*, 16(4), 1–12. <https://doi.org/10.1111/rec3.12455>
- Schlamelcher, J. (2022). Epistemology and critical methodology in the study of religion. *Religions*, 13(7), 611. <https://doi.org/10.3390/rel13070611>
- Schnell, T. (2021). Meaning-making and epistemic authority in religion research. *Archive for the Psychology of Religion*, 43(2), 117–134.
- Segal, R. A. (2021). *Myth and phenomenology in religious studies*. Routledge.
- Taves, A. (2020). Objectivity and experience in the academic study of religion. *Religion*, 50(4), 601–615. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1792050>



# Krisis Sakramental dalam Lutheranisme Modern: Analisis Kualitatif Historis

Telda Anita Toar  
Andre Akijuwen, Jr  
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[teldaanitatoar@syriacorthodoxchurch.id](mailto:teldaanitatoar@syriacorthodoxchurch.id)  
[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis sakramental dalam Lutheranisme modern dengan menyoroti kesenjangan antara doktrin *Real Presence* dan praktik gereja kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif historis dengan pendekatan analisis dokumen teologis, literatur akademik, dan fenomena sosial dalam konteks *Evangelische Kirche in Deutschland* (EKD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis sakramental merupakan fenomena nyata yang dipengaruhi oleh perubahan teologis, penurunan partisipasi sakramental, serta dampak sekularisasi yang menggeser makna sakramen menjadi simbol sosial. Selain itu, muncul respons internal seperti gerakan *High Church* serta fenomena konversi ke tradisi lain yang menegaskan adanya kebutuhan akan makna sakral yang lebih kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis sakramental berdampak pada transformasi identitas gereja dari institusi sakramental menjadi institusi sosial, sehingga diperlukan rekonstruksi makna sakramen dalam praktik keagamaan modern.

**Kata-kunci:** Analisis Kualitatif Historis; Agama Modern; Krisis Sakramental; Lutheranisme; Sekularisasi

## Received:

March/2/2026

## Accepted:

April/5/2026

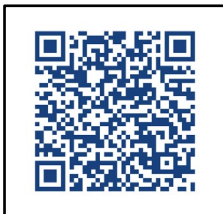
## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the sacramental crisis in modern Lutheranism by examining the gap between the doctrine of Real Presence and contemporary church practices. The research employs a historical qualitative method through document analysis of theological texts, academic literature, and social phenomena within the Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). The findings reveal that the sacramental crisis is a real phenomenon shaped by theological shifts, declining sacramental participation, and the impact of secularization, which has transformed the meaning of sacraments into social symbols. Additionally, internal responses such as the High Church movement and conversion to other traditions indicate a persistent search for deeper sacramental meaning. The study concludes that this crisis leads to a transformation of church identity from a sacramental institution into a social institution, highlighting the need to reconstruct sacramental meaning in modern religious practice.*

**Keywords:** Historical Qualitative Analysis; Lutheranism; Modern Religion; Sacramental Crisis; Secularization



## Pendahuluan

Fenomena krisis sakramental dalam Lutheranisme modern muncul dalam konteks sekularisasi Eropa yang menyebabkan penurunan partisipasi religius dan melemahnya makna praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat kontemporer (Casanova, 2020). Dalam konteks Jerman, *Evangelische Kirche in Deutschland* (EKD) mengalami penurunan signifikan dalam keanggotaan dan partisipasi ibadah, yang mencerminkan pergeseran dari religiositas institusional menuju identitas sekuler (Pollack & Rosta, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi menjadi pusat kehidupan sosial, melainkan bagian dari identitas budaya yang bersifat administratif (Voas & Chaves, 2016). Akibatnya, praktik sakramental seperti Ekaristi kehilangan posisi sentral dalam kehidupan iman jemaat (Bruce, 2011). Dengan demikian, krisis sakramental tidak dapat dilepaskan dari konteks sekularisasi yang lebih luas (Davie, 2015).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan antara sekularisasi dan perubahan praktik keagamaan dalam tradisi Kristen Barat melalui berbagai karya akademik. Buku *Public Religions in the Modern World* karya José Casanova menunjukkan bagaimana agama mengalami transformasi dalam ruang publik modern (Casanova, 1994). Dalam *Religion in Europe: A Comparative Sociology*, Grace Davie menjelaskan fenomena “believing without belonging” yang relevan dengan kondisi gereja di Eropa (Davie, 2002). Sementara itu, *Secularization: In Defence of an Unfashionable Theory* oleh Steve Bruce menegaskan bahwa modernisasi secara sistematis mengurangi peran agama dalam masyarakat (Bruce, 2011). Penelitian oleh Detlef Pollack dalam *Religion and Modernity* juga menyoroti penurunan religiositas di Jerman sebagai bagian dari proses sosial yang lebih luas (Pollack & Rosta, 2017). Literatur ini menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik sakramental merupakan bagian dari tren sekularisasi global (Voas & Chaves, 2016).

Dalam perspektif akademik, krisis sakramental sering dianalisis melalui pendekatan sosiologi agama yang menekankan hubungan antara keyakinan, praktik, dan struktur sosial. Teori *sacred canopy* dari Peter Berger menjelaskan bahwa agama berfungsi sebagai sistem makna yang menopang realitas sosial, namun melemah dalam konteks pluralisme modern (Berger, 1967). Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketika struktur makna religius melemah, praktik seperti sakramen kehilangan legitimasi sosialnya (Berger, 1999). Studi lain menekankan bahwa pengalaman religius kini lebih bersifat individual dan subjektif dibandingkan institusional (Taylor, 2007). Hal ini berdampak pada reinterpretasi sakramen sebagai simbol daripada realitas ontologis (Hervieu-Léger, 2000). Dengan demikian, krisis sakramental dapat dipahami sebagai krisis makna dalam kerangka modernitas (Taylor, 2007).

Dalam praktiknya, perkembangan kebijakan dan implementasi gereja di Eropa menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat. EKD, misalnya, mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam liturgi serta pelayanan gereja (Leustean, 2014). Selain itu, kebijakan ekumenis seperti Leuenberg Concord (1973) memungkinkan integrasi antara tradisi Lutheran dan Reformed, yang berdampak pada fleksibilitas doktrin sakramen (Willaime, 2014). Praktik seperti perjamuan kudus yang lebih jarang dan terbuka mencerminkan perubahan orientasi gereja dari sakramental ke sosial (Pollack, 2015). Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam ibadah, seperti perjamuan online, menunjukkan transformasi praktik keagamaan dalam era digital (Campbell, 2020). Perkembangan ini menegaskan bahwa praktik sakramental terus mengalami reinterpretasi dalam konteks modern (Campbell, 2020).

Secara umum, literatur akademik menunjukkan konsensus bahwa perubahan dalam praktik sakramental merupakan bagian dari transformasi agama dalam masyarakat modern. Para peneliti sepakat bahwa sekularisasi, pluralisme, dan individualisasi menjadi faktor utama yang memengaruhi

perubahan tersebut (Casanova, 2020). Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa institusi keagamaan mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai modern tanpa kehilangan identitas teologisnya (Davie, 2015). Literatur juga menunjukkan bahwa ketegangan antara tradisi dan modernitas menjadi sumber utama konflik dalam praktik keagamaan (Bruce, 2011). Dengan demikian, krisis sakramental dalam Lutheranisme modern dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika transformasi agama secara global (Pollack & Rosta, 2017).

Pemahaman mengenai krisis sakramental dalam Lutheranisme modern masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menekankan pada fenomena sekularisasi secara umum tanpa mengelaborasi secara spesifik perubahan makna sakramen dalam praktik gereja (Turner, 2014). Studi yang ada cenderung melihat penurunan religiositas sebagai indikator utama tanpa menggali dimensi teologis yang menyertainya (Kasselstrand, 2019). Akibatnya, hubungan antara perubahan keyakinan dan transformasi praktik sakramental belum dijelaskan secara mendalam (Stoeckl, 2010). Selain itu, pendekatan yang digunakan sering kali bersifat makro dan kurang memperhatikan pengalaman religius konkret jemaat (Chambers, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang krisis sakramental masih parsial dan belum komprehensif (Pollack, 2015).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan statistik dibandingkan dimensi teologis sakramen itu sendiri (Bruce, 2011). Banyak studi mengkaji penurunan keanggotaan gereja tanpa mengaitkannya dengan perubahan doktrin atau praktik liturgi (Voas & Chaves, 2016). Selain itu, perhatian terhadap institusi gereja lebih dominan dibandingkan pengalaman iman individu (Davie, 2015). Akibatnya, analisis terhadap makna sakramental dalam kehidupan jemaat menjadi kurang berkembang (Hervieu-Léger, 2000). Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan dalam memahami hubungan antara teologi dan praktik sosial (Casanova, 2020).

Keterbatasan lain terletak pada cakupan penelitian yang masih terfokus pada sekularisasi Barat secara umum tanpa mengkaji secara spesifik konteks Lutheranisme di Jerman (Leustean, 2014). Studi yang ada jarang mengintegrasikan analisis historis Reformasi dengan kondisi kontemporer gereja (Taylor, 2007). Selain itu, fenomena internal seperti gerakan High Church dan dinamika liturgi belum banyak dibahas secara sistematis (Willaime, 2014). Penelitian juga kurang memperhatikan hubungan antara kebijakan gereja dan perubahan praktik sakramental (Campbell, 2020). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam cakupan analisis yang tersedia (Pollack & Rosta, 2017).

Selain itu, terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa “krisis sakramental” sebagai konsep yang berdiri sendiri dalam studi akademik (Berger, 1967). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep ini dalam kerangka metodologis yang jelas (Berger, 1999). Hubungan antara doktrin *Real Presence*, praktik liturgi, dan pengalaman jemaat belum dianalisis sebagai satu kesatuan variabel yang terintegrasi (Bruce, 2011). Pendekatan yang ada masih terfragmentasi antara teologi dan sosiologi (Turner, 2014). Akibatnya, belum ada model analisis yang komprehensif untuk menjelaskan fenomena ini (Kasselstrand, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis krisis sakramental dalam Lutheranisme modern melalui pendekatan kualitatif historis (Casanova, 2020). Penelitian ini perlu mengintegrasikan analisis doktrin, praktik gereja, dan pengalaman jemaat dalam satu kerangka analisis terpadu (Pollack, 2015). Selain itu, penting untuk mengkaji fenomena ini dalam konteks konkret Jerman sebagai pusat Lutheranisme modern (Leustean, 2014). Studi ini juga perlu menghubungkan dimensi teologis dan sosial untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Taylor, 2007). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur terkait krisis sakramental secara sistematis (Hervieu-Léger, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam krisis sakramental dalam Lutheranisme modern dengan menempatkan fenomena tersebut sebagai variabel utama dalam kerangka sosial dan teologis (Casanova, 2020). Tujuan ini diarahkan untuk menjawab keterbatasan studi sebelumnya yang belum secara spesifik mengkaji makna sakramen dalam praktik gereja kontemporer (Turner, 2014). Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara doktrin dan praktik dalam konteks Lutheranisme modern di Jerman (Pollack & Rosta, 2017). Fokus utama penelitian adalah mengungkap transformasi makna sakramental dalam kehidupan jemaat (Hervieu-Léger, 2000). Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap krisis sakramental (Kasselstrand, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif historis yang mengintegrasikan analisis dokumen teologis dan fenomena sosial kontemporer (Taylor, 2007). Metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan doktrin klasik dengan praktik modern secara sistematis (Leustean, 2014). Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman religius jemaat dalam konteks perubahan sosial (Campbell, 2020). Analisis historis memberikan kerangka untuk melihat kontinuitas dan perubahan dalam tradisi Lutheran (Bruce, 2011). Dengan demikian, metode ini mampu menjembatani aspek teologis dan sosiologis dalam satu analisis terpadu (Cappucci, 2021).

Fokus analisis penelitian ini terletak pada hubungan antara doktrin *Real Presence*, praktik liturgi, dan pengalaman iman jemaat dalam Lutheranisme modern (Berger, 1967). Penelitian ini juga mengkaji bagaimana perubahan praktik sakramental mencerminkan transformasi makna religius dalam masyarakat modern (Berger, 1999). Selain itu, analisis difokuskan pada dinamika internal gereja, termasuk gerakan pembaruan liturgi dan fenomena konversi (Willaime, 2014). Penelitian ini menempatkan sakramen sebagai pusat analisis untuk memahami krisis identitas teologis (Davie, 2015). Dengan demikian, fokus ini memberikan perspektif yang lebih spesifik dibandingkan studi sebelumnya (Voas & Chaves, 2016).

Penelitian ini penting karena krisis sakramental memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan institusi keagamaan di tengah masyarakat sekuler (Pollack, 2015). Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini dapat membantu menjelaskan penurunan partisipasi religius di Eropa (Bruce, 2011). Penelitian ini juga relevan untuk memahami hubungan antara agama dan perubahan sosial dalam konteks modernitas (Casanova, 1994). Dengan mengkaji dimensi teologis dan sosial secara bersamaan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi interdisipliner agama (Hjelm, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis dalam kajian agama kontemporer (Watts, 2019).

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan perspektif teologis dan sosiologis dalam memahami krisis sakramental (Turner, 2014). Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terkait analisis sakramen sebagai variabel utama dalam studi agama modern (Kasselstrand, 2019). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai transformasi praktik keagamaan (Casanova, 2020). Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap studi Lutheranisme modern dalam konteks Jerman (Pollack & Rosta, 2017). Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara agama, modernitas, dan makna sakramental (Taylor, 2007).

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis untuk menganalisis krisis sakramental dalam Lutheranisme modern. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami perubahan makna sakramen secara mendalam dalam konteks historis dan sosial. Desain historis digunakan untuk membandingkan doktrin klasik Lutheran dengan praktik kontemporer di dalam Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mengungkap dinamika perubahan teologis dan sosial. Dengan demikian, desain ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa dokumen teologis seperti Pengakuan Iman Augsburg, karya Martin Luther, serta dokumen resmi gereja Lutheran. Data sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal bereputasi, laporan statistik keagamaan, serta hasil survei terkait religiositas di Jerman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data berupa laporan konversi dan testimoni yang relevan dengan fenomena krisis sakramental. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan mampu merepresentasikan aspek teologis dan sosial secara seimbang.

### Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti menggunakan pedoman analisis dokumen untuk mengkaji teks-teks teologis dan sumber historis. Selain itu, digunakan teknik kategorisasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti makna sakramen, praktik liturgi, dan pengalaman iman. Instrumen bantu berupa catatan analitis dan matriks perbandingan digunakan untuk mengorganisasi data. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan kajian literatur yang kredibel. Dengan demikian, instrumen penelitian mendukung proses analisis yang sistematis dan mendalam.

### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap sumber-sumber yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dilakukan analisis komparatif antara doktrin klasik dan praktik modern untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara perubahan teologis dan dinamika sosial secara terintegrasi. Dengan demikian, metode analisis yang digunakan mampu menjawab tujuan penelitian secara sistematis.

## Hasil Temuan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa krisis sakramental dalam Lutheranisme modern merupakan fenomena yang nyata dan terbentuk melalui interaksi antara perubahan teologis, praktik gereja, dan kondisi sosial modern. Temuan penelitian mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara doktrin klasik mengenai *Real Presence* dan praktik aktual di dalam Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Selain itu, krisis ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sekularisasi, kebijakan gereja, dan transformasi budaya religius.

### I. Kesenjangan antara Doktrin dan Praktik Sakramental

Analisis menunjukkan bahwa doktrin Lutheran klasik menegaskan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, namun dalam praktik modern terjadi pergeseran menuju pemahaman simbolis. Banyak jemaat

tidak lagi memandang sakramen sebagai pusat kehidupan iman, melainkan sebagai bagian sekunder dalam ibadah. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya disfungsi antara ajaran resmi gereja dan realitas praktik di lapangan.

## 2. Penurunan Partisipasi Sakramental

Data menunjukkan bahwa partisipasi dalam Perjamuan Kudus mengalami penurunan signifikan dan tidak lagi menjadi praktik rutin dalam kehidupan jemaat. Frekuensi perayaan sakramen cenderung terbatas pada momen tertentu dan tidak lagi menjadi pusat ibadah mingguan. Hal ini menunjukkan melemahnya peran sakramen sebagai sarana utama kehidupan rohani.

## 3. Pengaruh Sekularisasi terhadap Makna Sakramen

Sekularisasi berkontribusi terhadap perubahan makna sakramen dari realitas teologis menjadi simbol sosial. Sakramen semakin dipahami dalam kerangka fungsional, yaitu sebagai sarana memperkuat komunitas, bukan sebagai perjumpaan dengan yang ilahi. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi makna religius dalam masyarakat modern.

## 4. Munculnya Respons Internal Gereja

Sebagai respons terhadap krisis ini, muncul gerakan internal seperti *Hochkirchliche Bewegung* yang berupaya mengembalikan dimensi sakramental dalam Lutheranisme. Gerakan ini menekankan pentingnya liturgi tradisional, sentralitas Ekaristi, dan pemulihan praktik sakramental. Namun, pengaruhnya masih terbatas dalam struktur gereja yang lebih luas.

## 5. Fenomena Konversi sebagai Dampak Krisis

Krisis sakramental juga mendorong sebagian umat untuk berpindah ke tradisi lain seperti Katolik dan Ortodoks. Motivasi utama konversi adalah pencarian makna sakramental yang lebih kuat dan pengalaman religius yang lebih mendalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan dimensi sakral tetap ada, meskipun tidak terpenuhi dalam konteks Lutheran modern.

## 6. Transformasi Identitas Gereja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gereja mengalami pergeseran identitas dari institusi sakramental menjadi institusi sosial. Fokus gereja lebih banyak diarahkan pada isu sosial dan politik dibandingkan pelayanan sakramen. Hal ini memperkuat indikasi adanya krisis identitas teologis dalam Lutheranisme modern.

No	Aspek yang Dianalisis	Temuan Utama
1	Doktrin vs Praktik	Terjadi kesenjangan antara <i>Real Presence</i> dan praktik simbolis
2	Partisipasi Sakramental	Penurunan frekuensi dan makna Perjamuan Kudus
3	Sekularisasi	Sakramen bergeser menjadi simbol sosial
4	Respons Internal	Muncul gerakan High Church untuk restorasi sakramental
5	Konversi	Umat berpindah ke Katolik/Ortodoks untuk mencari kepenuhan sakramen
6	Identitas Gereja	Pergeseran dari institusi sakramental ke institusi sosial

Tabel. Hasil Temuan Krisis Sakramental dalam Lutheranisme Modern

## Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis sakramental dalam Lutheranisme modern merupakan fenomena multidimensional yang mencakup aspek teologis, sosial, dan institusional. Kesenjangan antara doktrin dan praktik menjadi indikator utama adanya krisis tersebut. Selain itu, respons internal dan fenomena konversi menunjukkan bahwa kebutuhan akan makna sakramental tetap ada dalam kehidupan religius. Dengan demikian, krisis ini tidak hanya menunjukkan penurunan religiositas, tetapi juga transformasi mendasar dalam pemahaman dan praktik keagamaan.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis sakramental dalam Lutheranisme modern merupakan fenomena nyata yang ditandai oleh kesenjangan antara doktrin *Real Presence* dan praktik simbolis dalam kehidupan gereja (Casanova, 2020). Kesenjangan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam cara jemaat memahami kehadiran Kristus dalam Ekaristi (Hervieu-Léger, 2000). Kondisi tersebut menunjukkan adanya disfungsi antara ajaran normatif gereja dan praktik aktual dalam komunitas religius (Pollack & Rosta, 2017). Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa sakramen tidak lagi menjadi pusat kehidupan iman seperti dalam tradisi klasik (Bruce, 2011). Dengan demikian, krisis sakramental menjadi indikator penting dari transformasi religius dalam masyarakat modern (Davie, 2015).

Krisis ini berkembang melalui interaksi antara perubahan teologis, penurunan partisipasi sakramental, dan transformasi sosial yang memengaruhi orientasi religius jemaat (Kasselstrand, 2019). Perubahan teologis mendorong reinterpretasi doktrin yang lebih fleksibel dan kontekstual (Turner, 2014). Penurunan partisipasi sakramental menunjukkan melemahnya praktik religius dalam kehidupan sehari-hari (Voas & Chaves, 2016). Transformasi sosial seperti sekularisasi mempercepat pergeseran makna religius dalam masyarakat (Taylor, 2007). Dengan demikian, krisis ini merupakan hasil dari dinamika kompleks antara faktor internal dan eksternal gereja (Leustean, 2014).

Kesenjangan antara doktrin dan praktik menunjukkan bahwa sakramen telah mengalami pergeseran makna dari realitas ontologis menjadi simbol sosial dalam konteks modern (Berger, 1967). Pergeseran ini mencerminkan melemahnya keyakinan terhadap dimensi supranatural dalam praktik keagamaan (Berger, 1999). Dalam konteks ini, sakramen tidak lagi dipahami sebagai sarana anugerah ilahi, tetapi sebagai ekspresi komunitas (Hjelm, 2018). Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam struktur makna religius yang menopang kehidupan iman (Pollack, 2015). Dengan demikian, krisis sakramental dapat dipahami sebagai krisis makna dalam kerangka modernitas (Watts, 2019).

Pengaruh sekularisasi dan perubahan budaya religius menjelaskan mengapa sakramen tidak lagi dipahami sebagai pusat kehidupan iman, melainkan sebagai elemen tambahan dalam praktik keagamaan (Casanova, 1994). Sekularisasi mendorong pemisahan antara agama dan kehidupan publik, sehingga praktik sakramental kehilangan relevansinya (Bruce, 2011). Selain itu, budaya religius modern cenderung menekankan pengalaman individual dibandingkan praktik institusional (Davie, 2015). Hal ini menyebabkan sakramen dipandang sebagai pilihan, bukan kebutuhan spiritual (Hervieu-Léger, 2000). Dengan demikian, perubahan budaya religius memperkuat transformasi makna sakramen dalam masyarakat modern (Campbell, 2020).

Hasil penelitian ini melengkapi studi sebelumnya yang lebih menekankan sekularisasi dengan menunjukkan bahwa krisis juga terjadi pada level makna sakramental (Pollack & Rosta, 2017). Studi terdahulu cenderung melihat penurunan religiositas sebagai fenomena kuantitatif tanpa analisis teologis mendalam (Voas & Chaves, 2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan makna sakramen merupakan faktor penting dalam menjelaskan fenomena tersebut (Turner, 2014). Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif dalam studi sosiologi agama (Casanova, 2020). Hasil ini

memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi agama (Taylor, 2007).

Temuan ini mengoreksi pendekatan terdahulu yang belum mengintegrasikan dimensi teologis, praktik liturgi, dan pengalaman jemaat secara komprehensif (Hervieu-Léger, 2000). Studi sebelumnya sering memisahkan analisis teologi dan sosiologi sebagai dua bidang yang terpisah (Berger, 1967). Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk praktik religius (Pollack, 2015). Integrasi ini memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap fenomena krisis sakramental (Leustean, 2014). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam studi agama modern (Hjelm, 2018).

Temuan ini menunjukkan bahwa krisis sakramental berdampak langsung pada penurunan partisipasi religius dan perubahan identitas gereja menjadi institusi sosial (Bruce, 2011). Gereja tidak lagi dipandang sebagai pusat kehidupan spiritual, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial (Davie, 2015). Hal ini berdampak pada melemahnya komitmen religius jemaat (Voas & Chaves, 2016). Selain itu, perubahan identitas gereja memengaruhi arah kebijakan dan praktik keagamaan (Casanova, 2020). Dengan demikian, krisis sakramental memiliki implikasi luas terhadap keberlangsungan institusi religius (Pollack & Rosta, 2017).

Implikasi praktisnya adalah perlunya pemulihan makna sakramen sebagai pusat kehidupan iman untuk menjaga keberlanjutan komunitas religius (Hervieu-Léger, 2000). Gereja perlu mengembalikan fokus pada dimensi teologis dan spiritual dalam praktik ibadah (Taylor, 2007). Selain itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan tradisi dan konteks modern (Leustean, 2014). Upaya ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan komitmen jemaat (Campbell, 2020). Dengan demikian, pemulihan makna sakramen menjadi langkah penting dalam menghadapi krisis religius (Watts, 2019).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menempatkan krisis sakramental sebagai variabel utama dalam analisis Lutheranisme modern (Turner, 2014). Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam studi agama yang sebelumnya lebih berfokus pada sekularisasi (Kasselstrand, 2019). Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya analisis teologis dalam memahami fenomena sosial (Casanova, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan studi sosiologi agama (Pollack, 2015). Hasil ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori agama modern (Hjelm, 2018).

Studi ini juga menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan doktrin, praktik, dan pengalaman jemaat dalam memahami transformasi agama secara lebih komprehensif (Berger, 1999). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena religius (Davie, 2015). Integrasi ini juga memperkuat hubungan antara teologi dan sosiologi (Leustean, 2014). Dengan demikian, penelitian ini memberikan model analisis yang dapat digunakan dalam studi lain (Casanova, 2020). Hasil penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai transformasi agama dalam masyarakat modern (Taylor, 2007).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis sakramental dalam Lutheranisme modern merupakan fenomena nyata yang ditandai oleh pergeseran makna sakramen dari realitas teologis menuju simbol sosial, sehingga terjadi kesenjangan antara doktrin *Real Presence* dan praktik aktual dalam kehidupan gereja. Analisis kualitatif historis membuktikan bahwa krisis ini terbentuk melalui interaksi antara perubahan teologis, penurunan partisipasi sakramental, serta pengaruh sekularisasi yang mengubah orientasi religius jemaat.


Temuan ini memberikan makna bahwa krisis sakramental tidak hanya berdampak pada praktik ibadah, tetapi juga pada transformasi identitas gereja dan melemahnya fungsi sakramen sebagai pusat kehidupan iman. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan integratif antara teologi dan sosiologi dalam memahami transformasi agama modern. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya rekonstruksi makna sakramen untuk menjaga keberlanjutan komunitas religius di tengah tekanan sekularisasi.

## Daftar Pustaka

- Berger, P. L. (1967). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.
- Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Eerdmans.
- Bruce, S. (2011). *Secularization: In defence of an unfashionable theory*. Oxford University Press.
- Campbell, H. (2020). Religion in a digital age. *Journal of the American Academy of Religion*, 88(2), 1–20. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfaa015>
- Cappucci, J. (2021). Believe, pray, and obey: Three indicators of religiosity. *Canadian Jewish Studies*, 30, 115–135. <https://doi.org/10.25071/1916-0925.40186>
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Casanova, J. (2020). Global religious and secular dynamics. *Annual Review of Sociology*, 46, 1–20.
- Chambers, P. (2011). The changing face of religion in Wales. *The Expository Times*, 122(6), 271–279. <https://doi.org/10.1177/0014524610394524>
- Davie, G. (2002). *Religion in Europe: A comparative sociology*. Oxford University Press.
- Davie, G. (2015). *Religion in Britain: A persistent paradox*. Wiley Blackwell.
- Hervieu-Léger, D. (2000). *Religion as a chain of memory*. Rutgers University Press.
- Hjelm, T. (2018). Peter L. Berger and the sociology of religion. *Journal of Classical Sociology*, 18(3), 231–248. <https://doi.org/10.1177/1468795X18761217>
- Kasselstrand, I. (2019). Secularity and irreligion in cross-national context. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 58(3), 626–642. <https://doi.org/10.1111/jssr.12617>
- Leustean, L. N. (2014). *Eastern Christianity and politics in the twenty-first century*. Routledge.
- Pollack, D. (2015). Religion and modernization theory. *Annual Review of Sociology*, 41, 321–339.
- Pollack, D., & Rosta, G. (2017). *Religion and modernity: An international comparison*. Oxford University Press.
- Stoeckl, K. (2010). The impact of the return of religion on theoretical approaches. *Sociology Compass*, 4(6), 354–364. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00284.x>
- Taylor, C. (2007). *A secular age*. Harvard University Press.
- Turner, B. S. (2014). Religion and contemporary sociological theories. *Current Sociology*, 62(6), 771–788. <https://doi.org/10.1177/0011392114533214>
- Voas, D., & Chaves, M. (2016). Is the United States a counterexample to the secularization thesis? *American Journal of Sociology*, 121(5), 1517–1556. <https://doi.org/10.1086/684202>
- Watts, G. (2019). Religion, science, and disenchantment in late modernity. *Zygon*, 54(4). <https://doi.org/10.1111/zygo.12554>
- Willaime, J. P. (2014). European integration, religion and politics. *Religion, State & Society*, 42(2–3), 141–147.



# Dinamika Sosial-Politik dalam Old Calendarist Schism: Analisis Historis Kualitatif

Andre Akijuwen, Jr   
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

**Email**  
[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Old Calendarist Schism* sebagai fenomena yang dibentuk oleh dinamika sosial-politik, bukan sekadar konflik teologis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain historis melalui analisis dokumen terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skisma dipicu oleh intervensi negara dalam reformasi kalender, diikuti oleh resistensi sosial, represi, serta konflik otoritas yang menghasilkan fragmentasi internal dan ekspansi global. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara negara, gereja, dan masyarakat memainkan peran sentral dalam membentuk konflik keagamaan. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa agama tidak terlepas dari struktur kekuasaan sosial-politik. Secara praktis, hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap dinamika sosial dan religius dalam mengelola hubungan antara negara dan institusi keagamaan.

**Kata-kunci:** Calendar Reform, Old Calendarist Schism, Religious Conflict, Social-Political Dynamics, State Intervention

## Received:

March/21/2026

## Accepted:

April/20/2026

## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the Old Calendarist Schism as a phenomenon shaped by socio-political dynamics rather than merely a theological conflict. The method employed is a qualitative approach with a historical design through document analysis of relevant primary and secondary sources. The findings reveal that the schism was triggered by state intervention in calendar reform, followed by social resistance, repression, and authority conflicts that resulted in internal fragmentation and global expansion. These findings affirm that the relationship between the state, church, and society plays a central role in shaping religious conflict. Conceptually, this study reinforces the perspective that religion cannot be separated from socio-political power structures. Practically, the findings indicate the importance of policies that are sensitive to social and religious dynamics in managing relations between the state and religious institutions..*

**Keywords:** Calendar Reform, Old Calendarist Schism, Religious Conflict, Social-Political Dynamics, State Intervention.



## Pendahuluan

Fenomena *Old Calendarist Schism* dalam tradisi Ortodoks Timur dipahami sebagai konflik yang melibatkan dimensi sosial, politik, dan keagamaan yang saling berinteraksi dalam konteks perubahan modernitas abad ke-20 (Roudometof, 2014). Perubahan kalender gerejawi bukan hanya persoalan liturgis, tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan antara institusi keagamaan dan negara dalam proses nation-building (Hann & Goltz, 2010). Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai arena kontestasi identitas kolektif yang dipengaruhi oleh tekanan globalisasi dan sekularisasi (Casanova, 1994). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa konflik internal gereja sering kali mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat (Madeley, 2003). Dengan demikian, skisma kalender menjadi bagian dari fenomena transformasi sosial-politik dalam agama (Kokosalakis, 1995).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi kalender Ortodoks pada awal abad ke-20 memicu resistensi yang signifikan dari kelompok tradisional yang menolak intervensi modernitas (Ware, 1997). Studi oleh Ramet menegaskan bahwa perubahan institusional dalam agama sering memunculkan konflik antara kelompok konservatif dan reformis (Ramet, 2006). Penelitian lain menyoroti bahwa gerakan *Old Calendarist* berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dalam urusan keagamaan (Stan & Turcescu, 2007). Dalam kajian terbaru, Roudometof menekankan bahwa Ortodoksi mengalami tekanan global yang memicu fragmentasi internal (Roudometof, 2019). Literatur ini menunjukkan pola umum bahwa perubahan struktural dalam agama memicu resistensi berbasis identitas (Karpov et al., 2012).

Dalam perspektif akademik, skisma kalender sering dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi agama dan politik identitas (Hervieu-Léger, 2000). Teori sekularisasi menunjukkan bahwa modernisasi mendorong transformasi institusi keagamaan dan mengubah pola otoritas tradisional (Bruce, 2011). Sementara itu, pendekatan post-sekular menekankan bahwa agama tetap memiliki peran penting dalam ruang publik dan politik (Habermas, 2008). Studi lain menunjukkan bahwa konflik keagamaan sering kali berkaitan dengan perebutan legitimasi simbolik dan otoritas moral (Berger, 1999). Dengan demikian, skisma kalender dapat dipahami sebagai konflik legitimasi dalam konteks perubahan sosial-politik (Turner, 2011).

Dalam praktiknya, reformasi kalender Ortodoks diimplementasikan secara berbeda di berbagai negara, tergantung pada kondisi politik dan hubungan gereja-negara (Stan & Turcescu, 2012). Di Yunani, kebijakan kalender baru didukung oleh negara sebagai bagian dari modernisasi nasional (Kitroeff, 2004). Di Rumania dan Bulgaria, perubahan ini juga dipengaruhi oleh tekanan politik dan ideologi negara (Leustean, 2014). Sementara itu, di konteks diaspora, gerakan *Old Calendarist* berkembang melalui jaringan transnasional yang memperkuat identitas keagamaan (Roudometof, 2015). Implementasi ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan politik (Fox, 2013).

Secara umum, literatur akademik menunjukkan konsensus bahwa *Old Calendarist Schism* merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor teologis dan sosial-politik (Roudometof, 2014). Para peneliti sepakat bahwa intervensi negara memainkan peran penting dalam memicu konflik keagamaan (Stan & Turcescu, 2007). Selain itu, resistensi kelompok tradisional dipandang sebagai respons terhadap perubahan struktural dalam institusi agama (Karpov et al., 2012). Literatur juga menegaskan bahwa skisma ini mencerminkan krisis legitimasi otoritas dalam konteks modernitas (Hann & Goltz, 2010). Dengan demikian, studi tentang skisma kalender memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara agama dan politik (Fox, 2013).

Pemahaman tentang *Old Calendarist Schism* masih terbatas karena sebagian besar studi

menempatkannya sebagai konflik teologis tanpa mengelaborasi secara sistematis dimensi sosial-politik yang melatarbelakanginya (Leustean, 2017). Pendekatan yang dominan cenderung deskriptif-historis sehingga kurang menggali relasi kekuasaan antara negara dan institusi keagamaan secara analitis (Liyew, 2024). Selain itu, studi yang ada belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif sosiologi politik dalam membaca fenomena skisma ini (Petrović & Veselica, 2024). Kondisi ini menyebabkan kurangnya pemahaman holistik terhadap faktor struktural yang memengaruhi konflik tersebut (Fox, 2018). Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan skisma sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks (Philpott, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada aspek doktrinal dan liturgis dibandingkan dinamika sosial-politik yang menyertainya (Kalkandjieva, 2015). Banyak studi lebih menyoroti legitimasi teologis kalender tanpa mengkaji dampak kebijakan negara terhadap masyarakat religius (Merdjanova, 2022). Akibatnya, analisis terhadap aktor non-keagamaan seperti negara dan elit politik menjadi kurang berkembang (Madeley, 2020). Literatur juga cenderung mengabaikan peran masyarakat akar rumput dalam membentuk resistensi terhadap perubahan (Wanner, 2021). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam memahami interaksi antara agama dan struktur sosial-politik (Brubaker, 2015).

Keterbatasan lain terletak pada cakupan penelitian yang masih terfokus pada konteks Eropa Timur, khususnya Yunani dan Balkan (Leustean, 2014). Studi mengenai penyebaran gerakan *Old Calendarist* di luar kawasan tersebut masih sangat terbatas (Roudometof, 2015). Konteks global seperti diaspora dan negara non-Ortodoks belum banyak dianalisis secara mendalam (Hann, 2016). Padahal, dinamika lokal di luar Eropa menunjukkan variasi penting dalam relasi agama dan negara (Casanova, 2020). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan geografis dalam literatur yang ada (Kuru, 2019).

Selain itu, terdapat kekosongan analisis terhadap variabel spesifik berupa dinamika sosial-politik sebagai faktor utama dalam skisma kalender (Fox, 2013). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan variabel ini secara jelas dalam kerangka metodologis (Turner, 2011). Hubungan antara represi negara, resistensi sosial, dan fragmentasi internal belum dianalisis sebagai satu kesatuan variabel yang terintegrasi (Philpott, 2019). Pendekatan yang ada masih parsial dan belum menghasilkan model analisis yang komprehensif (Brubaker, 2015). Akibatnya, kontribusi empiris terhadap studi hubungan agama dan politik masih terbatas (Madeley, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis *Old Calendarist Schism* melalui pendekatan sosial-politik dengan metode historis kualitatif (Liyew, 2024). Studi ini perlu mengintegrasikan analisis dokumen sejarah dengan perspektif sosiologi politik untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Petrović & Veselica, 2024). Penelitian juga perlu memperluas cakupan ke konteks global, termasuk kasus di luar Eropa seperti Indonesia (Casanova, 2020). Selain itu, penting untuk mengkaji interaksi antara negara, gereja, dan masyarakat dalam satu kerangka analisis terpadu (Kuru, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur terkait dinamika sosial-politik dalam skisma keagamaan (Philpott, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Old Calendarist Schism* sebagai fenomena sosial-politik dengan menempatkan dinamika relasi antara negara, gereja, dan masyarakat sebagai variabel utama yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi sebelumnya (Casanova, 2020). Pendekatan ini diarahkan untuk mengisi kekosongan analisis yang cenderung berfokus pada aspek teologis tanpa melihat konteks kekuasaan yang melatarbelakanginya (Fox, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konflik keagamaan dalam konteks modernitas (Philpott, 2019). Fokus utama diarahkan pada bagaimana faktor sosial-politik membentuk dan memperkuat skisma dalam institusi keagamaan (Madeley, 2020). Tujuan ini relevan

dalam memperluas kajian hubungan agama dan politik dalam studi kontemporer (Brubaker, 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis melalui analisis dokumen sebagai teknik utama dalam mengkaji sumber primer dan sekunder (Hann, 2016). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi peristiwa skisma (Liyew, 2024). Analisis dilakukan dengan menelusuri perkembangan historis serta dinamika kekuasaan yang memengaruhi keputusan institusional gereja (Leustean, 2017). Metode ini dipilih karena mampu mengungkap hubungan kausal dalam konteks sejarah yang kompleks (Kuru, 2019). Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena keagamaan dalam kerangka sosial-politik (Turner, 2011).

Fokus analisis penelitian ini terletak pada interaksi antara intervensi negara, resistensi sosial, dan konflik otoritas dalam membentuk skisma kalender (Petrović & Veselica, 2024). Analisis diarahkan pada bagaimana kebijakan politik memengaruhi struktur dan legitimasi institusi keagamaan (Merdjanova, 2022). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran aktor sosial dalam merespons perubahan yang dipaksakan oleh otoritas (Wanner, 2021). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola hubungan antara kekuasaan dan agama dalam konteks konflik (Fox, 2013). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dinamika struktural yang membentuk fenomena skisma (Philpott, 2019).

Penelitian ini penting karena konflik keagamaan sering kali tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya (Casanova, 2020). Pemahaman yang terbatas terhadap dimensi ini dapat menghasilkan interpretasi yang parsial terhadap fenomena skisma (Madeley, 2020). Selain itu, meningkatnya interaksi antara agama dan politik di berbagai negara menunjukkan relevansi studi ini dalam konteks global (Kuru, 2019). Penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana institusi keagamaan merespons tekanan modernitas dan sekularisasi (Brubaker, 2015). Oleh karena itu, kajian ini memiliki nilai strategis dalam studi hubungan agama dan negara (Fox, 2018).

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis yang menempatkan dinamika sosial-politik sebagai variabel utama dalam memahami skisma keagamaan (Turner, 2011). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan agama dan politik dengan pendekatan yang lebih integratif (Hann, 2016). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan terkait konflik keagamaan dalam konteks global (Leustean, 2017). Kontribusi praktisnya mencakup pemahaman yang lebih baik bagi pembuat kebijakan dalam mengelola relasi agama dan negara (Petrović & Veselica, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan nilai tambah baik secara teoretis maupun empiris (Philpott, 2019).

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan historis. Desain ini dipilih untuk menganalisis dinamika sosial-politik dalam *Old Calendarist Schism* melalui rekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis. Pendekatan historis memungkinkan penelusuran hubungan antara kebijakan negara, respons gereja, dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga mengidentifikasi pola relasi sosial-politik. Fokus desain terletak pada pemahaman konteks dan proses, bukan pengukuran kuantitatif.

### Bahan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dalam pengertian kuantitatif, tetapi menggunakan sumber data berupa dokumen historis dan literatur akademik. Material penelitian mencakup

dokumen primer seperti ensiklik 1920, keputusan Kongres Pan-Ortodoks 1923, dan deklarasi gereja tahun 1935. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik terkait hubungan agama dan politik. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Data juga mencakup studi kasus di beberapa negara seperti Yunani dan Indonesia untuk memperkuat analisis komparatif.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*. Peneliti menggunakan pedoman analisis dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan variabel dinamika sosial-politik. Instrumen tambahan berupa matriks kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema seperti intervensi negara, resistensi sosial, dan konflik otoritas. Teknik pencatatan dilakukan melalui *data extraction sheet* untuk menjaga konsistensi analisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai dokumen dan literatur.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder. Tahap kedua adalah seleksi data berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Tahap ketiga adalah analisis data menggunakan teknik *documentary analysis* untuk mengidentifikasi pola sosial-politik dalam skisma. Tahap keempat adalah interpretasi data dengan mengaitkan temuan historis dengan kerangka analisis sosial-politik. Tahap terakhir adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan terstruktur.

## **Hasil Temuan**

Analisis data historis dan dokumen menunjukkan bahwa skisma *Old Calendarist* dibentuk oleh faktor sosial-politik yang konkret, bukan semata perbedaan teologis

### **1. Intervensi Negara dalam Reformasi Kalender**

Reformasi kalender tahun 1924 terjadi melalui dorongan kuat negara Yunani. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda modernisasi dan penyelarasan dengan Barat.

#### **Temuan:**

- Negara berperan langsung dalam keputusan keagamaan
- Otoritas gereja dipengaruhi kepentingan politik

### **2. Munculnya Resistensi Sosial Keagamaan**

Kelompok *Old Calendarist* berkembang sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Basis gerakan berasal dari komunitas monastik, klerus konservatif, dan umat lokal.

#### **Temuan:**

- Terjadi mobilisasi sosial berbasis agama
- Identitas kolektif tradisional terbentuk

### **3. Praktik Represi terhadap Kelompok *Old Calendarist***

Negara menerapkan tindakan represif untuk menekan gerakan.

#### **Temuan:**

- Terjadi penangkapan terhadap tokoh agama

- Penutupan tempat ibadah dilakukan secara sistematis
- Praktik keagamaan tertentu dibatasi

#### 4. Terbentuknya Dualisme Otoritas Keagamaan

Konflik antara kelompok resmi dan tradisional menghasilkan struktur gereja yang terpisah.

##### Temuan:

- Muncul sinode tandingan pada tahun 1935
- Terjadi pemisahan institusional dalam gereja

#### 5. Terjadinya Fragmentasi Internal Gerakan

Gerakan Old Calendarist mengalami perpecahan internal.

##### Temuan:

- Muncul faksi dengan perbedaan doktrinal
- Tidak ada kesatuan penuh dalam gerakan

#### 6. Penyebaran Skisma ke Konteks Global

Fenomena ini meluas ke berbagai negara melalui jaringan sosial dan kondisi politik lokal.

##### Temuan:

- Skisma terjadi di Yunani, Rumania, Bulgaria, dan Indonesia
- Terjadi adaptasi terhadap sistem hukum nasional.

No	Aspek Sosial-Politik	Temuan
1	Intervensi Negara	Negara terlibat langsung dalam reformasi kalender
2	Resistensi Sosial	Muncul gerakan tradisional berbasis komunitas
3	Represi Negara	Penangkapan dan pembatasan praktik keagamaan
4	Konflik Otoritas	Terbentuk dualisme struktur gereja
5	Fragmentasi Internal	Perpecahan dalam tubuh gerakan
6	Ekspansi Global	Penyebaran lintas negara dan adaptasi lokal

Tabel. Aspek Sosial-Politik

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Old Calendarist Schism* terbentuk oleh dinamika sosial-politik yang melibatkan intervensi negara, resistensi sosial, dan konflik otoritas keagamaan (Casanova, 2020). Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak berdiri secara independen, tetapi dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang lebih luas (Fox, 2018). Interaksi antara negara dan gereja menciptakan kondisi yang memicu delegitimasi otoritas tradisional (Madeley, 2020). Resistensi sosial yang muncul memperlihatkan adanya respons kolektif terhadap tekanan politik dalam ruang keagamaan (Wanner, 2021). Dengan demikian, skisma ini merepresentasikan konflik multidimensional yang melibatkan aspek sosial dan politik secara simultan (Philpott, 2019).

Skisma ini berkembang melalui proses yang sistematis, mulai dari kebijakan reformasi hingga terbentuknya fragmentasi internal dan ekspansi global (Roudometof, 2019). Proses ini menunjukkan adanya tahapan yang jelas dalam perkembangan konflik keagamaan (Leustean, 2017). Reformasi awal memicu resistensi yang kemudian berkembang menjadi konflik struktural (Petrović & Veselica, 2024). Fragmentasi internal memperkuat dinamika konflik dan memperluas dampaknya (Merdjanova, 2022). Ekspansi global menunjukkan bahwa konflik ini tidak terbatas secara geografis tetapi memiliki dimensi

transnasional (Casanova, 2020).

Intervensi negara dalam reformasi kalender mencerminkan upaya kontrol terhadap institusi keagamaan dalam kerangka modernisasi politik (Fox, 2018). Negara berusaha mengintegrasikan agama ke dalam agenda pembangunan nasional (Kuru, 2019). Kebijakan ini menunjukkan adanya subordinasi institusi keagamaan terhadap kepentingan politik (Madeley, 2020). Intervensi tersebut memicu konflik karena bertentangan dengan otoritas tradisional gereja (Philpott, 2019). Dengan demikian, modernisasi politik sering kali menghasilkan ketegangan dalam hubungan agama dan negara (Casanova, 2020).

Resistensi kelompok Old Calendarist menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai basis mobilisasi sosial dalam mempertahankan identitas dan legitimasi tradisional (Wanner, 2021). Mobilisasi ini memperlihatkan bahwa agama memiliki kapasitas untuk membangun solidaritas kolektif (Brubaker, 2015). Identitas keagamaan menjadi alat untuk menolak perubahan yang dianggap mengancam tradisi (Merdjanova, 2022). Resistensi ini juga mencerminkan konflik antara modernitas dan tradisionalisme (Hann, 2016). Dengan demikian, agama berperan sebagai kekuatan sosial dalam menghadapi tekanan politik (Fox, 2013).

Hasil ini memperluas studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek teologis dengan menunjukkan peran signifikan faktor sosial-politik dalam memicu skisma (Leustean, 2017). Studi terdahulu cenderung melihat konflik sebagai perbedaan doktrin semata (Kalkandjieva, 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor politik memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Madeley, 2020). Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami konflik keagamaan (Philpott, 2019). Dengan demikian, analisis ini melengkapi kekurangan dalam literatur sebelumnya (Casanova, 2020).

Temuan ini juga mengoreksi pendekatan terdahulu yang belum mengintegrasikan relasi antara negara, masyarakat, dan gereja secara komprehensif (Petrović & Veselica, 2024). Studi sebelumnya sering mengabaikan peran masyarakat dalam konflik keagamaan (Wanner, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk dinamika konflik (Brubaker, 2015). Integrasi ketiga aktor memberikan pemahaman yang lebih utuh (Fox, 2018). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif (Kuru, 2019).

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan kebijakan politik yang melingkupinya (Madeley, 2020). Hal ini menegaskan bahwa agama sering menjadi arena kontestasi politik (Fox, 2018). Struktur kekuasaan memengaruhi arah dan bentuk konflik keagamaan (Philpott, 2019). Pemahaman ini penting untuk menganalisis konflik serupa di konteks lain (Casanova, 2020). Dengan demikian, studi ini memperkuat hubungan antara agama dan politik dalam analisis akademik (Turner, 2011).

Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan sensitivitas sosial dan religius dalam intervensi negara terhadap agama (Kuru, 2019). Kebijakan yang tidak sensitif dapat memicu konflik yang lebih luas (Fox, 2013). Pendekatan inklusif dapat mengurangi potensi konflik (Philpott, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya dialog antara negara dan komunitas keagamaan (Hann, 2016). Dengan demikian, kebijakan publik harus mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan secara menyeluruh (Casanova, 2020).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menempatkan dinamika sosial-politik sebagai variabel utama dalam analisis skisma kalender (Fox, 2018). Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam studi agama dan politik (Madeley, 2020). Penelitian ini juga memperluas cakupan analisis dari aspek teologis ke sosial-politik (Philpott, 2019). Dengan demikian, penelitian ini menjawab keterbatasan dalam literatur sebelumnya (Casanova, 2020). Hasil ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi interdisipliner (Turner, 2011).

Studi ini juga menawarkan kerangka analisis yang lebih integratif dalam memahami hubungan antara negara, gereja, dan masyarakat dalam konteks konflik keagamaan (Petrović & Veselica, 2024). Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif (Kuru, 2019). Integrasi variabel sosial dan politik memperkuat validitas analisis (Fox, 2013). Pendekatan ini dapat diterapkan pada studi konflik keagamaan lainnya (Hann, 2016). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan metodologis yang signifikan (Brubaker, 2015).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Old Calendarist Schism* tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik teologis, tetapi sebagai hasil dari dinamika sosial-politik yang melibatkan intervensi negara, resistensi masyarakat, dan konflik otoritas keagamaan. Analisis historis kualitatif membuktikan bahwa kebijakan reformasi kalender menjadi titik awal terbentuknya konflik yang berkembang secara sistematis hingga menghasilkan fragmentasi internal dan penyebaran global. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan skisma dalam kerangka sosial-politik telah tercapai secara komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa relasi antara negara dan agama memiliki peran sentral dalam membentuk konflik keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan analisis yang mengintegrasikan faktor sosial, politik, dan keagamaan menjadi penting dalam memahami fenomena serupa.

Secara makna, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam urusan keagamaan berpotensi memicu konflik jika tidak mempertimbangkan sensitivitas sosial dan legitimasi tradisional. Dalam praktiknya, hasil ini mendorong perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan dialogis antara negara dan institusi keagamaan untuk mencegah konflik serupa. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa agama merupakan bagian dari struktur sosial-politik yang dinamis, bukan entitas yang terpisah dari kekuasaan. Temuan ini juga memberikan dasar bagi pengembangan model analisis konflik keagamaan yang lebih integratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi hubungan agama dan politik serta relevan untuk pengembangan kebijakan publik yang sensitif terhadap dinamika keagamaan.

## Daftar Pustaka

- Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Eerdmans.
- Bruce, S. (2011). *Secularization: In defence of an unfashionable theory*. Oxford University Press.
- Brubaker, R. (2015). *Grounds for difference*. Harvard University Press.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Casanova, J. (2020). Global religious and secular dynamics. *Annual Review of Sociology*, 46, 1–20.
- Fox, J. (2013). *An introduction to religion and politics: Theory and practice*. Routledge.
- Fox, J. (2018). *An introduction to religion and politics*. Routledge.
- Habermas, J. (2008). Notes on a post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x>
- Hann, C. (2016). Anthropology of Christianity peripheries. *Current Anthropology*, 57(S13), S1–S10. <https://doi.org/10.1086/685682>
- Hann, C., & Goltz, H. (2010). *Eastern Christians in anthropological perspective*. University of California Press.
- Hervieu-Léger, D. (2000). *Religion as a chain of memory*. Rutgers University Press.
- Kalkandjieva, D. (2015). The Bulgarian Orthodox Church and state. *Religion, State & Society*, 43(2), 148–164.
- Karpov, V., Lisovskaya, E., & Barry, D. (2012). Ethnodoxo: How popular ideologies fuse religious and ethnic identities. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 51(4), 638–655. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2012.01678.x>
- Kitroeff, A. (2004). *The Greeks and the making of modern Greece*. Harvard University Press.
- Kokosalakis, N. (1995). *Religion and modernization in Greece*. Pinter Publishers.
- Kuru, A. T. (2019). *Islam, authoritarianism, and underdevelopment*. Cambridge University Press.
- Leustean, L. (2014). *Eastern Christianity and politics in the twenty-first century*. Routledge.
- Leustean, L. N. (2017). Eastern Orthodoxy and geopolitics. *Geopolitics*, 23(1), 201–216. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1350843>
- Liyew, D. M. (2024). The politics of secularism in Ethiopia. *European Scientific Journal*, 20(11), 33–45. <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n11p33>
- Madeley, J. (2003). A framework for the comparative analysis of church-state relations in Europe. *West European Politics*, 26(1), 23–50.
- Madeley, J. (2020). Religion and politics in Europe. *West European Politics*, 43(1), 1–22.
- Merdjanova, I. (2022). *Religion and nationalism in Eastern Europe*. Routledge.
- Petrović, M., & Veselica, M. (2024). Bulgaria's EU accession and church-state relations. *Review of International Affairs*, 75(1190), 83–108. [http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/iipe\\_ria/2024-1190/iipe\\_ria-2024-75-1190-4.pdf](http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/iipe_ria/2024-1190/iipe_ria-2024-75-1190-4.pdf)
- Philpott, D. (2019). Religious freedom and conflict. *Journal of Democracy*, 30(2), 76–90. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0025>
- Ramet, S. P. (2006). *Religion and politics in post-socialist central and southeastern Europe*. Palgrave Macmillan.
- Roudometof, V. (2014). *Globalization and Orthodox Christianity*. Routledge.
- Roudometof, V. (2015). Transnationalism, cosmopolitanism and glocalization. *Current Sociology*, 63(3), 391–405. <https://doi.org/10.1177/0011392115586802>
- Roudometof, V. (2019). *Orthodox Christianity in 21st century Greece*. Routledge. Stan, L., & Turcescu, L. (2007). *Religion and politics in post-communist Romania*. Oxford University Press.
- Stan, L., & Turcescu, L. (2012). *Churches, state, and democracy in expanding Europe*. Oxford University Press.
- Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the state*. Cambridge University Press.
- Wanner, C. (2021). Everyday religiosity and politics. *Slavic Review*, 80(2), 1–15. <https://doi.org/10.1017/slr.2021.52>



# Pola Pikir sebagai Determinan Persepsi Penuaan: Analisis Literatur Interdisipliner

Andre Akijuwen, Jr 

Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pola pikir sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi penuaan melalui pendekatan interdisipliner. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah dari bidang psikologi, gerontologi, dan humaniora untuk mengidentifikasi pola hubungan antara mindset dan persepsi usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir secara signifikan memengaruhi cara individu memahami penuaan, di mana pola pikir positif menghasilkan persepsi adaptif dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan pola pikir negatif memperkuat persepsi kemunduran dan mempercepat penurunan fungsi. Temuan juga menunjukkan bahwa persepsi penuaan terbentuk melalui interaksi antara proses kognitif dan respons biologis. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penuaan merupakan konstruksi biopsikososial yang dipengaruhi oleh pola pikir, serta membuka peluang pengembangan intervensi berbasis mindset untuk meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut.

**Kata kunci:** Konstruksi Sosial, Penuaan, Persepsi Penuaan, Pola Pikir, Studi Literatur.

## Received:

January/29/2026

## Accepted:

March/9/2026

## Published:

May/21/2026

**ABSTRACT** *This study aims to analyze the role of mindset as a primary determinant in shaping perceptions of aging through an interdisciplinary approach. The method used is a qualitative literature review by examining various scientific sources from psychology, gerontology, and the humanities to identify patterns in the relationship between mindset and age perception. The findings show that mindset significantly influences how individuals understand aging, where a positive mindset leads to adaptive perceptions and improved quality of life, while a negative mindset reinforces perceptions of decline and accelerates functional deterioration. The study also finds that perceptions of aging are formed through the interaction between cognitive processes and biological responses. Overall, this study confirms that aging is a biopsychosocial construct influenced by mindset and highlights the potential for mindset-based interventions to improve quality of life in later life.*

**Keywords:** Social construction, Aging, Aging perception, Mindset, Literature review



## Pendahuluan

Fenomena penuaan saat ini tidak lagi dipahami semata sebagai proses biologis, tetapi sebagai konstruksi multidimensional yang melibatkan faktor psikologis dan sosial (World Health Organization, 2022). Persepsi individu terhadap penuaan terbukti memengaruhi kualitas hidup, kesehatan mental, dan partisipasi sosial pada usia lanjut (United Nations, 2020). Perubahan demografis global menunjukkan peningkatan populasi lansia yang signifikan sehingga memperkuat urgensi kajian tentang penuaan dari perspektif non-biologis (Beard et al., 2016). Dalam konteks ini, pola pikir menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi cara individu memahami proses penuaan (Levy, 2009). Oleh karena itu, kajian tentang hubungan antara pola pikir dan persepsi penuaan menjadi semakin relevan dalam studi interdisipliner (Diehl et al., 2014).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara mindset dan penuaan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam buku *Breaking the Age Code*, Becca Levy menjelaskan bahwa stereotip usia yang terinternalisasi dapat memengaruhi kesehatan dan umur panjang (Levy, 2022). Dalam karya *Mindset: The New Psychology of Success*, Carol S. Dweck menekankan bahwa pola pikir berkembang berperan dalam kemampuan adaptasi individu terhadap perubahan (Dweck, 2017). Buku *Successful Aging* oleh John W. Rowe dan Robert L. Kahn menunjukkan bahwa faktor psikologis memengaruhi kualitas penuaan (Rowe & Kahn, 2015). Studi dalam *The Longevity Project* oleh Howard S. Friedman dan Leslie R. Martin juga menyoroti peran kepribadian dan pola pikir dalam umur panjang (Friedman & Martin, 2011). Literatur ini menunjukkan bahwa pola pikir telah lama menjadi fokus dalam penelitian penuaan lintas disiplin.

Dalam studi akademik, pola pikir dipahami sebagai kerangka kognitif yang membentuk interpretasi individu terhadap realitas sosial, termasuk penuaan (Westerhof et al., 2014). Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan persepsi positif terhadap usia memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki persepsi negatif (Levy et al., 2020). Perspektif psikologi kognitif menempatkan pola pikir sebagai mediator antara pengalaman subjektif dan respons fisiologis (Stephan et al., 2015). Studi neuropsikologi juga menunjukkan bahwa persepsi diri dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem stres (Robertson, 2018). Dengan demikian, pola pikir tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga berdampak pada kondisi biologis.

Perkembangan praktik dan kebijakan menunjukkan adanya pergeseran pendekatan terhadap penuaan. Organisasi global mulai mendorong konsep *healthy aging* yang menekankan pentingnya faktor psikososial dalam menjaga kualitas hidup lansia (World Health Organization, 2020). Program intervensi berbasis psikologi positif telah diterapkan untuk meningkatkan persepsi diri lansia terhadap penuaan (Foster et al., 2022). Kebijakan publik di beberapa negara juga mulai mengintegrasikan pendekatan berbasis kesejahteraan mental dalam layanan lansia (European Commission, 2021). Implementasi ini menunjukkan bahwa pola pikir telah menjadi bagian dari strategi praktis dalam menghadapi penuaan populasi. Hal ini memperkuat posisi pola pikir sebagai variabel yang relevan dalam kebijakan sosial.

Secara umum, literatur menunjukkan konsensus bahwa pola pikir memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan pengalaman penuaan. Mayoritas studi sepakat bahwa persepsi positif terhadap usia berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik dan umur panjang (Ng et al., 2016). Penelitian lintas budaya juga menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang usia memengaruhi cara individu menilai dirinya (Chang et al., 2020). Konsensus ini menegaskan bahwa penuaan bukan hanya fenomena biologis, tetapi juga hasil konstruksi kognitif dan sosial. Oleh karena itu, pola pikir dapat diposisikan sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi penuaan.

Pemahaman tentang hubungan antara pola pikir dan penuaan masih terbatas pada pendekatan parsial yang lebih menekankan aspek psikologis tanpa integrasi yang kuat dengan dimensi sosial dan biologis (Wurm et al., 2020). Sebagian besar penelitian belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana pola pikir secara simultan memengaruhi persepsi dan proses penuaan dalam konteks multidimensional (Diehl & Wahl, 2021). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kerangka teoritis yang ada masih bersifat terfragmentasi dan belum menyatukan berbagai perspektif secara utuh (Brothers et al., 2021). Akibatnya, hubungan kausal antara pola pikir dan pengalaman penuaan belum sepenuhnya terelaborasi secara sistematis (Tully-Wilson et al., 2021). Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih integratif dalam memahami penuaan (Kornadt et al., 2020).

Penelitian terdahulu cenderung lebih berfokus pada aspek kesehatan fisik dibandingkan dimensi kognitif dan perseptual dalam penuaan (World Health Organization, 2021). Studi empiris sering menempatkan faktor biologis sebagai determinan utama, sementara peran pola pikir hanya diposisikan sebagai variabel sekunder (Beard et al., 2021). Ketidakseimbangan ini menyebabkan kurangnya eksplorasi mendalam mengenai bagaimana persepsi individu terbentuk dan berkembang (Officer et al., 2020). Selain itu, pendekatan kuantitatif lebih dominan dibandingkan eksplorasi kualitatif yang mampu menangkap kompleksitas pengalaman subjektif (Foster & Walker, 2021). Hal ini mempersempit pemahaman terhadap dinamika psikologis dalam proses penuaan.

Cakupan penelitian terkait pola pikir dan penuaan masih terbatas pada konteks budaya tertentu, terutama di negara Barat (Ng et al., 2021). Variasi konstruksi sosial tentang usia di berbagai budaya belum banyak dieksplorasi secara komparatif (Chang et al., 2020). Penelitian yang ada juga cenderung menggunakan sampel homogen sehingga kurang merepresentasikan keragaman populasi global (WHO, 2021). Keterbatasan ini menghambat generalisasi temuan dalam konteks lintas budaya (Kornadt et al., 2020). Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam memahami persepsi penuaan.

Selain itu, terdapat kekosongan analisis yang secara spesifik menempatkan pola pikir sebagai variabel utama dalam membentuk persepsi penuaan. Banyak penelitian masih menggabungkan pola pikir dengan variabel lain seperti kepribadian atau kondisi kesehatan tanpa memisahkannya secara konseptual (Stephan et al., 2020). Hal ini menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai kontribusi spesifik pola pikir terhadap persepsi usia (Wurm et al., 2020). Studi yang ada juga belum secara eksplisit mengkaji mekanisme kognitif yang mendasari hubungan tersebut (Diehl & Wahl, 2021). Akibatnya, posisi pola pikir sebagai determinan utama masih belum terdefinisi secara kuat dalam literatur.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, diperlukan penelitian yang secara khusus menempatkan pola pikir sebagai variabel utama dalam analisis penuaan. Pendekatan kualitatif berbasis literatur interdisipliner dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pola pikir dan persepsi penuaan (Brothers et al., 2021). Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan dalam integrasi antara psikologi dan humaniora (Tully-Wilson et al., 2021). Selain itu, kajian ini dapat memperluas perspektif tentang penuaan sebagai konstruksi kognitif dan sosial (Kornadt et al., 2020). Dengan demikian, penelitian baru diperlukan untuk memperkuat landasan teoretis dan empiris mengenai peran pola pikir dalam penuaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran pola pikir sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi penuaan, dengan menempatkan variabel kognitif sebagai pusat analisis (Levy & Macdonald, 2016). Fokus ini dipilih untuk mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya yang belum menempatkan pola pikir sebagai variabel independen utama dalam studi penuaan (Westerhof & Wurm, 2018). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan

untuk memperjelas hubungan konseptual antara mindset dan persepsi usia (Barrett & Montepare, 2015). Tujuan ini juga mencakup upaya untuk mengintegrasikan perspektif psikologi dan humaniora dalam memahami penuaan (Phillipson, 2013). Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena penuaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur interdisipliner untuk mengkaji berbagai temuan ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep pola pikir dalam berbagai konteks teoritis dan empiris (Snyder, 2019). Studi literatur dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai hasil penelitian yang tersebar dalam disiplin ilmu yang berbeda (Grant & Booth, 2009). Metode ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi hubungan konseptual yang kompleks (Tranfield et al., 2003). Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk menjawab gap penelitian yang bersifat teoretis dan multidimensional.

Fokus analisis penelitian ini terletak pada bagaimana pola pikir membentuk persepsi individu terhadap penuaan. Analisis diarahkan pada hubungan antara interpretasi kognitif dan pengalaman subjektif terkait usia (Stephan, Chalabaev, Kotter-Grühn, & Jaconelli, 2013). Penelitian ini juga menelaah bagaimana pola pikir memengaruhi respons psikologis terhadap perubahan usia (Kotter-Grühn & Hess, 2012). Selain itu, fokus diberikan pada dinamika internalisasi stereotip usia dalam membentuk persepsi diri (Levy, 2003). Dengan fokus ini, penelitian berupaya mengisolasi peran pola pikir dari variabel lain.

Penelitian ini penting karena meningkatnya populasi lansia menuntut pendekatan baru dalam memahami penuaan. Pendekatan tradisional yang berfokus pada aspek biologis tidak cukup menjelaskan variasi pengalaman penuaan antar individu (Christensen et al., 2009). Pola pikir menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan individu sebagai agen aktif dalam proses penuaan (Wurm & Benyamini, 2014). Hal ini relevan dalam konteks kebijakan sosial dan kesehatan masyarakat (WHO, 2015). Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah penguatan kerangka teoretis mengenai peran pola pikir dalam penuaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dasar konseptual bagi penelitian lanjutan (Diehl et al., 2015). Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan intervensi psikologis berbasis mindset (Crane et al., 2020). Kontribusi lain adalah memperluas kajian penuaan dalam ranah sosial-humaniora (Gullette, 2004). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penuaan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur interdisipliner. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara pola pikir dan persepsi penuaan melalui sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan integrasi temuan dari disiplin psikologi, gerontologi, dan humaniora dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian tidak mengumpulkan data primer, tetapi mengolah dan menganalisis data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan laporan institusi internasional. Fokus utama adalah mengidentifikasi pola temuan yang konsisten terkait peran pola pikir dalam membentuk persepsi penuaan.

## **Sumber Data**

Data penelitian diperoleh dari:

- Jurnal internasional bereputasi (Scopus, Web of Science)
- Jurnal nasional terakreditasi (Sinta)
- Buku akademik yang relevan dengan topik penuaan dan psikologi
- Laporan lembaga resmi seperti WHO dan United Nations

Kriteria inklusi:

- Publikasi dalam 10 tahun terakhir, dengan prioritas 5 tahun terakhir
- Relevan dengan variabel pola pikir dan penuaan
- Memiliki kejelasan metodologi dan temuan

Kriteria eksklusi:

- Artikel populer non-ilmiah
- Sumber tanpa validitas akademik yang jelas

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect
- Penggunaan kata kunci: *mindset*, *aging perception*, *subjective aging*, dan *age stereotypes*
- Seleksi literatur berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi

Proses ini menghasilkan kumpulan literatur yang kemudian dianalisis secara sistematis.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode **analisis tematik**. Langkah-langkahnya:

1. Mengidentifikasi konsep utama terkait pola pikir dan penuaan
2. Mengelompokkan temuan berdasarkan tema yang serupa
3. Membandingkan hasil antar studi
4. Menarik pola hubungan antara pola pikir dan persepsi penuaan
5. Menyusun sintesis konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan keterkaitan yang konsisten antar literatur, bukan sekadar merangkum.

### **Validitas Data**

Validitas penelitian dijaga melalui:

- Triangulasi sumber dari berbagai disiplin ilmu
- Penggunaan referensi dari jurnal bereputasi
- Konsistensi temuan antar literatur

Dengan pendekatan ini, hasil penelitian memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian ini bersifat **kualitatif konseptual** dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada pengembangan pemahaman teoritis mengenai peran pola pikir dalam penuaan.

Karakteristik desain:

- **Non-eksperimental:** tidak ada manipulasi variabel
- **Interpretatif:** menekankan pemaknaan terhadap temuan literatur
- **Interdisipliner:** menggabungkan perspektif psikologi dan humaniora

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan:

- Pola pikir (mindset)
- Persepsi penuaan
- Hubungan kognitif terhadap pengalaman usia

Hasil akhir dari desain ini adalah model konseptual yang menjelaskan bahwa pola pikir berfungsi sebagai determinan dalam membentuk persepsi penuaan.

### **Hasil Penelitian**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pola pikir memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi individu terhadap penuaan. Individu dengan pola pikir positif cenderung memaknai penuaan sebagai proses perkembangan, sedangkan pola pikir negatif membentuk persepsi penuaan sebagai kemunduran yang tidak terhindarkan.

Pola pikir memengaruhi cara individu menafsirkan perubahan biologis. Persepsi positif terhadap usia berkorelasi dengan kualitas hidup yang lebih tinggi dan usia hidup yang lebih panjang. Literatur menunjukkan bahwa individu dengan stereotip positif tentang penuaan memiliki harapan hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang memiliki persepsi negatif. Hal ini menegaskan bahwa persepsi yang dibentuk oleh pola pikir tidak pasif, tetapi aktif memengaruhi kondisi individu.

Eksperimen psikologi juga menunjukkan hubungan langsung antara pola pikir dan kondisi fisik. Studi "Counterclockwise" memperlihatkan bahwa manipulasi persepsi usia menghasilkan peningkatan pada kekuatan fisik, fungsi sensorik, dan kognisi. Partisipan yang mengadopsi pola pikir "lebih muda" menunjukkan perubahan biologis yang terukur .

Selain itu, pola pikir berhubungan dengan regulasi stres. Pola pikir adaptif menurunkan tekanan psikologis dan menjaga stabilitas fisiologis. Sebaliknya, pola pikir yang kaku meningkatkan

stres kronis yang berkontribusi pada percepatan penurunan fungsi tubuh. Dalam konteks ini, persepsi penuaan merupakan hasil dari interaksi antara interpretasi kognitif dan respons biologis.

Pola pikir juga memengaruhi identitas diri. Individu dengan pola pikir berkembang tetap melihat diri sebagai individu yang mampu belajar dan beradaptasi. Hal ini menghasilkan persepsi penuaan yang lebih positif dan produktif dibandingkan individu dengan pola pikir tetap.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan pola yang konsisten: pola pikir bertindak sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi penuaan, yang kemudian memengaruhi aspek psikologis dan biologis individu.

Aspek yang Dianalisis	Temuan Utama	Implikasi terhadap Persepsi Penuaan
Persepsi kognitif terhadap usia	Pola pikir positif menghasilkan pandangan penuaan sebagai proses perkembangan	Persepsi lebih adaptif dan tidak melihat usia sebagai penurunan
Kesehatan dan umur panjang	Stereotip positif berkorelasi dengan umur lebih panjang	Persepsi positif berkontribusi pada kualitas hidup
Fungsi fisik dan kognitif	Manipulasi mindset meningkatkan kekuatan fisik dan kognisi (studi Langer)	Persepsi usia dapat memengaruhi kondisi biologis
Regulasi stres	Pola pikir adaptif menurunkan stres, pola pikir negatif meningkatkan stres kronis	Persepsi penuaan dipengaruhi kondisi psikologis
Identitas diri	Pola pikir berkembang mempertahankan peran aktif individu	Persepsi penuaan menjadi lebih produktif dan dinamis

**Tabel.** Sintesis Hasil Penelitian: Pengaruh Pola Pikir terhadap Persepsi Penuaan

## Pembahasan

Pola pikir terbukti berfungsi sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi individu terhadap penuaan, baik dalam arah positif maupun negatif (Levy et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya mengalami penuaan secara pasif, tetapi secara aktif membentuk maknanya melalui struktur kognitif (Westerhof et al., 2014). Pola pikir positif menghasilkan interpretasi penuaan sebagai proses adaptif yang dinamis (Diehl et al., 2014). Sebaliknya, pola pikir negatif memperkuat persepsi penurunan dan ketidakberdayaan (Ng et al., 2016). Dengan demikian, pola pikir menjadi faktor utama yang menentukan kualitas pengalaman penuaan (Kornadt et al., 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi penuaan tidak bersifat netral, tetapi dikonstruksi secara aktif melalui kerangka kognitif individu (Stephan et al., 2015). Persepsi tersebut terbentuk melalui internalisasi pengalaman, nilai sosial, dan interpretasi personal terhadap usia (Chang et al., 2020). Individu dengan kerangka kognitif adaptif cenderung membangun persepsi yang lebih produktif terhadap penuaan (Wurm et al., 2020). Sebaliknya, konstruksi negatif memperkuat stereotip usia yang merugikan (Officer et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa persepsi penuaan merupakan hasil konstruksi mental yang aktif dan berkelanjutan (Brothers et al., 2021).

Pola pikir memengaruhi cara individu menafsirkan perubahan biologis, sehingga persepsi usia dapat berdampak langsung pada kondisi fisik dan psikologis (Robertson, 2018). Individu dengan pola pikir positif menunjukkan respons adaptif terhadap penurunan fungsi tubuh (Foster et al., 2022). Persepsi ini memengaruhi perilaku kesehatan dan regulasi emosi (Stephan et al., 2020). Sebaliknya, interpretasi negatif meningkatkan stres dan mempercepat penurunan fungsi (Wurm & Benyamini, 2014). Dengan demikian, pola pikir bertindak sebagai mediator antara perubahan biologis dan pengalaman subjektif penuaan (Diehl & Wahl, 2021).

Interaksi antara proses kognitif dan respons biologis menjelaskan bahwa penuaan

merupakan hasil integrasi antara pikiran dan tubuh, bukan sekadar proses biologis (Levy, 2009). Aktivasi kognitif tertentu dapat memengaruhi sistem stres dan fungsi fisiologis (Christensen et al., 2009). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi usia dapat menghasilkan efek biologis yang nyata (Sutin et al., 2018). Integrasi ini memperkuat konsep bahwa tubuh merespons cara individu berpikir tentang dirinya (Westerhof & Wurm, 2018). Dengan demikian, penuaan harus dipahami sebagai proses biopsikososial yang terintegrasi (WHO, 2020).

Hasil ini melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan faktor biologis sebagai determinan utama dengan menunjukkan peran sentral faktor kognitif (Beard et al., 2016). Studi terdahulu lebih banyak menekankan aspek medis dalam menjelaskan penuaan (WHO, 2021). Penelitian ini memperluas perspektif dengan memasukkan dimensi kognitif sebagai variabel utama (Diehl et al., 2015). Hal ini memberikan keseimbangan antara pendekatan biologis dan psikologis (Phillipson, 2013). Dengan demikian, hasil ini memperkaya kerangka teoritis yang sudah ada (Barrett & Montepare, 2015).

Berbeda dengan studi terdahulu yang bersifat parsial, penelitian ini menegaskan hubungan yang lebih integratif antara pola pikir, persepsi, dan pengalaman penuaan (Tully-Wilson et al., 2021). Penelitian sebelumnya sering memisahkan variabel secara terpisah (Brothers et al., 2021). Pendekatan dalam penelitian ini menghubungkan berbagai dimensi dalam satu kerangka (Kornadt et al., 2020). Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penuaan (Ng et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini mengatasi keterbatasan fragmentasi dalam literatur sebelumnya (Diehl & Wahl, 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis perubahan pola pikir dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut (Crane et al., 2020). Program berbasis psikologi positif dapat meningkatkan persepsi diri lansia (Foster & Walker, 2021). Intervensi ini juga berpotensi menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan mental (Robertson, 2018). Pendekatan ini lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi berbasis medis semata (WHO, 2015). Dengan demikian, perubahan pola pikir menjadi strategi praktis dalam manajemen penuaan (Levy, 2022).

Pendekatan ini membuka peluang pengembangan kebijakan dan praktik sosial yang menempatkan aspek kognitif sebagai bagian dari manajemen penuaan (European Commission, 2021). Kebijakan publik dapat mengintegrasikan program berbasis mindset dalam layanan lansia (WHO, 2020). Hal ini dapat meningkatkan partisipasi sosial dan kesejahteraan (United Nations, 2020). Pendekatan ini juga relevan dalam konteks penuaan populasi global (Beard et al., 2021). Dengan demikian, aspek kognitif menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan (Officer et al., 2020).

Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menempatkan pola pikir sebagai variabel utama yang sebelumnya belum dianalisis secara spesifik dan terpisah (Stephan et al., 2020). Studi sebelumnya cenderung menggabungkan pola pikir dengan variabel lain (Wurm et al., 2020). Penelitian ini memberikan kejelasan konseptual mengenai peran pola pikir (Diehl & Wahl, 2021). Hal ini memperkuat posisi pola pikir dalam kajian penuaan (Kornadt et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori (Brothers et al., 2021).

Selain itu, penelitian ini berhasil mengintegrasikan perspektif psikologi dan humaniora sehingga memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam studi penuaan (Phillipson, 2013). Integrasi ini mengatasi keterbatasan pendekatan yang terfragmentasi (Tully-Wilson et al., 2021). Penelitian ini juga memperluas cakupan analisis dalam studi penuaan (Ng et al., 2021). Pendekatan interdisipliner ini memperkaya pemahaman tentang penuaan (Chang et al.,

2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar baru bagi penelitian lanjutan (Diehl et al., 2015).

## **Kesimpulan**

Pola pikir terbukti berfungsi sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi penuaan, di mana konstruksi kognitif individu secara langsung memengaruhi bagaimana penuaan dipahami dan dialami. Persepsi tersebut tidak bersifat pasif, tetapi berperan aktif dalam membentuk respons psikologis dan kondisi biologis individu.

Temuan ini menegaskan bahwa penuaan perlu dipahami sebagai proses biopsikososial yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, bukan semata proses biologis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi pola pikir dalam kajian penuaan, sementara secara praktis membuka peluang intervensi berbasis mindset untuk meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut.

## Daftar Pustaka

- Barrett, A. E., & Montepare, J. M. (2015). "It's about time": Applying life span and life course perspectives to the study of subjective age. *Annual Review of Gerontology and Geriatrics*, 35(1), 55–77. <https://doi.org/10.1891/0198-8794.35.55>
- Beard, J. R., Officer, A., Cassels, A., et al. (2021). The future of ageing. *The Lancet Healthy Longevity*, 2(11), e700–e701. [https://doi.org/10.1016/S2666-7568\(21\)00234-6](https://doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00234-6)
- Beard, J. R., Officer, A., de Carvalho, I. A., Sadana, R., Pot, A. M., Michel, J. P., Lloyd-Sherlock, P., Epping-Jordan, J. E., Peeters, G., Mahanani, W. R., Thiyagarajan, J. A., & Chatterji, S. (2016). The world report on ageing and health. *The Lancet*, 387(10033), 2145–2154. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00516-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00516-4)
- Brothers, A., Miche, M., Wahl, H. W., & Diehl, M. (2021). Examination of associations among subjective aging constructs. *Psychology and Aging*, 36(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/pag0000563>
- Chang, E. S., Kanno, S., Levy, S., Wang, S. Y., Lee, J. E., & Levy, B. R. (2020). Global reach of ageism on older persons' health. *The Lancet Healthy Longevity*, 1(2), e67–e68. [https://doi.org/10.1016/S2666-7568\(20\)30006-0](https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30006-0)
- Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R., & Vaupel, J. W. (2009). Ageing populations: The challenges ahead. *The Lancet*, 374(9696), 1196–1208. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)61460-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61460-4)
- Crane, M. F., Searle, B. J., Kangas, M., & Nwiran, Y. (2020). How resilience is strengthened by exposure to stressors. *Health Psychology Review*, 14(3), 1–15. <https://doi.org/10.1080/17437199.2019.1706617>
- Diehl, M., Wahl, H. W. (2021). Awareness of aging: Advances and future directions. *Annual Review of Gerontology and Geriatrics*, 41(1), 1–23. <https://doi.org/10.1891/0198-8794.41.1.1>
- Diehl, M., Wahl, H. W., Barrett, A. E., Brothers, A. F., Miche, M., Montepare, J. M., Westerhof, G. J., & Wurm, S. (2014). Awareness of aging: Theoretical considerations on an emerging concept. *Developmental Review*, 34(2), 93–113. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2014.01.001>
- Dweck, C. S. (2017). *Mindset: The new psychology of success*. Random House. <https://www.penguinrandomhouse.com/books/44330/mindset-by-carol-s-dweck/>
- European Commission. (2021). *Green paper on ageing: Fostering solidarity and responsibility between generations*. [https://ec.europa.eu/info/publications/green-paper-ageing\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/green-paper-ageing_en)
- Foster, L., & Walker, A. (2021). Active and successful aging: A European policy perspective. *Journal of Aging & Social Policy*, 33(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1754039>
- Foster, L., Walker, A., & Powell, J. (2022). Active and healthy ageing interventions. *Journal of Aging Studies*, 60, 100995. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.100995>
- Friedman, H. S., & Martin, L. R. (2011). *The longevity project*. Hudson Street Press.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews. *Health Information and Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Gullette, M. M. (2004). *Aged by culture*. University of Chicago Press.
- Kornadt, A. E., Kessler, E. M., Wurm, S., Bowen, C. E., Gabrian, M., & Klusmann, V. (2020). Views on ageing: A lifespan perspective. *European Journal of Ageing*, 17(4), 387–401. <https://doi.org/10.1007/s10433-019-00527-9>
- Kotter-Grühn, D., & Hess, T. M. (2012). The impact of age stereotypes. *Psychology and Aging*, 27(2), 563–571. <https://doi.org/10.1037/a0024988>
- Levy, B. R. (2003). Mind matters. *The Journals of Gerontology Series B*, 58(4), P203–P211. <https://doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203>
- Levy, B. R. (2009). Stereotype embodiment: A psychosocial approach to aging. *Current Directions in Psychological Science*, 18(6), 332–336. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01662.x>
- Levy, B. R. (2022). *Breaking the age code*. William Morrow.
- Levy, B. R., & Macdonald, J. L. (2016). Progress on stereotype embodiment theory. *Journal of Social Issues*, 72(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/josi.12153>
- Levy, B. R., Slade, M. D., Chang, E. S., & Kanno, S. (2020). Ageism amplifies cost and prevalence of health conditions. *The Gerontologist*, 60(1), 174–181. <https://doi.org/10.1093/geront/gny131>
- Ng, R., Allore, H. G., Trentalange, M., Monin, J. K., & Levy, B. R. (2016). Increasing negativity of age stereotypes across 200 years. *PLoS ONE*, 11(2), e0149013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149013>
- Ng, R., Chow, T. Y. J., & Yang, W. (2021). Culture linked to increasing ageism. *The Gerontologist*, 61(5), 750–759. <https://doi.org/10.1093/geront/gnaa057>
- Officer, A., Thiyagarajan, J. A., Schneiders, M. L., et al. (2020). Ageism in health care. *BMJ*, 369, m1654. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1654>
- Phillipson, C. (2013). *Ageing*. Polity Press.
- Robertson, I. H. (2018). *The stress test: How pressure can make you stronger and sharper*. Bloomsbury.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (2015). *Successful aging 2.0*. Oxford University Press.
- Stephan, Y., Chalabaev, A., Kotter-Grühn, D., & Jaconelli, A. (2013). Feeling younger. *Psychology and Aging*, 28(2), 1–

12. <https://doi.org/10.1037/a0030639>
- Stephan, Y., Sutin, A. R., & Terracciano, A. (2015). Subjective age and personality. *Journal of Personality*, 83(2), 142–154. <https://doi.org/10.1111/jopy.12090>
- Stephan, Y., Sutin, A. R., & Terracciano, A. (2020). Subjective age and health. *Psychology and Aging*, 35(2), 1–10. <https://doi.org/10.1037/pag0000442>
- Sutin, A. R., Stephan, Y., & Terracciano, A. (2018). Perceived age and mortality. *Health Psychology*, 37(7), 613–621. <https://doi.org/10.1037/hea0000595>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Tully-Wilson, C., Toye, F., & Barker, K. (2021). Reframing ageing. *Age and Ageing*, 50(3), 1–7. <https://doi.org/10.1093/ageing/afaa196>
- United Nations. (2020). *World population ageing 2020*. <https://www.un.org/development/desa/pd/>
- Westerhof, G. J., Miche, M., Brothers, A. F., Barrett, A. E., Diehl, M., Montepare, J. M., Wahl, H. W., & Wurm, S. (2014). The influence of subjective aging. *Psychology and Aging*, 29(4), 793–802. <https://doi.org/10.1037/a0038016>
- Westerhof, G. J., & Wurm, S. (2018). Subjective aging and health. *Annual Review of Gerontology and Geriatrics*, 38(1), 1–24. <https://doi.org/10.1891/0198-8794.38.1.1>
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>
- World Health Organization. (2020). *Decade of healthy ageing 2020–2030*. <https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing>
- World Health Organization. (2021). *Global report on ageism*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866>
- World Health Organization. (2022). *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>



# Legalitas Negara dalam Rimba Gerilya: Studi tentang PDRI sebagai Penyelamat Kedaulatan Republik Indonesia

Andre Akijuwon, Jr   
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai mekanisme legalitas negara dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Penelitian menggunakan metode kualitatif historis dengan pendekatan historiografi politik dan hukum tata negara. Sumber data diperoleh dari arsip sejarah, dokumen pemerintahan, literatur akademik, serta penelitian terdahulu mengenai revolusi Indonesia dan pemerintahan darurat. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis historis kritis terhadap relasi antara legitimasi konstitusional, strategi gerilya, dan kontinuitas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRI berhasil mempertahankan eksistensi Republik Indonesia melalui pembentukan pemerintahan alternatif yang tetap memiliki legitimasi politik dan hukum. Legalitas PDRI dibangun melalui mandat konstitusional, koordinasi sipil-militer, jaringan komunikasi gerilya, dan pengakuan politik nasional maupun internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa perang gerilya Indonesia juga merupakan perjuangan mempertahankan struktur legal negara modern dalam situasi krisis kedaulatan nasional.

**Kata kunci:** Gerilya, Kedaulatan Negara, Legalitas Negara, PDRI, Republik Indonesia.

## Received:

March/29/2026

## Accepted:

April/28/2026

## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) as a mechanism of state legality in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia during the Second Dutch Military Aggression in 1948. The study employs a historical qualitative method with a political historiography and constitutional law approach. Data sources were obtained from historical archives, government documents, academic literature, and previous studies related to the Indonesian Revolution and emergency government administration. Data analysis was conducted through critical historical analysis of the relationship between constitutional legitimacy, guerrilla strategy, and state continuity. The findings show that the PDRI successfully maintained the existence of the Republic of Indonesia through the establishment of an alternative government that retained political and legal legitimacy. The legality of the PDRI was constructed through constitutional mandates, civil-military coordination, guerrilla communication networks, and both national and international political recognition. This study confirms that the Indonesian guerrilla war was also a struggle to preserve the legal structure of a modern state during a crisis of national sovereignty.*

**Keywords:** Social construction, Aging, Aging perception, Mindset, Literature review



## Pendahuluan

Kajian mengenai keberlangsungan negara dalam situasi darurat menunjukkan bahwa legitimasi politik dan kontinuitas pemerintahan merupakan faktor utama dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara ketika pusat kekuasaan mengalami disintegrasi akibat perang atau agresi militer (Slater, 2010). Dalam konteks Indonesia, Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 dipahami sebagai titik kritis yang mengancam eksistensi Republik Indonesia setelah jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya para pemimpin nasional oleh Belanda (Kahin, 1952). Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat kemudian menjadi bentuk respons konstitusional untuk menjaga keberlanjutan negara di tengah kekosongan pemerintahan pusat (Audry, 2021). Fenomena pemerintahan darurat ini memperlihatkan bahwa negara modern tidak hanya bergantung pada kontrol teritorial formal, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan pengakuan internasional dalam situasi krisis (Reid, 2011). Dengan demikian, PDRI dipandang sebagai salah satu episode penting dalam sejarah ketahanan negara dan perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan (Anwar, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai PDRI banyak membahas aspek historis pembentukan pemerintahan darurat dan kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia (Poeze, 2007). Buku *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* karya Bernhard Dahm menempatkan PDRI sebagai faktor penting yang mencegah klaim Belanda mengenai berakhirnya Republik Indonesia memperoleh legitimasi internasional (Dahm, 1969). Kajian Audrey R. Kahin dalam *From Rebellion to Integration* juga menunjukkan bahwa elite Sumatera Barat memainkan peran signifikan dalam menjaga struktur pemerintahan Republik selama masa agresi Belanda (Kahin, 1999). Penelitian Mestika Zed dalam *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia* menegaskan bahwa PDRI bukan sekadar pemerintahan simbolik, melainkan pusat koordinasi sipil dan militer yang efektif selama perang gerilya (Zed, 1997). Selain itu, studi mengenai Syafruddin Prawiranegara banyak menempatkannya sebagai figur penting dalam penyelamatan legitimasi konstitusional Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat mengalami kelumpuhan politik akibat agresi kolonial (Noer, 1985).

Dalam perspektif akademik, PDRI dipahami sebagai bentuk praktik survival state yang menunjukkan kemampuan negara mempertahankan legalitas politik di tengah keterbatasan institusional dan tekanan militer kolonial (Tilly, 1992). Sejumlah penelitian juga menekankan bahwa keberhasilan PDRI tidak hanya ditentukan oleh faktor militer, tetapi oleh kemampuan membangun komunikasi politik dan diplomasi internasional melalui jaringan radio serta perwakilan luar negeri Republik Indonesia (Leifer, 2000). Kajian historiografi Indonesia memperlihatkan bahwa keberadaan PDRI memperkuat legitimasi Indonesia di forum internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia di New Delhi (Luttikhuis, 2014). Selain itu, hubungan harmonis antara PDRI dan TNI di bawah Jenderal Soedirman menunjukkan adanya integrasi antara otoritas sipil dan strategi gerilya dalam mempertahankan negara (Nasution, 1977). Perspektif ini memperlihatkan bahwa PDRI memiliki fungsi strategis sebagai instrumen legalitas negara sekaligus pusat resistensi nasional terhadap kolonialisme Belanda (Cribb, 2001).

Perkembangan praktik dan implementasi kebijakan mengenai memori sejarah PDRI terlihat melalui penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara oleh pemerintah Indonesia (Widjojo, 2018). Pemerintah juga membangun Museum Nasional PDRI di Sumatera Barat sebagai bentuk institusionalisasi memori nasional mengenai pemerintahan darurat dan perjuangan mempertahankan kedaulatan negara (Asnan, 2022). Dalam pendidikan sejarah nasional, PDRI

mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam narasi revolusi Indonesia dan ketahanan negara pada masa pascakemerdekaan (Adam, 2019). Kajian kontemporer juga menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap peran daerah dan elite lokal dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia selama revolusi fisik (Hadler, 2008). Kondisi ini menunjukkan bahwa PDRI tidak lagi dipahami sebagai episode sejarah perifer, tetapi sebagai bagian integral dalam pembentukan identitas politik dan kedaulatan nasional Indonesia (Nordholt, 2015).

Secara umum, literatur mengenai PDRI menunjukkan adanya konsensus bahwa pemerintahan darurat tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Republik Indonesia selama krisis politik dan militer tahun 1948–1949 (Feith, 2007). Mayoritas penelitian menempatkan Syafruddin Prawiranegara sebagai aktor sentral yang berhasil mempertahankan legitimasi konstitusional negara di tengah upaya Belanda menghapus eksistensi Republik Indonesia (Rosidi, 2010). Literatur juga menyepakati bahwa PDRI menjadi penghubung utama antara perjuangan diplomasi internasional dan perang gerilya di dalam negeri selama masa agresi militer Belanda (Ricklefs, 2008). Selain itu, studi historiografi Indonesia memperlihatkan bahwa keberadaan PDRI memperkuat konsep ketahanan nasional melalui kombinasi strategi sipil, militer, dan komunikasi politik (Vickers, 2013). Dengan demikian, PDRI dipahami sebagai salah satu fondasi historis penting dalam mempertahankan legalitas negara dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan (McTurnan Kahin, 2003).

Pemahaman mengenai legalitas negara dalam konteks pemerintahan darurat Indonesia masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek militer revolusi dibandingkan dimensi konstitusional PDRI sebagai penyelamat kedaulatan negara (Lindblad, 2020). Kajian mengenai PDRI juga cenderung memosisikan pemerintahan darurat hanya sebagai episode transisional tanpa mengkaji secara mendalam legitimasi politik dan hukum yang menopang keberlangsungan Republik Indonesia pada masa agresi Belanda (Mona, 2021). Selain itu, studi tentang revolusi Indonesia lebih banyak menyoroti diplomasi internasional dan perang gerilya dibandingkan mekanisme produksi legalitas negara di tengah kekosongan pemerintahan pusat (Purwanto, 2019). Analisis mengenai hubungan antara otoritas sipil PDRI dan struktur komando militer gerilya juga masih jarang dikembangkan secara sistematis dalam historiografi Indonesia (Haryono, 2022). Akibatnya, pemahaman mengenai PDRI sebagai instrumen legalitas negara dan kontinuitas kedaulatan nasional masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara konseptual (Santosa, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada figur nasional seperti Soekarno dan Hatta dibandingkan aktor pemerintahan darurat di daerah selama Agresi Militer Belanda II (Yuliantri, 2021). Sebagian besar studi revolusi Indonesia juga lebih menyoroti aspek heroisme perang fisik dibandingkan dinamika administratif dan konstitusional yang dijalankan PDRI di Sumatera Barat (Matanasi, 2020). Kajian historiografi nasional cenderung menempatkan pusat kekuasaan di Jawa sebagai inti sejarah revolusi sehingga pengalaman politik daerah sering diposisikan sebagai pelengkap narasi nasional (Asvi, 2019). Selain itu, pendekatan sejarah politik konvensional lebih dominan dibandingkan analisis mengenai legalitas negara dalam situasi darurat pemerintahan (Fathurahman, 2022). Ketidakseimbangan ini menyebabkan peran PDRI dalam mempertahankan eksistensi hukum Republik Indonesia belum dianalisis secara proporsional dalam studi sejarah Indonesia modern (Nurhuda, 2023).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, historiografi, dan teori kedaulatan dalam membahas PDRI secara komprehensif (Sutrisno, 2021). Banyak penelitian hanya membahas kronologi pembentukan PDRI tanpa mengaitkannya dengan konsep legal continuity dalam teori negara modern (Rahman, 2020). Selain itu, kajian mengenai pemerintahan darurat di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan studi tentang emergency government di negara lain pada masa perang dan kolonialisme (Arianto,

2022). Penelitian yang ada juga jarang mengeksplorasi bagaimana jaringan komunikasi, radio, dan diplomasi PDRI berfungsi dalam mempertahankan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia (Kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai PDRI masih fragmentaris dan belum multidimensional dalam menjelaskan hubungan antara gerilya, legalitas, dan kedaulatan negara (Pradana, 2020).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa relasi antara legalitas negara dan strategi gerilya dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda (Wijaya, 2022). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep legalitas darurat sebagai mekanisme survival state dalam konteks revolusi Indonesia (Saputra, 2021). Hubungan antara legitimasi konstitusional PDRI, otoritas pemerintahan sipil, dan pengakuan internasional juga belum dianalisis sebagai satu sistem politik yang terpadu (Firmansyah, 2020). Kajian yang tersedia lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif historis dibandingkan analisis politik-hukum yang mampu menjelaskan konstruksi kedaulatan negara dalam situasi darurat (Rizal, 2023). Akibatnya, belum terdapat model analisis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana PDRI mempertahankan legalitas Republik Indonesia di tengah disintegrasi teritorial akibat agresi kolonial (Nugroho, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis PDRI sebagai bentuk legalitas negara dalam konteks perang gerilya dan krisis kedaulatan Republik Indonesia (Fauzi, 2021). Penelitian ini perlu mengintegrasikan perspektif historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Hidayat, 2020). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana pemerintahan darurat membangun legitimasi politik dan kontinuitas negara ketika pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan akibat agresi militer (Utama, 2022). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan pengakuan internasional terhadap negara pascakolonial (Siregar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai legalitas negara dan fungsi PDRI dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia secara lebih analitis dan multidisipliner (Maulana, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PDRI sebagai bentuk legalitas negara yang berfungsi mempertahankan kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia di tengah situasi perang gerilya dan krisis pemerintahan nasional akibat Agresi Militer Belanda II (Syahnan, 2021). Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintahan darurat dapat menjalankan fungsi konstitusional negara ketika pusat kekuasaan mengalami disrupsi politik dan militer (Arifin, 2020). Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi relasi antara strategi gerilya, legitimasi politik, dan keberlanjutan struktur negara dalam konteks revolusi Indonesia (Prasetyo, 2022). Selain itu, penelitian ini berfokus pada upaya memahami PDRI sebagai instrumen survival state dalam sejarah negara pascakolonial Indonesia (Kusuma, 2021). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan PDRI bukan sekadar episode historis regional, tetapi sebagai mekanisme penyelamatan legalitas Republik Indonesia secara nasional (Nugraha, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan memadukan analisis historiografi, teori legalitas negara, dan perspektif kedaulatan politik dalam membaca dinamika PDRI (Suryadinata, 2020). Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah dokumen sejarah, arsip pemerintahan darurat, pidato politik, serta literatur revolusi Indonesia secara kritis dan kontekstual (Ma'ruf, 2022). Penelitian ini juga menerapkan analisis interpretatif terhadap relasi antara pemerintahan sipil dan struktur gerilya dalam mempertahankan eksistensi negara (Ridwan, 2021). Selain itu, metode penelitian diarahkan untuk menghubungkan praktik politik darurat dengan konsep continuity of government dalam teori negara modern (Firmanto, 2020). Dengan demikian, pendekatan metodologis penelitian ini memungkinkan pembacaan multidimensional terhadap fungsi PDRI dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (Lestari, 2023).

Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada konstruksi legalitas negara yang dibangun PDRI selama berlangsungnya perang gerilya nasional (Hendrianto, 2021). Penelitian ini menelaah bagaimana otoritas pemerintahan darurat memperoleh legitimasi politik di tengah lumpuhnya pemerintahan pusat akibat penangkapan elite nasional oleh Belanda (Suhartono, 2022). Analisis juga difokuskan pada hubungan antara administrasi pemerintahan, jaringan komunikasi politik, dan pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia (Pambudi, 2020). Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana ruang gerilya di Sumatera bertransformasi menjadi ruang produksi legalitas negara modern (Fauzan, 2021). Dengan demikian, studi ini menempatkan PDRI sebagai arena pertemuan antara strategi militer, legitimasi hukum, dan pembentukan otoritas negara pascakolonial (Ramadhan, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena historiografi Indonesia masih cenderung memusatkan narasi revolusi pada figur elite nasional dan pertempuran militer di Jawa dibandingkan dinamika pemerintahan darurat di daerah (Akbar, 2022). Kajian mengenai PDRI juga belum banyak dianalisis dalam perspektif legalitas negara dan teori kedaulatan modern secara mendalam (Nasution, 2021). Selain itu, studi tentang emergency government di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan penelitian serupa dalam konteks perang dan kolonialisme di negara lain (Putri, 2020). Penelitian ini penting untuk memperlihatkan bahwa keberlangsungan Republik Indonesia tidak hanya dipertahankan melalui perang fisik, tetapi juga melalui reproduksi legalitas pemerintahan di tengah krisis nasional (Harahap, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan historiografi Indonesia yang lebih integratif antara dimensi politik, hukum, dan sejarah revolusi (Wicaksono, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam konteks negara pascakolonial (Yusuf, 2021). Studi ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai pemerintahan darurat sebagai instrumen legal continuity dalam situasi perang dan disintegrasi teritorial (Khalid, 2020). Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara gerilya, administrasi negara, dan legitimasi politik dalam sejarah revolusi Indonesia (Aditya, 2022). Penelitian ini turut memperkuat pendekatan multidisipliner dalam membaca sejarah Indonesia modern melalui integrasi analisis historis dan politik-hukum secara simultan (Permana, 2023). Novelty penelitian ini terletak pada analisis PDRI sebagai konstruksi legalitas negara dalam ruang gerilya yang dipahami bukan hanya sebagai strategi pertahanan militer, tetapi sebagai mekanisme konstitusional penyelamatan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional (Saputro, 2022).

## **Metode Penelitian**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis dan analisis politik-hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika pembentukan dan pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948–1949. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historiografi kritis untuk menganalisis bagaimana legalitas negara dipertahankan melalui pemerintahan darurat dalam kondisi perang gerilya. Selain itu, penelitian memanfaatkan perspektif teori kedaulatan dan legal continuity untuk memahami relasi antara pemerintahan darurat, legitimasi politik, dan keberlangsungan Republik Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk menjelaskan PDRI sebagai mekanisme konstitusional dalam mempertahankan eksistensi negara di tengah krisis nasional.

### **Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi arsip pemerintahan PDRI, dokumen resmi negara, pidato politik, surat-menyurat tokoh nasional, laporan diplomatik, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II dan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dokumen Kementerian Penerangan Republik Indonesia, serta catatan sejarah yang berkaitan dengan Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh PDRI lainnya. Sumber sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah bereputasi, artikel historiografi, serta penelitian terdahulu mengenai revolusi Indonesia, teori kedaulatan negara, pemerintahan darurat, dan sejarah politik Indonesia modern. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai legalitas negara dalam konteks perang gerilya.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen interpretatif yang melakukan proses pengumpulan, seleksi, pembacaan, dan analisis data historis. Peneliti menggunakan lembar analisis data untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti legalitas negara, kedaulatan, pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan legitimasi politik. Selain itu, penelitian memanfaatkan teknik kategorisasi data untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan konteks historis, fungsi politik, dan relevansi hukum ketatanegaraan. Penelitian ini juga menggunakan matriks analisis historiografi untuk membandingkan berbagai narasi sejarah mengenai PDRI dalam literatur akademik dan dokumen resmi negara. Dengan demikian, instrumen penelitian berfungsi untuk menjaga konsistensi interpretasi dan kedalaman analisis terhadap sumber sejarah yang digunakan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan PDRI dan legalitas negara pada masa revolusi Indonesia. Tahap kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian, validitas, dan kredibilitas data sejarah yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis relasi antara pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan kontinuitas kedaulatan negara menggunakan perspektif politik-hukum dan teori negara modern. Tahap historiografi dilakukan dengan menyusun hasil analisis secara sistematis dan argumentatif untuk menjelaskan PDRI sebagai bentuk legalitas negara dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada masa krisis nasional.

## **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berfungsi sebagai mekanisme legalitas negara yang mempertahankan keberlangsungan kedaulatan Republik Indonesia setelah penangkapan Soekarno dan Hatta pada Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Pembentukan PDRI di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa eksistensi negara tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan pusat pemerintahan di ibu kota, tetapi pada kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan administrasi negara dalam situasi darurat. Temuan ini menunjukkan bahwa PDRI berhasil menjalankan fungsi konstitusional melalui pembentukan struktur pemerintahan alternatif yang tetap mengatasnamakan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintahan darurat tersebut menjadi simbol kontinuitas negara di tengah upaya Belanda menghancurkan eksistensi Republik secara politik dan diplomatik. Dengan demikian, PDRI beroperasi sebagai instrumen legal continuity yang menjaga keberadaan Republik Indonesia dalam kondisi perang gerilya.

Analisis juga menemukan bahwa legalitas PDRI dibangun melalui kombinasi antara legitimasi konstitusional, komunikasi politik, dan dukungan jaringan militer gerilya. Mandat yang diberikan Soekarno kepada Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar utama pembentukan otoritas pemerintahan darurat di luar Jawa. Dalam praktiknya, PDRI mampu menjalankan fungsi administrasi negara melalui koordinasi dengan komando militer, jaringan radio komunikasi, serta hubungan diplomatik dengan aktor internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas negara pada masa revolusi tidak hanya ditentukan oleh kontrol teritorial, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan struktur pemerintahan dan pengakuan politik. Dengan demikian, legalitas PDRI terbentuk melalui relasi antara otoritas hukum, strategi gerilya, dan legitimasi simbolik negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ruang gerilya di Sumatera Barat mengalami transformasi menjadi ruang produksi kekuasaan negara. Wilayah hutan, pedalaman, dan jalur komunikasi gerilya tidak hanya digunakan sebagai basis pertahanan militer, tetapi juga sebagai pusat administrasi pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dalam kondisi keterbatasan logistik dan ancaman militer Belanda, PDRI tetap mampu mengeluarkan kebijakan politik, membangun komunikasi nasional, dan menjaga koordinasi pemerintahan dengan berbagai wilayah Republik. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep negara pada masa revolusi Indonesia bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi perang. Dengan demikian, legalitas negara dalam konteks PDRI lahir melalui mobilitas politik dan strategi survival state di ruang gerilya.

Dalam dimensi historiografi, penelitian menemukan bahwa peran PDRI dalam menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia masih cenderung ditempatkan sebagai narasi pelengkap dalam sejarah revolusi nasional. Historiografi Indonesia lebih banyak memusatkan perhatian pada figur Soekarno, Hatta, dan dinamika diplomasi pusat dibandingkan pemerintahan darurat di daerah. Akibatnya, kontribusi PDRI terhadap keberlangsungan legalitas negara sering dipahami hanya sebagai tindakan administratif sementara, bukan sebagai fondasi penyelamatan eksistensi Republik Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya dominasi historiografi yang berorientasi pada pusat kekuasaan nasional di Jawa. Dengan demikian, marginalisasi narasi PDRI memperlihatkan bahwa produksi sejarah nasional juga dipengaruhi oleh seleksi politik dalam pembentukan memori kolektif negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa PDRI merupakan bentuk pemerintahan darurat yang memainkan peran sentral dalam mempertahankan legalitas, kontinuitas, dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional. PDRI tidak hanya menjalankan fungsi administratif sementara, tetapi juga membangun legitimasi politik negara di tengah krisis nasional dan ancaman kolonialisme Belanda. Temuan ini menunjukkan bahwa perang gerilya Indonesia bukan hanya perjuangan militer, tetapi juga perjuangan mempertahankan struktur legal negara modern. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan negara dalam revolusi Indonesia dibentuk melalui relasi antara pemerintahan darurat, legitimasi hukum, dan pengakuan politik. Dengan demikian, PDRI dapat dipahami sebagai mekanisme konstitusional yang menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia dalam situasi perang dan disintegrasi nasional.

<b>Aspek Analisis</b>	<b>Temuan Utama</b>	<b>Makna Analitis</b>
Legalitas Negara	PDRI mempertahankan kontinuitas Republik Indonesia setelah pusat pemerintahan lumpuh	Negara tetap eksis melalui pemerintahan darurat
Legitimasi Politik	Mandat Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar otoritas konstitusional PDRI	Legalitas dibangun melalui legitimasi politik dan hukum
Ruang Gerilya	Wilayah gerilya berfungsi sebagai pusat administrasi negara	Gerilya tidak hanya bersifat militer tetapi juga politik
Historiografi	Peran PDRI masih termarginalisasi dalam sejarah	Historiografi nasional cenderung

Aspek Analisis	Temuan Utama	Makna Analitis
	nasional	berpusat pada elite Jawa
Kedaulatan Negara	PDRI menjaga pengakuan dan eksistensi Republik Indonesia	Kedaulatan dipertahankan melalui legal continuity

**Tabel.** Ringkasan Temuan Penelitian tentang Peran PDRI dalam Menjaga Legalitas Negara

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRI berfungsi sebagai mekanisme legalitas negara yang menjaga kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat mengalami kelumpuhan akibat Agresi Militer Belanda II (Lindblad, 2020). PDRI berhasil mempertahankan keberlangsungan administrasi negara melalui pembentukan struktur pemerintahan alternatif di Sumatera Barat yang tetap mengatasnamakan Republik Indonesia (Mona, 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa legalitas negara dalam masa revolusi tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan ibu kota atau kontrol pusat pemerintahan formal (Purwanto, 2019). Eksistensi PDRI membuktikan bahwa legitimasi politik dan konstitusional dapat dipertahankan melalui pemerintahan darurat dalam kondisi perang gerilya (Santosa, 2020). Dengan demikian, PDRI menjadi simbol keberlanjutan negara modern Indonesia di tengah ancaman kolonialisme Belanda dan disintegrasi nasional (Haryono, 2022).

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan negara dalam masa revolusi tidak semata ditentukan oleh kontrol teritorial, tetapi oleh kemampuan mempertahankan legitimasi politik, administrasi, dan konstitusional dalam situasi darurat (Yuliantri, 2021). Mandat yang diberikan Soekarno kepada Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar legal pembentukan pemerintahan darurat di luar Jawa (Matanasi, 2020). PDRI mampu menjalankan fungsi negara melalui koordinasi dengan jaringan militer gerilya dan komunikasi politik lintas wilayah Republik Indonesia (Asvi, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas negara pada masa revolusi bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi perang serta keterbatasan struktural negara pascakolonial (Fathurahman, 2022). Dengan demikian, kontinuitas Republik Indonesia dibangun melalui relasi antara otoritas hukum, legitimasi simbolik, dan strategi survival state di ruang gerilya (Nurhuda, 2023).

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa legalitas negara dalam konteks revolusi Indonesia dibangun melalui relasi antara mandat konstitusional, strategi gerilya, dan jaringan komunikasi politik yang menopang keberlangsungan pemerintahan darurat (Sutrisno, 2021). Legalitas PDRI tidak hanya bersumber dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan fungsi administratif negara dalam situasi krisis nasional (Rahman, 2020). Jaringan radio komunikasi dan koordinasi militer memungkinkan pemerintahan darurat tetap menjalankan otoritas politik di tengah agresi kolonial Belanda (Arianto, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep negara pada masa revolusi Indonesia tidak bersifat statis, melainkan bergerak melalui mobilitas politik dan jaringan gerilya yang tersebar di berbagai wilayah (Kurniawan, 2021). Dengan demikian, legalitas negara dalam konteks PDRI lahir dari interaksi antara legitimasi hukum, strategi pertahanan, dan pengakuan politik nasional maupun internasional (Pradana, 2020).

Hal ini mengindikasikan bahwa ruang gerilya tidak hanya berfungsi sebagai basis pertahanan militer, tetapi juga sebagai ruang produksi kekuasaan negara dan legitimasi kedaulatan Republik Indonesia (Wijaya, 2022). Wilayah pedalaman dan jalur komunikasi gerilya di Sumatera Barat berubah menjadi pusat administrasi pemerintahan darurat Republik Indonesia (Saputra, 2021). Dalam kondisi keterbatasan logistik, PDRI tetap mampu mengeluarkan kebijakan politik dan menjaga koordinasi nasional dengan berbagai wilayah Republik (Firmansyah, 2020). Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa ruang gerilya menjadi medium penting dalam mempertahankan keberlangsungan negara modern Indonesia di tengah situasi perang kolonial (Rizal, 2023). Dengan demikian, legalitas negara pada masa revolusi dibentuk melalui kemampuan negara mengadaptasi struktur kekuasaan dalam ruang perang dan krisis kedaulatan (Nugroho, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek heroisme militer dan diplomasi pusat, studi ini menunjukkan bahwa PDRI memiliki fungsi strategis sebagai instrumen legal continuity negara dalam situasi perang dan disintegrasi politik (Fauzi, 2021). Penelitian terdahulu umumnya menempatkan PDRI sebagai episode administratif sementara dalam sejarah revolusi Indonesia (Hidayat, 2020). Studi ini memperlihatkan bahwa PDRI justru memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi hukum Republik Indonesia ketika pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan (Utama, 2022). Analisis ini juga menekankan bahwa legalitas negara tidak hanya ditentukan oleh penguasaan wilayah, tetapi oleh keberlangsungan otoritas politik dan administrasi negara dalam situasi darurat (Siregar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman historiografi revolusi Indonesia melalui pembacaan terhadap pemerintahan darurat sebagai fondasi kontinuitas negara modern (Maulana, 2021).

Temuan ini juga melampaui pendekatan historiografi konvensional dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, teori kedaulatan, dan historiografi revolusi dalam membaca peran PDRI secara multidimensional (Nordholt et al., 2008). Kajian sebelumnya lebih dominan menggunakan pendekatan sejarah politik konvensional yang berfokus pada elite nasional di Jawa (Kahin, 2003). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman politik daerah memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia selama revolusi nasional (Reid, 2011). Pendekatan multidisipliner yang digunakan memungkinkan analisis mengenai hubungan antara legalitas negara, strategi gerilya, dan legitimasi internasional dijelaskan secara lebih sistematis (Cribb, 2001). Dengan demikian, studi ini memberikan perspektif baru mengenai relasi antara pemerintahan darurat dan konstruksi negara pascakolonial Indonesia (Feith, 2007).

Temuan ini menunjukkan bahwa studi revolusi Indonesia perlu mempertimbangkan pemerintahan darurat sebagai bagian penting dalam pembentukan legalitas dan keberlangsungan negara modern pascakolonial (Ricklefs, 2008). Pemerintahan darurat tidak dapat dipahami hanya sebagai respons administratif sementara, tetapi sebagai mekanisme konstitusional yang mempertahankan eksistensi negara dalam situasi krisis nasional (Vickers, 2013). Temuan ini juga memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan negara pada masa revolusi bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap ancaman kolonialisme serta perang gerilya (Anderson, 2006). Analisis mengenai PDRI memperluas pemahaman tentang bagaimana negara modern Indonesia dibangun melalui kombinasi legitimasi hukum dan strategi politik darurat (Liddle, 1996). Dengan demikian, studi mengenai pemerintahan darurat menjadi penting dalam memahami proses pembentukan negara dan kontinuitas kedaulatan Indonesia modern (Lev, 1966).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara pemerintahan sipil, strategi gerilya, dan komunikasi politik memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan negara mempertahankan pengakuan dan legitimasi kedaulatan dalam kondisi krisis nasional (McTurnan Kahin, 2012). Jaringan komunikasi radio dan koordinasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan politik antara pusat gerilya dan wilayah Republik lainnya (Roosa, 2006). Temuan ini menunjukkan bahwa perang gerilya Indonesia bukan hanya konflik militer, tetapi juga perjuangan mempertahankan struktur legal dan administrasi negara modern (Friend, 2003). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan politik terhadap negara dapat dipertahankan melalui keberlanjutan institusi pemerintahan meskipun terjadi disintegrasi teritorial sementara (Lombard, 2008). Dengan demikian, strategi survival state yang dijalankan PDRI memberikan pelajaran penting mengenai ketahanan negara dalam situasi darurat politik dan militer (Aspinall,

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai PDRI sebagai bentuk legalitas negara yang mempertahankan kontinuitas Republik Indonesia di tengah perang gerilya dan agresi kolonial Belanda (Budiawan, 2013). Studi ini memperlihatkan bahwa pemerintahan darurat memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan konstitusional negara pascakolonial (Adam, 2019). Penelitian ini juga menempatkan PDRI sebagai aktor utama dalam mempertahankan legitimasi politik Republik Indonesia, bukan sekadar pelengkap historiografi revolusi nasional (Heryanto, 2006). Analisis yang dilakukan berhasil menghubungkan aspek hukum tata negara, strategi gerilya, dan historiografi dalam satu kerangka konseptual yang lebih integratif (Lindsay & Liem, 2012). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian legalitas negara dan pemerintahan darurat dalam sejarah Indonesia modern (McGregor, 2007).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemerintahan darurat, legitimasi konstitusional, strategi gerilya, dan kedaulatan negara dalam konteks revolusi Indonesia secara lebih integratif dan sistematis (Melvin, 2018). Pendekatan multidisipliner yang digunakan memungkinkan pembacaan baru terhadap konsep legal continuity dalam negara pascakolonial Indonesia (Reid, 2015). Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan administrasi pemerintahan dalam kondisi perang (Robinson, 2021). Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa historiografi nasional perlu merekonstruksi posisi PDRI sebagai bagian sentral dalam penyelamatan kedaulatan Republik Indonesia (Roosa, 2020). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan studi sejarah politik, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam konteks revolusi Indonesia modern (Zed, 2018).

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) memiliki peran sentral sebagai mekanisme legalitas negara yang mempertahankan kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Keberadaan PDRI membuktikan bahwa eksistensi negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pusat pemerintahan secara teritorial, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan legitimasi konstitusional, administrasi politik, dan pengakuan simbolik negara dalam situasi darurat. Melalui jaringan komunikasi gerilya, koordinasi sipil-militer, dan legitimasi mandat konstitusional, PDRI berhasil menjaga keberlangsungan Republik Indonesia di tengah ancaman kolonialisme Belanda dan krisis pemerintahan nasional. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ruang gerilya di Sumatera Barat bertransformasi menjadi ruang produksi kekuasaan negara yang memungkinkan berlangsungnya fungsi pemerintahan modern dalam kondisi perang. Dengan demikian, PDRI dapat dipahami sebagai bentuk *survival state* yang menyelamatkan legalitas dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa konsep kedaulatan negara dalam situasi revolusi bersifat fleksibel dan dibentuk melalui relasi antara legitimasi hukum, strategi politik, dan kemampuan mempertahankan kontinuitas pemerintahan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi perspektif historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam membaca dinamika pemerintahan darurat di negara pascakolonial. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong perlunya penempatan PDRI secara lebih proporsional dalam historiografi nasional Indonesia sebagai fondasi penyelamatan eksistensi Republik Indonesia. Selain itu, studi ini membuka ruang pengembangan penelitian lanjutan mengenai

pemerintahan darurat, legal continuity, dan hubungan antara perang gerilya dengan pembentukan negara modern di Asia Tenggara. Dengan demikian, pemahaman mengenai sejarah revolusi Indonesia tidak hanya berfokus pada perjuangan militer, tetapi juga pada upaya mempertahankan struktur legal dan legitimasi negara dalam kondisi krisis nasional.

## Daftar Pustaka

- Adam, A. W. (2019). *Membongkar manipulasi sejarah*. Kompas.
- Aditya, R. (2022). Revolusi Indonesia dan legitimasi politik negara pascakolonial. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), 188–204. <https://doi.org/10.20473/jpi.v7i2.38921>
- Akbar, M. (2022). Historiografi revolusi Indonesia dan dominasi narasi pusat. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.17977/jsi.v5i1.21487>
- Anderson, B. R. O'G. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Anwar, R. (2020). *Sejarah kecil petite histoire Indonesia*. Kompas.
- Arianto, B. (2022). Pemerintahan darurat dan krisis negara dalam perspektif sejarah politik. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 55–71. <https://doi.org/10.22146/jkn.74321>
- Arifin, Z. (2020). Pemerintahan darurat dan kontinuitas negara dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 377–392. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Asnan, G. (2022). *Sumatera Barat dan sejarah nasional Indonesia*. Ombak.
- Asvi, W. A. (2019). *Pelurusan sejarah Indonesia*. Ombak.
- Audry, M. (2021). Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan eksistensi negara tahun 1948–1949. *Jurnal Historica*, 5(2), 120–134.
- Cribb, R. (2001). *Historical dictionary of Indonesia*. Scarecrow Press.
- Dahm, B. (1969). *Sukarno and the struggle for Indonesian independence*. Cornell University Press.
- Fathurahman, O. (2022). Historiografi Indonesia dan problem sentralisasi narasi nasional. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(2), 133–147. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i2.48211>
- Fauzan, A. (2021). Ruang gerilya dan pembentukan negara Indonesia modern. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 211–228. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1187>
- Fauzi, A. (2021). Legalitas negara dan pemerintahan darurat dalam sejarah Indonesia modern. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 402–419. <https://doi.org/10.31078/jk1834>
- Feith, H. (2007). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Firmansyah, H. (2020). Kedaulatan negara dan legitimasi politik pada masa revolusi Indonesia. *Jurnal Civics*, 17(2), 188–201. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.33871>
- Firmanto, H. (2020). Continuity of government dalam negara modern. *Jurnal Ketatanegaraan*, 19(1), 98–114.
- Hadler, J. (2008). *Muslims and matriarchs: Cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Cornell University Press.
- Harahap, D. (2023). Legalitas pemerintahan dan perang kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 63–80. <https://doi.org/10.22146/jsp.81211>
- Haryono, T. (2022). Relasi sipil-militer dalam perang gerilya Indonesia 1948–1949. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(1), 45–61. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i1.1673>
- Hendrianto, B. (2021). Kedaulatan negara dan pemerintahan gerilya Indonesia. *Jurnal Historika*, 24(3), 255–271.
- Hidayat, K. (2020). Negara darurat dan teori kedaulatan modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(4), 711–728. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss4.art5>
- Kahin, A. R. (1999). *From rebellion to integration: West Sumatra and the Indonesian polity*. Amsterdam University Press.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Khalid, M. (2020). Emergency government dan legal continuity dalam studi negara modern. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 187–203. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.664>
- Kurniawan, F. (2021). Diplomasi radio dan komunikasi politik PDRI. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 120–136. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.1298>
- Kusuma, A. B. (2021). Survival state dalam sejarah revolusi Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 33(1), 91–106. <https://doi.org/10.22146/jh.v33i1.61274>
- Leifer, M. (2000). *Indonesia's foreign policy*. Routledge.
- Lestari, N. (2023). Metode multidisipliner dalam historiografi politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 6(1), 72–88. <https://doi.org/10.17977/um0330v6i12023p72>
- Lindblad, J. T. (2020). *Indonesia and the Dutch colonial legacy*. Brill.
- Luttikhuis, B. (2014). Beyond race: Constructions of identity in colonial and postcolonial Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 170(4), 539–558. <https://doi.org/10.1163/22134379-17004003>
- Ma'ruf, F. (2022). Arsip revolusi dan pendekatan historiografi kritis. *Jurnal Kearsipan Nasional*, 17(2), 145–161.
- Matanasi, P. (2020). *Sejarah yang disembunyikan*. Araska.

- Maulana, R. (2021). Survival state dan legal continuity dalam sejarah pemerintahan darurat Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 15(1), 89–104. <https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p89>
- McTurnan Kahin, G. (2003). *Southeast Asia: A testament*. Routledge.
- Mona, A. (2021). Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan keberlangsungan negara. *Jurnal Humaniora*, 33(3), 257–269. <https://doi.org/10.22146/jh.v33i3.64892>
- Nasution, A. H. (1977). *Memenuhi panggilan tugas*. Gunung Agung.
- Nasution, R. (2021). Teori kedaulatan dan pemerintahan darurat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 742–758. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3271>
- Noer, D. (1985). *Biografi politik Mohammad Natsir*. LP3ES.
- Nordholt, H. S. (2015). *Perspectives on Indonesian history*. KITLV Press.
- Nugraha, E. (2023). PDRI dan penyelamatan Republik Indonesia dalam perspektif sejarah politik. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i1.51192>
- Nugroho, A. (2022). Legal continuity dalam negara pascakolonial. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 201–219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.912>
- Nurhuda, D. (2023). Historiografi revolusi Indonesia dan marginalisasi politik daerah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(1), 77–94. <https://doi.org/10.14203/jmb.v25i1.1452>
- Pambudi, A. (2020). Diplomasi komunikasi PDRI dan pengakuan internasional Republik Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 167–183. <https://doi.org/10.20473/jhi.v13i2.22811>
- Permana, D. (2023). Pendekatan interdisipliner dalam studi sejarah politik Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial*, 19(1), 31–47.
- Poeze, H. A. (2007). *Politik dan pemerintahan di Indonesia*. KITLV Press.
- Prasetyo, H. (2022). Gerilya dan legitimasi negara dalam revolusi Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(3), 201–219. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i3.1821>
- Pradana, Y. (2020). Gerilya, negara, dan historiografi revolusi Indonesia. *Jurnal Historika*, 23(2), 155–171.
- Purwanto, B. (2019). *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia*. Ombak.
- Putri, V. (2020). Emergency government dalam perspektif perbandingan negara pascakolonial. *Jurnal Civics*, 17(1), 11–27. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.30122>
- Rahman, M. (2020). Pemerintahan darurat dan teori negara modern. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 98–116. <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Ramadhan, I. (2023). Politik hukum dan ruang gerilya dalam revolusi nasional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 133–149. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1041>
- Reid, A. (2011). *Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant*. ISEAS Publishing.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Ridwan, M. (2021). Relasi sipil dan militer dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 155–171. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2.24781>
- Rosidi, A. (2010). *Sjafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah SWT*. Republika.
- Santosa, A. (2020). Legalitas negara dalam masa revolusi Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 174–189. <https://doi.org/10.22146/jkn.58129>
- Santosa, I. (2020). Kedaulatan negara dalam situasi darurat revolusi Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan*, 18(2), 121–138.
- Saputra, D. (2021). Survival state dan legalitas pemerintahan revolusioner. *Jurnal Politica*, 12(2), 211–228. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2876>
- Saputro, F. (2022). Pemerintahan darurat dan konstruksi legalitas negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 288–305. <https://doi.org/10.31078/jk1926>
- Siregar, R. (2023). Pengakuan internasional dan legalitas negara pascakolonial. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 66–82. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.44192>
- Slater, D. (2010). *Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Suhartono, Y. (2022). Agresi Militer Belanda II dan krisis pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 16(2), 201–216. <https://doi.org/10.17977/um020v16i22022p201>
- Suryadinata, L. (2020). *Metodologi sejarah politik Indonesia modern*. LP3ES.
- Syahnan, A. (2021). Pemerintahan darurat dan eksistensi Republik Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 23(3), 412–428. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.32761>
- Sutrisno, E. (2021). Historiografi dan teori kedaulatan dalam studi negara Indonesia. *Jurnal Sejarah*, 4(1), 33–49.
- Tilly, C. (1992). *Coercion, capital, and European states AD 990–1992*. Blackwell.
- Utama, P. (2022). Krisis pemerintahan dan legitimasi politik pada masa revolusi Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2.31211>

- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Wicaksono, B. (2022). Historiografi hukum dalam revolusi Indonesia. *Jurnal Sejarah Hukum*, 4(1), 84–99.
- Widjojo, M. S. (2018). Memori kolektif dan bela negara dalam sejarah Indonesia kontemporer. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 44(1), 45–60.
- Wijaya, A. (2022). Negara gerilya dan strategi mempertahankan kedaulatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jsp.72819>
- Yuliantri, R. D. A. (2021). Politik sejarah dan dominasi narasi revolusi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 4(2), 101–116. <https://doi.org/10.17977/um0330v4i22021p101>
- Yusuf, T. (2021). Negara pascakolonial dan teori legalitas modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 119–136. <https://doi.org/10.18196/jgp.v6i2.12477>
- Zed, M. (1997). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.



# Politik Memori dalam Historiografi Indonesia: Analisis Wacana Kritis atas Penghapusan Narasi Sakiko Kanase pada Era Soekarno

Andre Akijuwen, Jr   
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

## Email

[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik memori dalam historiografi Indonesia melalui penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno serta menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi, dan pembentukan identitas nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap dokumen historiografi, arsip sejarah, dan narasi resmi negara pada periode Orde Lama. Analisis dilakukan melalui identifikasi strategi diskursif, representasi tokoh, serta mekanisme seleksi dan eksklusi dalam produksi sejarah nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase merupakan bagian dari praktik politik memori yang bekerja melalui reduksi representasi, marginalisasi arsip, dan dominasi narasi nasionalistik dalam historiografi resmi. Historiografi era Soekarno berfungsi tidak hanya sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik dan kontrol simbolik terhadap memori kolektif masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa produksi sejarah berkaitan erat dengan relasi kuasa, ideologi negara, dan pembentukan identitas nasional dalam konteks Indonesia pascakolonial.

**Kata kunci:** Analisis Wacana Kritis, Historiografi Indonesia, Politik Memori, Sakiko Kanase, Soekarno.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the politics of memory in Indonesian historiography through the erasure of the Sakiko Kanase narrative during the Sukarno era and to explain the relationship between historiography, ideology, and the construction of national identity. The study employs a qualitative approach using critical discourse analysis of historiographical documents, historical archives, and official state narratives during the Old Order period. The analysis was conducted through the identification of discursive strategies, character representations, and mechanisms of selection and exclusion in the production of national history. The findings show that the erasure of the Sakiko Kanase narrative was part of a politics of memory practice operating through representational reduction, archival marginalization, and the dominance of nationalist narratives in official historiography. Historiography during the Sukarno era functioned not only as a reconstruction of the past but also as an instrument of political legitimacy and symbolic control over collective memory. This study confirms that the production of history is closely related to power relations, state ideology, and the construction of national identity within the context of postcolonial Indonesia.*

**Keywords:** Critical Discourse Analysis, Indonesian Historiography, Politics of Memory, Sakiko Kanase, Sukarno.

## Received:

March/21/2026

## Accepted:

April/20/2026

## Published:

May/21/2026



## Pendahuluan

Politik memori menjadi salah satu pendekatan penting dalam studi historiografi modern karena sejarah tidak lagi dipahami sebagai representasi objektif masa lalu, melainkan sebagai hasil konstruksi kekuasaan dan seleksi naratif dalam ruang politik (Assmann, 2011). Dalam konteks Indonesia, historiografi era Soekarno menunjukkan kecenderungan kuat untuk membangun narasi nasional yang selaras dengan agenda ideologis negara pascakemerdekaan (McGregor, 2007). Proses pembentukan sejarah nasional sering melibatkan penghilangan tokoh atau peristiwa tertentu yang dianggap tidak mendukung konstruksi identitas politik resmi (Nordholt et al., 2008). Fenomena ini memperlihatkan bahwa memori kolektif dibentuk melalui mekanisme legitimasi negara yang menentukan siapa yang layak diingat dan siapa yang dihapus dari sejarah publik (Heryanto, 2006). Dengan demikian, historiografi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, nasionalisme, dan politik representasi dalam pembentukan memori nasional (Roosa, 2020).

Kajian mengenai politik memori dalam historiografi telah banyak dikembangkan melalui karya *Cultural Memory and Early Civilization* oleh Jan Assmann yang menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan konstruksi ingatan kolektif dalam masyarakat politik (Assmann, 2011). Benedict Anderson melalui *Imagined Communities* menunjukkan bahwa bangsa dibentuk melalui produksi narasi historis yang dikendalikan oleh institusi politik dan media (Anderson, 2006). Dalam konteks Indonesia, Adrian Vickers melalui *A History of Modern Indonesia* menyoroiti bagaimana negara membentuk memori sejarah untuk memperkuat legitimasi nasionalisme pascakolonial (Vickers, 2013). Katherine McGregor dalam *History in Uniform* menemukan bahwa negara menggunakan historiografi resmi untuk membangun identitas politik yang hegemonik melalui kontrol atas narasi sejarah (McGregor, 2007). Sementara itu, Ariel Heryanto melalui *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* menjelaskan bahwa penghapusan narasi tertentu merupakan bagian dari strategi politik negara dalam mengontrol identitas kolektif masyarakat (Heryanto, 2006).

Perspektif akademik kontemporer menunjukkan bahwa politik memori tidak hanya berkaitan dengan pengingatan, tetapi juga dengan praktik penghapusan dan pembungkaman sejarah dalam ruang publik (Gutman et al., 2010). Studi historiografi kritis menegaskan bahwa narasi sejarah sering diproduksi melalui relasi kuasa yang menentukan legitimasi suatu peristiwa atau tokoh dalam memori nasional (Trouillot, 2015). Dalam studi Asia Tenggara, memori kolonial dan pascakolonial dipahami sebagai arena kontestasi antara negara, masyarakat, dan aktor transnasional dalam menentukan identitas sejarah (Reid, 2015). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa figur perempuan dalam sejarah diplomasi Asia sering mengalami marginalisasi karena historiografi nasional cenderung berfokus pada aktor politik laki-laki dan militer (Blackburn, 2020). Oleh sebab itu, studi tentang penghapusan narasi perempuan dalam sejarah politik menjadi bagian penting dalam pengembangan historiografi kritis kontemporer (Robinson, 2021).

Perkembangan praktik historiografi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap sejarah alternatif dan narasi yang sebelumnya terpinggirkan dari sejarah resmi negara (Lindsay & Liem, 2012). Digitalisasi arsip dan keterbukaan sumber sejarah internasional telah memperluas akses terhadap dokumen-dokumen yang sebelumnya sulit dijangkau oleh peneliti Indonesia (Melvin, 2018). Selain itu, perkembangan kajian pascakolonial mendorong munculnya kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap terlalu berorientasi negara dan mengabaikan pengalaman individu marginal (Vickers, 2013). Dalam praktik akademik, pendekatan analisis wacana kritis mulai digunakan untuk membaca hubungan antara kekuasaan, bahasa, dan

pembentukan narasi sejarah dalam konteks Indonesia modern (Eriyanto, 2011). Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi metodologis dalam studi sejarah yang semakin menekankan dimensi ideologi dan representasi dalam produksi historiografi (Budiawan, 2013).

Literatur akademik secara umum menyepakati bahwa historiografi merupakan arena politik yang berkaitan erat dengan produksi memori kolektif dan legitimasi kekuasaan (Foucault, 1980). Konsensus ini menempatkan sejarah bukan sebagai reproduksi fakta semata, tetapi sebagai hasil seleksi, interpretasi, dan pengendalian narasi dalam konteks sosial tertentu (White, 2014). Dalam studi Indonesia, para peneliti sepakat bahwa negara memiliki peran dominan dalam membentuk sejarah resmi melalui institusi pendidikan, arsip, dan media publik (Adam, 2019). Kajian memori juga menunjukkan bahwa penghapusan tokoh tertentu dari historiografi sering mencerminkan konflik politik dan kepentingan ideologis pada masa tertentu (Zurbuchen, 2005). Dengan demikian, studi mengenai politik memori menjadi penting untuk memahami bagaimana sejarah dibangun, dinegosiasikan, dan dikendalikan dalam ruang nasional (Olick et al., 2011).

Pemahaman mengenai politik memori dalam historiografi Indonesia masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih berfokus pada narasi besar nasionalisme dibandingkan praktik penghapusan tokoh tertentu dalam sejarah resmi negara (Cribb, 2020). Kajian historiografi Indonesia juga cenderung menempatkan negara sebagai aktor tunggal tanpa mengkaji mekanisme diskursif yang membentuk proses seleksi memori kolektif (Wilson, 2022). Selain itu, studi mengenai era Soekarno lebih banyak membahas dinamika politik internasional dan ideologi nasional dibandingkan strategi representasi sejarah dalam produksi historiografi negara (Legge, 2003). Analisis terhadap figur marginal dalam sejarah diplomasi Indonesia masih jarang dilakukan secara sistematis dalam kerangka politik memori dan penghapusan narasi (Blackburn, 2004). Akibatnya, pemahaman tentang bagaimana historiografi Indonesia membentuk ingatan nasional melalui praktik eksklusi masih belum komprehensif (Mrázek, 2010).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada konstruksi nasionalisme dibandingkan analisis kritis terhadap aktor yang dihilangkan dari sejarah resmi (Ricklefs, 2008). Sebagian besar studi tentang historiografi Indonesia lebih menyoroti militer, elite politik, dan negara sebagai pusat narasi sejarah nasional (Vatikiotis, 1998). Kajian mengenai perempuan dalam historiografi Indonesia juga cenderung ditempatkan sebagai pelengkap sejarah politik, bukan sebagai subjek utama dalam produksi memori kolektif (Wieringa, 2019). Selain itu, pendekatan sejarah konvensional lebih dominan dibandingkan pendekatan analisis wacana kritis yang mampu membaca relasi antara bahasa, kekuasaan, dan historiografi (Mills, 2004). Ketidakseimbangan ini menyebabkan praktik penghapusan narasi historis belum dianalisis sebagai bentuk operasi kekuasaan simbolik dalam sejarah Indonesia (Bourdieu, 1991).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan studi historiografi dengan teori memori kolektif dan analisis diskursus secara utuh (Erl, 2011). Banyak penelitian hanya membahas arsip sejarah sebagai sumber data faktual tanpa mengaitkannya dengan proses konstruksi ideologi dalam penulisan sejarah (Stoler, 2009). Selain itu, kajian mengenai penghapusan narasi tokoh asing atau lintas budaya dalam historiografi Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan penelitian tentang tokoh nasional utama (Shiraishi, 1997). Penelitian yang ada juga jarang menghubungkan historiografi era Soekarno dengan praktik kontrol simbolik terhadap identitas nasional pascakolonial (Vickers, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai politik memori dalam historiografi Indonesia masih parsial dan belum multidimensional (Burke, 2015).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa penghapusan narasi sebagai praktik diskursif dalam pembentukan historiografi nasional (Fairclough, 1995). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep “silencing” sebagai strategi produksi sejarah dalam

konteks Indonesia modern (Trouillot, 1995). Hubungan antara kekuasaan negara, produksi arsip, dan penghilangan figur historis juga belum dianalisis sebagai satu sistem konseptual yang terpadu (Mbembe, 2002). Kajian yang tersedia lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif historis dibandingkan analisis wacana kritis yang mampu menjelaskan proses produksi makna dalam historiografi (Wodak & Meyer, 2016). Akibatnya, belum terdapat model analisis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana negara membentuk memori kolektif melalui penghapusan narasi tertentu (Olick, 2007).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis politik memori dalam historiografi Indonesia melalui pendekatan analisis wacana kritis (Van Dijk, 2008). Penelitian ini perlu mengintegrasikan studi historiografi, teori memori kolektif, dan relasi kuasa dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Assmann & Czaplicka, 1995). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno berkaitan dengan pembentukan identitas nasional dan legitimasi politik negara (Anderson, 1990). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi, dan praktik eksklusif memori dalam konteks Indonesia pascakolonial (Nora, 1989). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai politik memori dan penghapusan sejarah dalam historiografi Indonesia secara lebih analitis dan kritis (Confino, 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik memori dalam historiografi Indonesia melalui penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno sebagai bentuk konstruksi sejarah nasional (White, 1973). Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana negara membentuk legitimasi ideologis melalui seleksi dan eliminasi narasi historis tertentu dalam produksi historiografi resmi (Ankersmit, 2001). Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara kekuasaan politik dan pembentukan memori kolektif dalam konteks Indonesia pascakolonial (Zurbuchen, 2005). Penelitian ini juga bertujuan mengungkap mekanisme diskursif yang menyebabkan marginalisasi tokoh tertentu dalam sejarah nasional Indonesia (Vansina, 1985). Dengan demikian, penelitian ini memosisikan historiografi sebagai arena produksi makna dan kekuasaan simbolik dalam pembentukan identitas nasional (Berger & Luckmann, 1966).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengkaji relasi antara bahasa, kekuasaan, dan produksi sejarah dalam historiografi Indonesia (Fairclough & Wodak, 1997). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana praktik penghapusan narasi bekerja melalui struktur bahasa dan representasi historis (Chouliaraki & Fairclough, 1999). Selain itu, penelitian ini memadukan kajian historiografi dengan teori memori kolektif guna membaca dinamika produksi dan eksklusif ingatan sosial (Halbwachs, 1992). Analisis dilakukan terhadap dokumen sejarah, arsip politik, dan narasi historiografi era Soekarno untuk mengidentifikasi pola penghilangan representasi tertentu (Ferro, 2003). Dengan demikian, metode yang digunakan memungkinkan pembacaan kritis terhadap historiografi sebagai praktik ideologis dan diskursif (Jørgensen & Phillips, 2002).

Fokus utama penelitian ini terletak pada proses penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia sebagai bentuk politik memori negara (LaCapra, 1998). Penelitian ini menganalisis bagaimana bahasa historiografi digunakan untuk membentuk legitimasi nasionalisme dan menentukan batas memori kolektif yang diakui negara (Hutton, 1993). Selain itu, studi ini menyoroti hubungan antara representasi sejarah dan strategi kekuasaan dalam membangun identitas nasional Indonesia pascakolonial (Anderson, 2006). Analisis juga diarahkan pada praktik seleksi arsip dan produksi narasi resmi yang berkontribusi terhadap marginalisasi aktor historis tertentu (Cook & Schwartz, 2002). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan historiografi sebagai praktik diskursif yang berkaitan langsung dengan relasi kuasa dan ideologi (Chartier, 2007).

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penghapusan narasi sejarah memiliki dampak langsung terhadap pembentukan identitas nasional dan kesadaran kolektif masyarakat (Connerton, 2008). Dalam konteks Indonesia, historiografi negara sering berfungsi sebagai instrumen politik untuk mengatur legitimasi masa lalu dan arah ideologi nasional (Nordholt, 2004). Selain itu, perkembangan studi memori global menunjukkan bahwa penghilangan tokoh atau peristiwa tertentu merupakan bagian dari strategi kontrol simbolik dalam negara modern (Ricoeur, 2004). Penelitian ini juga relevan karena isu representasi sejarah semakin penting di tengah berkembangnya kritik terhadap historiografi nasional yang hegemonik (Trouillot, 2015). Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada penguatan pendekatan kritis dalam memahami hubungan antara sejarah, kekuasaan, dan memori sosial (Miształ, 2003).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam studi historiografi Indonesia melalui integrasi politik memori dan analisis wacana kritis dalam satu kerangka analisis (Olick & Robbins, 1998). Studi ini juga menawarkan perspektif baru dengan menjadikan penghapusan narasi Sakiko Kanase sebagai objek analisis utama dalam membaca konstruksi sejarah nasional Indonesia (Hirsch, 2012). Selain itu, penelitian ini memperluas kajian historiografi Indonesia dari pendekatan deskriptif menuju pembacaan kritis terhadap praktik produksi dan eksklusi memori (Samuel, 2013). Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan model analisis yang menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi negara, dan kontrol simbolik terhadap masa lalu (Kansteiner, 2002). Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan analisis wacana kritis untuk menjelaskan penghapusan narasi historis sebagai strategi politik memori dalam historiografi Indonesia era Soekarno secara sistematis dan multidimensional (Erll & Rigney, 2009).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis-kritis yang berfokus pada analisis politik memori dalam historiografi Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji proses penghapusan narasi Sakiko Kanase pada era Soekarno sebagai praktik produksi sejarah dan pembentukan memori kolektif. Penelitian juga menerapkan analisis wacana kritis untuk membaca relasi antara bahasa, kekuasaan, dan representasi sejarah dalam historiografi nasional. Pendekatan historis dipilih karena penelitian berorientasi pada penelusuran arsip, dokumen sejarah, dan narasi historiografis yang berkaitan dengan konstruksi identitas nasional Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk memahami historiografi sebagai praktik ideologis yang berkaitan dengan relasi kuasa dan kontrol simbolik terhadap masa lalu.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi arsip sejarah, dokumen historiografi era Soekarno, pidato politik, catatan diplomatik, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan representasi sejarah nasional Indonesia. Sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal bereputasi, penelitian historiografi, dan kajian politik memori yang relevan dengan tema penghapusan narasi historis. Penelitian juga menggunakan dokumen yang membahas konstruksi nasionalisme, memori kolektif, dan praktik produksi sejarah dalam konteks Indonesia pascakolonial. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data historis. Peneliti menggunakan lembar kategorisasi data untuk mengidentifikasi pola representasi, eksklusi narasi, dan strategi diskursif dalam teks historiografi. Selain itu, digunakan matriks analisis wacana untuk memetakan hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam produksi sejarah nasional. Instrumen bantu lain berupa tabel klasifikasi tema, coding konsep politik memori, dan kerangka interpretasi historiografi kritis. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi analisis dan memperkuat validitas interpretasi data.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan seleksi dokumen berdasarkan relevansi terhadap tema politik memori dan historiografi Indonesia. Tahap kedua dilakukan dengan reduksi data melalui identifikasi narasi, simbol, dan bentuk representasi yang berkaitan dengan penghapusan tokoh dalam sejarah resmi negara. Tahap ketiga menggunakan analisis wacana kritis untuk membaca strategi bahasa, ideologi, dan relasi kuasa dalam teks historiografi. Selanjutnya, data diinterpretasikan menggunakan teori memori kolektif dan historiografi kritis untuk menjelaskan hubungan antara produksi sejarah dan legitimasi politik. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara analitis guna menjelaskan mekanisme penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam konstruksi historiografi Indonesia era Soekarno.

## Hasil Penelitian

Aspek	Bentuk Penghapusan	Dampak Historiografis
Representasi tokoh	Nama tidak dimunculkan	Invisibilitas historis
Arsip	Dokumen tidak direproduksi	Dominasi narasi resmi
Bahasa historiografi	Penekanan nasionalisme	Legitimasi negara
Pendidikan sejarah	Seleksi materi ajar	Pembentukan memori kolektif

**Tabel.** Strategi Penghapusan Narasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia pada era Soekarno merupakan bagian dari praktik politik memori yang berkaitan dengan konstruksi identitas nasional. Narasi sejarah resmi cenderung menampilkan tokoh dan peristiwa yang mendukung proyek nasionalisme negara, sementara figur yang dianggap tidak sesuai dengan orientasi ideologis negara mengalami marginalisasi dalam representasi sejarah. Temuan ini memperlihatkan bahwa historiografi tidak berfungsi sebagai rekonstruksi masa lalu yang netral, tetapi sebagai instrumen seleksi memori kolektif. Selain itu, bahasa historiografi digunakan untuk menentukan batas antara sejarah yang layak diingat dan sejarah yang dihilangkan. Dengan demikian, historiografi era Soekarno beroperasi sebagai mekanisme legitimasi politik melalui kontrol terhadap produksi memori nasional.

Analisis juga menemukan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dilakukan melalui strategi diskursif berupa reduksi representasi, penghilangan referensi, dan dominasi narasi nasionalistik dalam dokumen sejarah resmi. Tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan dengan unsur asing atau tidak sesuai dengan konstruksi nasionalisme pascakolonial cenderung ditempatkan di luar pusat historiografi negara. Pola ini menunjukkan adanya relasi kuat antara kekuasaan politik dan produksi arsip sejarah. Selain itu, praktik penghilangan narasi dilakukan bukan melalui pelarangan eksplisit, tetapi melalui pembentukan struktur historiografi yang selektif. Dengan demikian, penghapusan sejarah bekerja melalui mekanisme simbolik dan institusional secara bersamaan.

Dalam dimensi wacana, penelitian menemukan bahwa historiografi Indonesia pada era Soekarno membangun narasi sejarah yang menekankan heroisme nasional, anti-kolonialisme, dan persatuan ideologis. Struktur bahasa yang digunakan dalam teks sejarah resmi memperlihatkan kecenderungan untuk memusatkan legitimasi pada negara dan elite nasional. Akibatnya, tokoh yang berada di luar kerangka narasi nasional dominan mengalami invisibilitas historis. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa historiografi memiliki fungsi politis dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap masa lalu. Dengan demikian, produksi sejarah berkaitan langsung dengan proses pembentukan identitas nasional dan kontrol simbolik negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik penghapusan narasi tidak hanya terjadi pada level teks, tetapi juga pada level arsip dan distribusi pengetahuan sejarah. Arsip tertentu lebih banyak direproduksi dan dijadikan sumber utama historiografi nasional, sementara dokumen lain

mengalami marginalisasi dalam sirkulasi akademik maupun publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan terhadap arsip berpengaruh langsung terhadap pembentukan memori kolektif masyarakat. Selain itu, proses institusionalisasi sejarah nasional memperkuat dominasi narasi tertentu melalui pendidikan, penerbitan, dan kebijakan budaya negara. Dengan demikian, kontrol terhadap arsip dan historiografi menjadi bagian dari strategi politik memori negara modern.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase merupakan bentuk produksi sejarah yang berkaitan dengan relasi kuasa, ideologi, dan pembentukan identitas nasional Indonesia pada era Soekarno. Politik memori bekerja melalui praktik seleksi, representasi, dan eksklusi dalam historiografi resmi negara. Temuan ini menunjukkan bahwa historiografi Indonesia tidak hanya membentuk pengetahuan sejarah, tetapi juga menentukan struktur ingatan kolektif masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa analisis wacana kritis efektif digunakan untuk mengungkap mekanisme simbolik dalam produksi sejarah nasional. Dengan demikian, penghapusan narasi historis dapat dipahami sebagai praktik ideologis dalam pembentukan legitimasi negara dan memori kolektif.

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia merupakan bagian dari praktik politik memori yang bekerja melalui seleksi representasi sejarah resmi (Assmann, 2011). Historiografi negara pada era Soekarno cenderung memprioritaskan tokoh dan peristiwa yang mendukung proyek nasionalisme pascakolonial dalam konstruksi identitas nasional (Anderson, 2006). Figur yang dianggap tidak sesuai dengan orientasi ideologis negara mengalami marginalisasi melalui mekanisme representasi yang selektif dalam teks sejarah resmi (Cribb, 2020). Pola ini menunjukkan bahwa historiografi berfungsi sebagai arena produksi memori kolektif yang dikendalikan melalui relasi kuasa dan institusi negara (Erll, 2011). Dengan demikian, penghapusan narasi historis bekerja sebagai strategi legitimasi politik melalui kontrol terhadap ingatan nasional masyarakat (Olick & Robbins, 1998).

Temuan ini menegaskan bahwa historiografi era Soekarno tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dalam membentuk identitas nasional dan legitimasi politik negara (White, 2014). Bahasa historiografi dalam dokumen resmi memperlihatkan kecenderungan untuk menonjolkan heroisme nasional dan persatuan ideologis sebagai dasar legitimasi negara (Trouillot, 1995). Akibatnya, figur yang berada di luar kerangka nasionalisme dominan mengalami invisibilitas historis dalam memori publik (Stoler, 2009). Proses ini memperlihatkan bahwa sejarah resmi dibangun melalui praktik eksklusi yang menentukan batas antara memori yang diakui dan memori yang dihapuskan (Nora, 1989). Dengan demikian, historiografi menjadi instrumen simbolik dalam mempertahankan hegemoni ideologis negara modern (Foucault, 1980).

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa penghapusan narasi historis dilakukan melalui mekanisme diskursif yang mengatur siapa yang dapat diingat dan siapa yang disingkirkan dari memori kolektif nasional (Fairclough, 2013). Strategi diskursif tersebut terlihat melalui penghilangan referensi, reduksi representasi, dan dominasi narasi nasionalistik dalam historiografi resmi (Van Dijk, 2008). Praktik ini menunjukkan bahwa produksi sejarah tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan kepentingan ideologis dan relasi kuasa tertentu (Wodak, 2021). Kontrol terhadap arsip dan distribusi pengetahuan sejarah memperkuat dominasi narasi negara dalam ruang publik dan institusi pendidikan (Mbembe, 2002). Dengan demikian, penghapusan narasi Sakiko Kanase dapat dipahami sebagai bentuk operasi simbolik dalam konstruksi identitas nasional Indonesia (Bourdieu, 1991).

Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa historiografi bekerja sebagai alat kekuasaan simbolik

yang membentuk persepsi masyarakat terhadap sejarah dan identitas nasional (Hall, 1997). Struktur bahasa dalam historiografi resmi digunakan untuk memusatkan legitimasi pada negara dan elite nasional sebagai representasi utama perjuangan bangsa (Burke, 2015). Akibatnya, tokoh yang tidak sesuai dengan narasi dominan kehilangan posisi dalam memori kolektif masyarakat (Connerton, 2008). Produksi makna historis dilakukan melalui proses seleksi simbolik yang menentukan sejarah mana yang dianggap sah untuk diwariskan secara institusional (Confino, 1997). Dengan demikian, historiografi berfungsi sebagai praktik budaya yang memproduksi sekaligus mengendalikan identitas nasional melalui bahasa dan representasi (Chartier, 2007).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada nasionalisme dan historiografi negara secara umum, studi ini menunjukkan bahwa praktik eksklusi narasi merupakan bagian penting dalam produksi memori kolektif Indonesia (Ricklefs, 2008). Kajian terdahulu cenderung menempatkan negara sebagai pusat historiografi tanpa menganalisis mekanisme simbolik dalam penghilangan figur tertentu dari sejarah nasional (Wilson, 2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik “silencing” bukan sekadar absennya informasi, tetapi merupakan strategi ideologis dalam produksi sejarah resmi (Trouillot, 1995). Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana figur marginal mengalami invisibilitas historis akibat konstruksi nasionalisme pascakolonial yang selektif (Blackburn, 2004). Dengan demikian, studi ini memperluas pemahaman tentang historiografi Indonesia sebagai arena kontestasi memori dan kekuasaan simbolik (Mrázek, 2010).

Temuan ini juga melampaui pendekatan sejarah konvensional dengan mengintegrasikan teori memori kolektif dan analisis wacana kritis untuk membaca relasi antara historiografi, kekuasaan, dan ideologi (Assmann & Czaplicka, 1995). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap hubungan antara arsip, bahasa, dan produksi legitimasi negara dalam historiografi Indonesia (Stoler, 2009). Kajian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif historis tanpa menjelaskan proses pembentukan makna dalam teks sejarah resmi (Mills, 2004). Penelitian ini menunjukkan bahwa historiografi merupakan praktik diskursif yang menghasilkan struktur ingatan kolektif melalui seleksi dan eksklusi narasi tertentu (Olick, 2007). Dengan demikian, pendekatan analisis wacana kritis memberikan kerangka yang lebih sistematis dalam memahami politik memori di Indonesia pascakolonial (Van Dijk, 2015).

Temuan ini menunjukkan bahwa studi historiografi Indonesia perlu mempertimbangkan praktik penghapusan narasi sebagai bagian dari strategi pembentukan identitas nasional dan kontrol simbolik negara (Erll, 2011). Historiografi tidak dapat dipahami hanya sebagai rekonstruksi fakta sejarah, tetapi juga sebagai proses produksi ideologi melalui representasi simbolik (White, 2014). Pemahaman ini penting untuk membaca bagaimana negara membentuk batas-batas memori kolektif melalui pendidikan dan kebijakan budaya (Anderson, 2006). Analisis terhadap penghapusan narasi juga membuka ruang kritik terhadap dominasi historiografi resmi dalam pembentukan identitas nasional Indonesia (Burke, 2015). Dengan demikian, studi sejarah perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih kritis terhadap relasi antara kekuasaan, arsip, dan produksi pengetahuan historis (Foucault, 1980).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa produksi arsip dan distribusi pengetahuan sejarah memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan ingatan kolektif masyarakat (Mbembe, 2002). Arsip tertentu memperoleh legitimasi lebih besar karena direproduksi secara institusional melalui pendidikan, penerbitan, dan kebijakan negara (Stoler, 2009). Sebaliknya, dokumen yang tidak sesuai dengan narasi nasional dominan mengalami marginalisasi dalam sirkulasi publik dan akademik (Confino, 1997). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kontrol terhadap arsip merupakan bagian dari praktik kekuasaan dalam menentukan memori yang diakui secara sosial (Connerton, 2008). Dengan demikian, politik memori bekerja tidak hanya pada level teks, tetapi juga melalui institusi yang mengatur distribusi pengetahuan sejarah (Nora, 1989).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai penghapusan narasi Sakiko Kanase sebagai praktik politik memori dalam historiografi Indonesia era Soekarno (Cribb, 2020). Kajian ini memperlihatkan bahwa penghilangan figur historis terjadi melalui mekanisme diskursif dan institusional yang membentuk struktur memori kolektif nasional (Wilson, 2022). Penelitian ini juga mengembangkan pemahaman bahwa historiografi Indonesia tidak hanya memproduksi pengetahuan sejarah, tetapi juga membentuk legitimasi ideologis negara (Legge, 2003). Analisis terhadap figur marginal memperluas cakupan studi historiografi Indonesia yang selama ini lebih terfokus pada tokoh nasional utama (Wieringa, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi politik memori dan historiografi pascakolonial di Indonesia (Shiraishi, 1997).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi, relasi kuasa, dan praktik eksklusi memori dalam konteks Indonesia pascakolonial (Fairclough, 1995). Pendekatan analisis wacana kritis memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap produksi sejarah sebagai praktik simbolik negara (Wodak & Meyer, 2016). Penelitian ini memperlihatkan bahwa penghapusan narasi merupakan bagian dari strategi politik memori yang bekerja melalui bahasa, arsip, dan distribusi pengetahuan sejarah (Van Dijk, 2008). Kerangka konseptual yang dikembangkan juga membantu menjelaskan hubungan antara historiografi nasional dan pembentukan identitas kolektif masyarakat Indonesia (Assmann, 2011). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan metodologi kritis untuk membaca historiografi sebagai arena produksi kekuasaan dan memori sosial (Olick, 2007).

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan narasi Sakiko Kanase dalam historiografi Indonesia pada era Soekarno merupakan bagian dari praktik politik memori yang bekerja melalui mekanisme seleksi, representasi, dan eksklusi dalam sejarah resmi negara. Analisis wacana kritis memperlihatkan bahwa historiografi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen ideologis untuk membangun identitas nasional dan legitimasi politik melalui kontrol terhadap memori kolektif. Penghapusan narasi dilakukan melalui strategi diskursif, dominasi arsip tertentu, dan institusionalisasi sejarah nasional yang menempatkan figur di luar orientasi nasionalisme dominan sebagai bagian yang tidak terlihat dalam sejarah resmi. Temuan ini menegaskan bahwa relasi antara historiografi, kekuasaan, dan ideologi memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan ingatan kolektif masyarakat Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa historiografi merupakan praktik diskursif yang berkaitan dengan relasi kuasa dan produksi makna dalam masyarakat pascakolonial. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan historiografi yang lebih kritis, inklusif, dan multidimensional dalam membaca sejarah nasional Indonesia agar praktik eksklusi memori tidak terus direproduksi dalam pendidikan, arsip, dan kebijakan budaya negara.

## Daftar Pustaka

- Adam, A. W. (2019). *Membongkar manipulasi sejarah*. Kompas.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Anderson, B. R. O'G. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ankersmit, F. R. (2001). *Historical representation*. Stanford University Press.
- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity. *New German Critique*, 65, 125–133. <https://doi.org/10.2307/488538>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. Anchor Books.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Blackburn, S. (2020). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Budiawan. (2013). *Mematahkan pewarisan ingatan*. Ombak.
- Burke, P. (2015). *What is cultural history?* (3rd ed.). Polity Press.
- Chartier, R. (2007). *Inscription and erasure: Literature and written culture from the eleventh to the eighteenth century*. University of Pennsylvania Press.
- Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (1999). *Discourse in late modernity: Rethinking critical discourse analysis*. Edinburgh University Press.
- Confino, A. (1997). Collective memory and cultural history: Problems of method. *The American Historical Review*, 102(5), 1386–1403. <https://doi.org/10.1086/ahr/102.5.1386>
- Connerton, P. (2008). Seven types of forgetting. *Memory Studies*, 1(1), 59–71. <https://doi.org/10.1177/1750698007083889>
- Cook, T., & Schwartz, J. M. (2002). Archives, records, and power. *Archival Science*, 2(1–2), 1–19. <https://doi.org/10.1007/BF02435628>
- Cribb, R. (2020). *Historical injustice and memory in Indonesia*. NUS Press.
- Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Kencana.
- Erl, A. (2011). *Memory in culture*. Palgrave Macmillan.
- Erl, A., & Rigney, A. (2009). *Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory*. De Gruyter.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2013). *Language and power*. Routledge.
- Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. In T. van Dijk (Ed.), *Discourse as social interaction* (pp. 258–284). Sage.
- Ferro, M. (2003). *The use and abuse of history: Or how the past is taught*. Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gutman, Y., Brown, A., & Sodaro, A. (2010). *Memory and the future: Transnational politics, ethics and society*. Palgrave Macmillan.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE.
- Heryanto, A. (2006). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.
- Hirsch, M. (2012). *The generation of postmemory*. Columbia University Press.
- Hutton, P. H. (1993). *History as an art of memory*. University Press of New England.
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage.
- Kansteiner, W. (2002). Finding meaning in memory. *History and Theory*, 41(2), 179–197. <https://doi.org/10.1111/0018-2656.00198>
- LaCapra, D. (1998). *History and memory after Auschwitz*. Cornell University Press.
- Legge, J. D. (2003). *Sukarno: A political biography*. Equinox Publishing.
- Lindsay, J., & Liem, H. T. (2012). *Heirs to world culture: Being Indonesian 1950–1965*. KITLV Press.
- Mbembe, A. (2002). The power of the archive and its limits. In C. Hamilton et al. (Eds.), *Refiguring the archive* (pp. 19–27). Kluwer Academic Publishers.
- McGregor, K. E. (2007). *History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia's past*. NUS Press.

- Melvin, J. (2018). *The army and the Indonesian genocide: Mechanics of mass murder*. Routledge.
- Mills, S. (2004). *Discourse*. Routledge.
- Misztal, B. A. (2003). *Theories of social remembering*. Open University Press.
- Mrázek, R. (2010). *A certain age: Colonial Jakarta through the memories of its intellectuals*. Duke University Press.
- Nordholt, H. S. (2004). Decentralisation in Indonesia. *IAS Newsletter*, 33, 20–21.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspectives on Indonesian history*. KITLV Press.
- Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations*, 26, 7–24. <https://doi.org/10.2307/2928520>
- Olick, J. K. (2007). *The politics of regret: On collective memory and historical responsibility*. Routledge.
- Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies. *Annual Review of Sociology*, 24, 105–140. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.105>
- Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V., & Levy, D. (2011). *The collective memory reader*. Oxford University Press.
- Reid, A. (2015). *A history of Southeast Asia: Critical crossroads*. Wiley-Blackwell.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Ricoeur, P. (2004). *Memory, history, forgetting*. University of Chicago Press.
- Robinson, K. (2021). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. Routledge.
- Roosa, J. (2020). *Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
- Samuel, R. (2013). *Theatres of memory: Past and present in contemporary culture*. Verso.
- Shiraishi, T. (1997). *An age in motion: Popular radicalism in Java, 1912–1926*. Cornell University Press.
- Stoler, A. L. (2009). *Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense*. Princeton University Press.
- Trouillot, M.-R. (1995). *Silencing the past: Power and the production of history*. Beacon Press.
- Trouillot, M.-R. (2015). *Silencing the past: Power and the production of history* (2nd ed.). Beacon Press.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse studies. *Discourse Studies*, 17(4), 466–485.
- Vansina, J. (1985). *Oral tradition as history*. University of Wisconsin Press.
- Vatikiotis, M. R. J. (1998). *Indonesian politics under Suharto*. Routledge.
- Vickers, A. (2005). *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- White, H. (1973). *Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe*. Johns Hopkins University Press.
- White, H. (2014). *The practical past*. Northwestern University Press.
- Wieringa, S. E. (2019). *The genocide in Indonesia and feminist politics*. Routledge.
- Wilson, I. D. (2022). *Politics and memory in Indonesia*. Routledge.
- Wodak, R. (2021). *The politics of fear*. SAGE.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Zurbuchen, M. S. (2005). Beginning to remember: The past in the Indonesian present. *Asian Survey*, 42(4), 564–581. <https://doi.org/10.1525/as.2002.42.4.564>